PROBLEMATIKA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Sains

OLEH :

NAMA : **MUNAWAR KHALIL**

NOMOR MAHASISWA : **197121049**

BIDANG KAJIAN UTAMA : **ADMINISTRASI PUBLIK**

PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat merampung penyelesaian Tesis ini yang berjudul **"Problematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti"** Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Tesis ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan penulisan tentang administrasi.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus – tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi, SH, MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak H. Moris Adidi Yogia, S.Sos.,M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Annisa Mardatillah, S.Sos, M.Si selaku dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dan selalu mendukung, menyemangati serta mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Rendi Prayuda, S.IP, M.Si selaku dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar dan meluangkan waktu, tenaga dan fikiran serta selalu memotivasi dan juga mengingatkan penulis untuk menyelesaikan Tesis ini serta menyelesaikan studi tepat waktu.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Seluruh staf, karyawan/ti Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau dan serta perpustakaan Pascasarjana dan perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Tesis ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

8. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini akan dapat bermanfaat dan semoga ilmu yang penulis peroleh berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi nusa dan bangsa.

Wabillahitaufikwalhidayah, wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 23 Juli 2021
Penulis

Munawar Khalil

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN TESIS ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
ABSTRAK ..... **xii**
ABSTRACT ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 14
1.3. Tujuan Penelitian 15
1.4. Manfaat Penelitian 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS **16**
2.1. Penelitian Terdahulu 16
2.2. Tinjauan Pustaka 35
2.2.1. Konsep Administrasi 35
2.2.2. Konsep Organisasi 43
2.2.3. Konsep Manajemen 49
2.2.4. Konsep Monitoring 52
2.2.5. Konsep Pengendalian 55
2.2.6. Konsep Evaluasi 67
2.2.7. Konsep Kebijakan Publik 71
2.2.8. Konsep Implementasi Kebijakan 74
2.2.9. Konsep Pajak 84
2.2.10. Konsep Pajak Daerah 92
2.2.11. Konsep Pajak Sarang Burung Walet 97
2.3. Kerangka Pemikiran 102
2.4. Konsep Operasional 102
2.5. Operasionalisasi Variabel 105

BAB III METODE PENELITIAN **107**

3.1. Tipe Penelitian 107
3.2. Lokasi Penelitian 107
3.3. Informan Penelitian 108
3.4. Jenis dan Sumber Data 109
3.5. Teknik Pengumpulan Data 110
3.6. Teknik Analisa Data 111
3.7. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian 112

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 113
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti..... 113
4.2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 123

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 134
5.1. Hasil Penelitian Tentang Problematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Pemerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 134
5.2. Hambatan dalam Problematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 170

BAB VI PENUTUP 177
6.1. Kesimpulan 177
6.2. Saran 178

DAFTAR KEPUSTAKAAN 180

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Target dan Realisasi Pajak Tahun 2017 – 2019 di Kabupaten Kepulauan Meranti	7
I.2	Daftar Jumlah Wajib Pajak Burung Walet di Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti	10
I.3	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti	11
I.4	Data Hasil Burung Walet dari Tahun 2017 – 2019	12
II.1	Tabel Penelitian Terdahulu.	16
II.2	Operasionalisasi Variabel Problematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.	105
III.1	Jumlah Informan Penelitian Problematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Pemerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	109
III.2	Jadwal Kegiatan Problematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Pemerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	112
IV.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti	118
V.1	Jumlah Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	133
V.2	Jumlah Informan Berdasarkan Umur	134
V.3	Jumlah informan berdasarkan jenjang Pendidikan	134

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

II.1 Kerangka Pikir Penelitian Problematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 102

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PROBLEMATIKA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ABSTRAK

Oleh

Munawar Khalil

Walet merupakan salah satu jenis pendapatan asli daerah yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah adalah Pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet ini juga berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan data diatas, diketahui terjadinya penurunan yang sangat signifikan dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan usaha penangkaran burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti sangat banyak dijumpai. Berdasarkan data diketahui banyaknya jumlah hasil sarang burung walet yang ada di Balai karantina Wilker Pelabuhan Selatpanjang, namun jumlah pajak yang diterima oleh BPPRD tidak sebanding dengan jumlah hasil burung walet yang ada di Balai Karantina tersebut. Dari data tersebut sudah jelas adanya kebocoran dalam pemungutan pajak sarang burung walet sehingga merugikan pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Tujuan utama penelitian ini adalah Menganalisis Problematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Bentuk penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pemungutan pajak sarang burung walet sudah ada sejak tahun 2017 sampai saat ini, akan tetapi pelaksanaannya belum optimal, berikut faktor – faktor yang mengambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet adalah dari segi komunikasi yaitu sosialisasi yang belum tepat sasaran, kemampuan sumberdaya masih rendah sehingga memerlukan diklat untuk meningkatkan kemampuan sumber daya, pada indikator disposisi yaitu rendahnya reward berupa insentif yang diterima petugas pelaksana dan dari indikator struktur birokrasi yaitu SOP yang ada masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mengenai pajak sarang burung walet.

Kata Kunci : Problematika, Kebijakan, Pajak Sarang Burung Walet.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

THE PROBLEMS OF COLLECTING Swallow's Nest TAX IN THE FRAMEWORK OF INCREASING REGIONAL REVENUE IN THE REGENCY OF MERANTI ISLANDS

ABSTRACT

By

Munawar Khalil

Swallow is one type of local revenue which is regulated in the Meranti Islands Regency regional regulation Number 01 of 2018 concerning Amendments to Regional Regulation Number 10 of 2011 concerning Regional Taxes, namely the swallow's nest tax. This swallow nest tax also plays an important role in increasing the Regional Original Income of the Meranti Islands Regency. Based on the data above, it is known that there is a very significant decrease in the collection of swallow nest taxes in the Meranti Islands Regency, while the swiftlet breeding business in the Meranti Islands Regency is very common. Based on the data, it is known that there are a large number of swallow nests in the Selatpanjang Wilker Quarantine Center, but the amount of tax received by BPPRD is not proportional to the number of swallows produced at the Quarantine Center From these data, it is clear that there is a leak in the collection of swallow nest taxes, thereby harming the local revenue of the Meranti Islands Regency. The main purpose of this study is to analyze the problems of collecting swallow's nest taxes in the context of increasing regional revenue in the Meranti Islands Regency. The form of research used is descriptive using qualitative methods. Data collection techniques with observation, interviews and documentation. The results of this study are the collection of swallow's nest taxes has existed since 2017 until now, but its implementation has not been optimal, the following factors hinder the implementation of swallow's nest tax collection in terms of communication, namely socialization that has not been right on target, ability resources are still low so that it requires training to improve resource capabilities, on disposition indicators, namely the low reward in the form of incentives received by implementing officers and from bureaucratic structure indicators, namely the existing SOPs are still general in nature and have not regulated in detail the swallow's nest tax.

Keywords: Problematics, Policy, Swallow's Nest Tax.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan, saat ini sedang menerapkan azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Desentralisasi merupakan pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan kegiatannya untuk memajukan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah dibuka saluran baru bagi pemerintahan Provinsi dan Kabupaten / Kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Agar daerah dapat menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya, perlu sumber keuangan daerah. Semakin besar keuangan daerah, maka akan semakin besar pula kontribusinya terhadap penyelengaraan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan, kesejahteraan, serta pelayanan umum kepada masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah dalam pasal 157 menyebutkan tentang sumber – sumber Pendapatan Daerah meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :
   a. Hasil pajak daerah
   b. Hasil retribusi daerah
   c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
2. Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah.

Menurut Mahmudi (2010:16), jika dibandingkan dengan sektor bisnis, sumber pendapatan pemerintah daerah relatif terprediksi dan lebih stabil, sebab pendapatan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Sedangkan pada sektor bisnis sangat dipengaruhi oleh pasar yang penuh ketidakpastian dan turbulensi, sehingga pendapatan pada sektor bisnis bersifat fluktuatif.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya.

Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, sebagaimana yang diutarakan Kesit Bambang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Prakosa (2005:2), pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daearh. Jenis pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak.

Semakin besarnya peranan PAD berarti semakin sedikit ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat, PAD digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah seperti pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah. Usaha tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan senantiasa berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari jenis-jenis penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah. Jenis - jenis pajak daerah Kabupaten

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kepulauan Meranti menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah antara lain:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan bantuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
11. Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan.

Mengingat pentingnya pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah (PAD) maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berusaha memungut pajak daerah secara professional dan transparan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan serta dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontibusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung dengan cara menganalisis pendapatan daerah melalui laporan realisasinya. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berfungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah menjadi sentral informasi mengenai pajak daerah dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Salah satu jenis pajak yang dipungut di Kabupaten Kelupauan Meranti menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah adalah Pajak sarang burung wallet. Pajak sarang burung walet ini juga berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Mengingat banyaknya terdapat rumah sarang burung walet yang disediakan oleh pengusahan burung walet khususnya di Selatpanjang yang dalam hal ini memiliki potensi. Berikut ini terdapat jenis pajak serta realisasinya di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel I.1 Target dan Realisasi Pajak Tahun 2017 – 2019 di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Jenis Pajak	2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pajak Reklame	200,000,000	207,218,600	103.61	350,000,000	587,191,418	167.77	800,000,000	929,850,479	116.23
2	Pajak Restoran	1,900,000,000	2,140,402,775	116.25	2,000,000,000	2,304,907,308	115.25	2,000,000,000	2,731,744,346	136.59
3	Pajak Hiburan	200,000,000	136,870,787	68.44	500,000,000	194,807,783	38.96	350,000,000	310,647,037	88.76
4	Pajak Penerangan Jalan PLN	2,800,000,000	3,655,213,037	130.54	5,650,000,000	5,037,531,543	89.16	4,500,000,000	4,280,069,436	95.11
4	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	500,000,000			277,253,266	1,046,441,141			258,686,643	
5	Pajak Parkir				50,000,000			100,000,000	34,409,530	34.41
6	Pajak Air Bawah Tanah	60,000,000	20,825,757	34.71	60,000,000	18,138,291	30.23	60,000,000	28,497,419	47.50
7	Pajak Sarang Burung Walet	100,000,000	22,275,550	22,73	500,000,000	598,840,525	119.70	500,000,000	705,728,400	141.15
8	Mineral Bukan	150,000,000	214,317,570	16.21						

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Jenis Pajak	2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Logam dan Batuan									
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2,000,000,000	1,248,006,508	62.40	2,500,000,000	1,894,908,486	75.80	2,900,000,000	1,880,474,376	64.84
10	Pajak Hotel	850,000,000	630,079,073	74.13	900,000,000	907,318,219	100.81	900,000,000	1,108,833,434	123.20
11	BPHTB	1,544,030,739	1,129,110,791	73.08	2,000,000,000	1,511,838,580	75,59	2,300,000,000	1,376,341,013	59.84
	Jumlah	**10,304,030,739**	**9,404,320,448**	**-**	**14,787,253,266**	**14,101,923,294**	**-**	**14,410,000,000**	**13,645,282,113**	**-**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari tabel diatas terdapat 11 jenis pajak daerah yang ditetapkan oleh Kabupaten Kepulauan Meranti, namun penulis memfokuskan pengelolaan pajak sarang burung wallet. Sarang burung walet bertujuan untuk menjaga dan melindungi kelestarian sarang burung walet baik dihabitat alami maupun dihabitat buatan dari bahaya kepunahan, serta untuk meningkatkan produksi dalam upaya memanfaatan untuk kesejahteraan rakyat.

Sebelum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai kabupaten yang baru mekar, sebelumnya di bawah kekuasaan Daerah Kabupaten Bengkalis. Pajak Sarang Burung Walet juga berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerahnya yaitu dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Burung Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi, yang termasuk dalam marga Collocalia. Pengelolaan dan pengusahaan Sarang burung walet merupakan upaya pembinaan habitat dan populasi serta pemanfaatan sarang burung walet dihabitat alami maupun di habitat buatan.

Masa pembayaran pajak sarang burung walet dilakukan 3 bulan sekali waktunya mulai masa panen sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pasaran sarang burung walet. Pemungutan pajak sarang burung walet dipungut langsung oleh petugasnya. Setelah pemekaran menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti, pajak sarang burung walet juga menjadi handalan Pemerintah Daerah memberikan kontribusinya untuk Meningkat Pendapatan Asli daerah (PAD)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengingat terdapat rumah-rumah pengusahaan Sarang burung walet oleh pengusaha yang di jadikan sebagai Wajib Pajak daerah.

Adapun jumlah masyarakat yang mempunyai usaha burung wallet dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.2. Daftar Jumlah Wajib Pajak Burung Walet di Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kecamatan	Jumlah Wajib Pajak
1	Merbau	79
2	Pulau Merbau	55
3	Rangsang	144
4	Rangsang Barat	25
5	Rangsang Pesisir	100
6	Putri Puyu	117
7	Tebing Tinggi	285
8	Tebing Tinggi Barat	43
9	Tebing Tinggi Timur	115
	Jumlah	954

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, 2020

Dari tabel diatas diketahui jumlah wajib pajak sarang burung wallet di Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 954 orang dan jumlah wajib pajak terbanyak berada di Kecamatan Tebing Tinggi sedangkan jumlah wajib pajak paling sedikit berada pada kecamatan Rangsang Barat. Berikut ini juga dijelaskan realisasi pajak penerimaan pajak walet tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel I.3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2017	Rp. 100.000.000	Rp. 22.725.550	22.73
2	2018	Rp. 500.000.000	Rp. 598.480.525	119,70
3	2019	Rp. 500.000.000	Rp. 705.728.400	141,15
4	Jumlah	Rp. 1.100.000.000	Rp. 1.326.934.475	-

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, 2020

Berdasarkan data diatas, diketahui terjadinya penurunan yang sangat signifikan dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan usaha penangkaran burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti sangat banyak dijumpai. Bahkan pengusaha yang belum mempunyai izin usaha juga harus membayar hasil penjualannya kepada pemerintah. Hal ini dikarenakan berdasarkan peraturan bupati nomor 70 Tahun 2011 pasal 7 ayat (1) menyatakan setiap wajib pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah daerah melalui dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain. Oleh sebab itu, BPPRD tetap memungut pajak dari pengusaha meskipun belum memiliki izin usaha tersebut. Dilihat perkembangan usaha walet akan memberikan peluang ekonomi yang sangat maju dimasa mendatang sehingga bermunculan bangunan-bangunan tinggi sebagai tempat menangkar walet didaerah lain di kota Selatpanjang.

Kota Selatpanjang ini banyak sekali bangunan sarang burung walet, keberadaan rumah toko (Ruko) bagi ”penangkaran” untuk habitat burung walet di Kota Selatpanjang kian hari kian bertambah, keberadaan rumah walet ini selain

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menambah padatnya pembangunan di pusat kota juga menghiasi perwajahan Kota Selatpanjang yang identik dengan perairan, jadi tak hayal pula keberadaannya menjadi perwakilan pembangunan daerah kota sagu yang dijuluki Tanah Jantan itu jika kita memasuki wilayah kota Selatpanjang dari kejauhan sudah terlihat berdiri tegak ratusan bangunan penangkaran burung walet di pesisiran selat air hitam.

Usaha walet kerap dicendrungi dengan hasil usaha yang tidak main-main untungnya, mengapa tidak, perkilonya mencapai harga puluhan juta rupiah. Memang bukan usaha tergolong kecil yang tentunya pemilik dari walet ini terkategori pengusaha kaya dari etnis Tionghoa dari berbagai daerah. Sejak tahun 80-an rumah walet itu sudah banyak berdiri di Selatpanjang. Pada awal keberadaannya, bunyi kaset pemikat burung walet itu sangat mengganggu masyarakat namun karena keberadaannya semakin hari semakin banyak, malah menjadi hal yang biasa saja dan seolah-olah keberadaannya sudah suatu yang lumrah di kota ini. Berikut ini juga dijelaskan mengenai data karantina walet dan data yang di tercatat di BPPRD dan Wilker di Pelabuhan Laut Selatpanjang dari tahun 2017 sampai tahun 2019.

Tabel I.4 Data Hasil Burung Walet dari Tahun 2017 – 2019

No	Tahun	Jumlah (Kg)	
		BPPRD	Balai Karantinna Wilker Pelabuhan Selatpanjang
1	2017	3,79	12.549
2	2018	997,5	24.877
3	2019	1.175,6	18.598
		2211	56.028

Sumber : BPPRD dan Wilker Pelabuhan Laut Selat Panjang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari data tabel tersebut diketahui banyaknya jumlah hasil sarang burung walet yang ada di Balai karantina Wilker Pelabuhan Selatpanjang, namun jumlah pajak yang diterima oleh BPPRD tidak sebanding dengan jumlah hasil burung walet yang ada di Balai Karantina tersebut. Dari data tersebut sudah jelas adanya kebocoran dalam pemungutan pajak sarang burung walet sehingga merugikan pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dengan keberadaan ratusan rumah walet ini seharusnya mendapatkan penghasilan bagi daerah ini. Karena dari sektor pajak dari hasil tersebut terhitung lumayan, jika hal ini dapat di tarik pajaknya, saya kira akan mendapatkan nilai tambah dari sektor pajak daerah kepulauan Meranti, namun kenyataannya masih banyak wajib pajak yang lalai dalam menjalankan kewajiban untuk membayar pajak sarang burung walet. Berdasarkan observasi sementara penulis, maka ditemukan beberapa fenomena sebagai berikut :

1. Masih banyaknya pengusaha burung walet yang belum mendapatkan izin dari Bupati namun usaha waletnya sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan dari pendataan pajak usaha burung walet berdasarkan Perda No 10 Tahun 2011 menjadi Perda No. 01 Tahun 2018 tentang pajak daerah belum maksimal sehingga pembayaran pajaknya tidak signifikan.
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, hal ini dibuktikan dari data Balai Karantina Wilker Pelabuhan Laut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selatpanjang. Seharusnya sebelum walet masuk kebalai karantina wajib melunasi pajak waletnya ke BPPRD.

3. Peraturan Daerah mengenai pemungutan pajak sarang burung walet belum berjalan maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
4. Pemerintah belum mengambil langkah tegas terhadap masyarakat yang tidak membayar pajak di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan fenomena dan indikasi permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis ingin mengkaji secara mendalam tentang permasalahan yang sesungguhnya terjadi, dengan judul penelitian **"Problematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti belum optimal?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti?

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama penelitian adalah :

1. Menganalisis dan menjelaskan Problematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Menganalisis dan menjelaskan faktor – faktor yang menghambat dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Guna teoritis, yakni penelitian diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu pengetahuan, memperkaya hasil-hasil penelitian.
b. Guna akademis, yakni penelitian ini diharapakan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
c. Guna praktis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi wajib pajak dan pemerintah untuk sama sama mengoptimalkan pemungutan pajak sarang burung walet.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil – hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2.1. Tabel Penelitian Terdahulu

No	Authors	Findings
1	2	3
1	Lost And Found Tax Dollars: The Impact Of Local Option Sales Taxes On Property Taxes And Own Source Revenue Whitney B. Afonso (2015) J. Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 28 (4), 467-487.	ABSTRAK. Hubungan antara pajak penjualan opsi lokal (LOST) dan pajak properti dan pendapatan asli daerah tidak didokumentasikan dengan baik di literatur. Ini mungkin sebagian karena sifat data yang dikumpulkan, yang gagal menangkap motivasi yang berbeda untuk adopsi LOST. Menggunakan data tingkat kabupaten dari 35 negara bagian, studi ini menemukan bahwa LOST meningkat sendiri sumber pendapatan dan dalam beberapa keadaan mengurangi beban pajak properti. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah menggunakan variabel kebijakan yaitu LOST rate, untuk membedakan kedua jenis kabupaten yang menggunakan HILANG pendapatan secara berbeda. Penelitian ini merupakan langkah awal dalam menjembatani kesenjangan antara literatur LOST dan literatur pilihan campuran pajak.
2	Local option sales taxes and county rainy day funds helisse levine, marc fudge and geoffrey propheter J. Of public budgeting, accounting	Dana stabilisasi hari hujan (RDSF) dan penjualan opsi local pajak (LOST) adalah dua strategi yang digunakan pemerintah daerah untuk memerangi fiscal menekankan. Sementara literatur tentang keduanya kuat, sejauh ini gagal untuk dipertimbangkan secara empiris bahwa keduanya dapat dihubungkan. Salah satu cara yang marginal HILANG dollar yang bisa dihabiskan adalah dengan menyimpannya untuk digunakan di masa depan. Kami menguji koneksinya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Authors	Findings
1	2	3
	& financial management, 28 (4), 467-487.	dengan sampel 414 kabupaten dan mengoreksi bias seleksi dengan Teknik koreksi Heckman. Kami menemukan bahwa setiap kenaikan $ 10 di LOST pendapatan per kapita dikaitkan dengan peningkatan $ 0,10 dalam bentuk yang tidak ditentukan saldo dana umum. Meskipun kecil, ukuran efek positif mendukung teori bahwa LOST berkontribusi pada kecenderungan lebih besar untuk menabung.
3	Jongmin Shon and Yilin Hou (2017) Local Sales Tax Adoption in U.S. Counties : Internal and External Forces. J. Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 29 (3), 289-318.	Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pola yang mendasari perpajakan inovasi. Studi sebelumnya tentang pajak penjualan daerah masih menyisakan celah dalam literature dan membuat hasil tidak meyakinkan karena studi mencakup salah satu negara bagian tingkat atau lokalitas dalam satu negara bagian untuk waktu yang singkat. Untuk menutupi celah tersebut, kami mengumpulkan set data kabupaten di semua negara bagian untuk FY1970-2006 tetapi fokuslah pada 12 negara bagian tidak terancam oleh persaingan antar yurisdiksi. Empiris kami analisis menghasilkan bukti bahwa suatu daerah mengadopsi pajak penjualan lokal untuk politik dan alasan ekonomi daripada kondisi fiskal. Dengan demikian, regional difusi memiliki efek positif pada adopsi pajak penjualan lokal di suatu daerah. Ini temuan berkontribusi secara substantif untuk literatur pajak penjualan sambil mengkonfirmasi difusi kebijakan.
4	Whitney B. Afonso (2013) Diversificaiton Toward Stability? The Effect of Local Sales Taxes on Own Source Revenue. J. Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 25 (4), 649-674.	ABSTRAK. Pemerintah daerah sedang memperluas portofolio pendapatan mereka dan menjadi kurang bergantung pada pajak properti. Ini tidak boleh diasumsikan, Namun demikian, diversifikasi ini meningkatkan stabilitas local sumber pendapatan pemerintah sendiri, seperti yang disarankan oleh penelitian sebelumnya. Begitulah penting bagi pejabat pemerintah daerah untuk mengetahui bagaimana proses ini akan mempengaruhi stabilitas pendapatan asli mereka sendiri, karena hampir pasti melakukan diversifikasi dari pajak stabil, pajak properti (Groves dan Kahn, 1952; McCubbins dan Moule, 2010), dan bergerak menuju pajak yang lebih tidak stabil, seperti pajak penjualan. Dengan menggunakan data tingkat kabupaten di tiga puluh lima negara bagian, saya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Authors	Findings
1	2	3
		memeriksanya pengaruh pajak penjualan opsi lokal (LOST) pada volatilitas sumbernya sendiri pendapatan dan menemukan bahwa penggunaan LOST yang lebih besar meningkatkan volatilitas pendapatan.
5	Wen Wang and Zhirong (Jerry) Zhao. (2011) Fiscal Effects of Local Option Sales Taxes on School Facilities Funding: The Case of North Carolina. J. Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 23 (4), 507-533.	ABSTRAK. Sejak 1970-an, Badan Legislatif Carolina Utara telah mengesahkan kabupatennya memungut empat pajak penjualan opsi lokal (LOST). Hasil dari dua mereka sebagian dibatasi untuk kebutuhan modal sekolah; dua LOST lainnya digunakan untuk menambah pendapatan umum kabupaten yang juga dapat memengaruhi sekolah pendanaan modal. Pengalaman dari negara bagian lain telah menimbulkan kekhawatiran bahwa adopsi LOST dapat meningkatkan ketidaksetaraan dalam keuangan sekolah, tetapi hasil empiris beragam. Menggunakan kumpulan data seratus Utara Distrik sekolah county Carolina dari 2004 hingga 2006, studi ini meneliti bagaimana fasilitas sekolah umum didanai, dan menyelidiki apakah adopsi LOST memperburuk atau mengurangi ketidaksetaraan di ibukota sekolah umum pendapatan di negara bagian.
6	Kim. U Hoffman and Joseph Yuichi Howard (2017) Raising Local Revenue: The Use ad Adequacy of Voluntary Property Taxes in Arkansas. J. Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 29 (4), 409-521	Dengan resesi akhir 2000-an, pemerintah negara bagian dan lokal mengalaminya berjuang untuk menemukan pendapatan yang diperlukan untuk menopang tuntutan warga layanan pemerintah. Salah satu sumber pendapatan potensial adalah memungkinkan warga diri mereka sendiri untuk memilih layanan yang akan didanai melalui penggunaan sukarela pajak. Kabupaten dan kota di Arkansas memiliki kewenangan untuk memungut secara sukarela pajak properti untuk mendukung layanan publik tertentu. Dalam studi ini, kami mengeksplorasi prevalensi dan kecukupan pajak properti sukarela oleh pemerintah daerah di Arkansas. Kami mengidentifikasi 58 pajak sukarela berbeda yang digunakan di 27 kabupaten dan 17 kota di seluruh negara bagian. Apalagi menggunakan pendapatan dan data pengeluaran, kami menemukan pajak sebagai sumber pendapatan yang signifikan beberapa program daerah.
7	Eckhard Janeba and , Steffen Osterloh	Dalam makalah ini kami mengusulkan model teoritis baru persaingan pajak di tingkat lokal. Yurisdiksi besar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Authors	Findings
1	2	3
	(2013) Tax and the city — A theory of local tax competition Journal of Public Economics 106 (2013) 89-100.	(kota) bersaing secara lokal dengan komunitas tetangga yang lebih kecil dan antar wilayah dengan kota-kota yang lebih jauh yurisdiksi kecil (pedalaman) bersaing hanya dengan yurisdiksi lain di lingkungan mereka. Struktur model dimotivasi oleh temuan empiris terbaru serta hasil survei di antara walikota Jerman: intensitas persaingan yang dirasakan untuk perusahaan sangat bervariasi antara yurisdiksi dan terutama dapat dijelaskan oleh ukuran dan lokasi yurisdiksi. Model kami memprediksi - bertentangan dengan temuan sebelumnya untuk persaingan antar negara atau wilayah - bahwa pajak modal dari yurisdiksi besar turun lebih kuat dengan meningkatnya antarwilayah persaingan dan pada akhirnya dapat menyebabkan pajak yang lebih kecil daripada di yurisdiksi kecil. Oleh karena itu, daerah pedalaman kurang terpengaruh dari globalisasi dibandingkan kota. Kami membandingkan hasil kami dengan model persaingan pajak standar di dimana semua yurisdiksi bersaing dengan semua yurisdiksi lainnya.
8	Raphael Parchet (2014) Are Local Tax Rates Strategic Complements or Strategic Substitutes?	Identifikasi interaksi strategis di antara pemerintah daerah biasanya diganggu oleh masalah endogenitas. Makalah ini mengusulkan strategi identifikasi itu memanfaatkan sistem federal multi-tingkat. Reformasi fiskal tingkat negara bagian memberikan jawaban yang bisa dibilang sumber eksogen variasi dalam tarif pajak di yurisdiksi lokal. Apalagi perbatasan Negara mengikat secara spasial efek reformasi fiskal tingkat negara bagian di seluruh bidang yang sebaliknya sangat terintegrasi. Menggunakan fakta bahwa yurisdiksi lokal terletak dekat dengan perbatasan negara bagian memiliki beberapa tetangga di negara bagian lain, saya mengusulkan untuk instrumen tarif pajak (rata-rata) yurisdiksi tetangga dengan tarif pajak tingkat Negara bagian dari negara bagian tetangga. Saya menggunakan ini instrumen untuk mengidentifikasi pengaturan pajak penghasilan pribadi strategis oleh yurisdiksi lokal di Swiss. Berbeda dengan kebanyakan literatur empiris yang ada dan semua hasil berdasarkan instrumen standar, saya menemukan bahwa tarif pajak adalah substitusi strategis di sebagian besar kasus. Tarif pajak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Authors	Findings
1	2	3
		ditemukan sebagai pelengkap strategis hanya dalam konteks besar potongan pajak.
9	STEVEN DELLER, JUDITH I. STALLMANN, AND LINDSAY AMIEL (2012) The Impact of State and Local Tax and Expenditure Limitations on State Economic Growth. Growth and Change Vol. 43 No. 1 (March 2012), pp. 56–84	Dengan menggunakan indeks unik pembatasan Pajak dan Pembatasan Pengeluaran (TEL), kami memperkirakan keluarga model pertumbuhan ekonomi menggunakan panel dari 50 negara bagian AS untuk periode 1969 hingga 2005. Tujuan utama kami adalah untuk menilai hubungan antara pembatasan TEL dan pertumbuhan ekonomi. Hasil menunjukkan bahwa TEL yang lebih kuat yang dikenakan pada pemerintah negara bagian memiliki a efek peredam pada pertumbuhan ekonomi negara dan TEL yang dikenakan pada pemerintah daerah memiliki kelemahan berdampak negatif pada pertumbuhan. Hasil tersebut tidak mendukung argumen bahwa badan legislatif dapat menggunakan pajak dan batas pengeluaran sebagai mekanisme untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
10	Youngzheng Liu and Jianmei Zhao (2011) Intergovernmental fiscal transfers and local tax efforts: evidence from provinces in China Journal of Economic Policy Reform Vol. 14, No. 4, December 2011, 295–300	Makalah ini mengeksplorasi efek insentif dari total transfer fiskal pusat dan komponennya – potongan pajak dan hibah pemerataan - pada upaya pajak provinsi di Cina. Kami model teoritis memprediksi dampak negatif pada upaya pajak provinsi dari kedua total transfer fiskal dan hibah pemerataan, sementara efek rabat pajak secara teoritis tidak jelas. Menggunakan data panel provinsi Cina dari 1995 hingga 2007, studi empiris kami memberikan bukti signifikan tentang implikasi teoretis.
11	Roberto Galbiat and Giulio Zanella (2012) The tax evasion social multiplier: Evidence from Italy. Journal of Public Econmics 96 (2012) 485-494.	Kami memperkirakan eksternalitas sosial dari penggelapan pajak dalam model di mana kemacetan sumber daya audit local otoritas pajak menghasilkan pengganda sosial. Identifikasi didasarkan pada perbedaan perbedaan penghindaran pajak pada tingkat agregasi yang berbeda. Kami menggunakan kumpulan data unik yang berisi audit sekitar 80.000 kecil bisnis dan profesional di Italia dan juga menyediakan ukuran yang tepat dari kelompok referensi dalam model kami. Kami menemukan pengganda sosial sekitar 3, yang berarti bahwa respon keseimbangan terhadap

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Authors	Findings
1	2	3
		guncangan yang menginduksi variasi eksogen dalam pendapatan rata-rata tersembunyi sekitar 3 kali respons rata-rata awal. Ini adalah sebuah efek jangka pendek yang bertahan sejauh sumber daya audit tidak disesuaikan untuk menginternalisasi eksternalitas kemacetan
12	Tsan Ming Choi (2013) Local Sourcing and Fashion Quick Response System: The Impacts of Carbon Footprint Tax. Transportation Research Part E 55 (2013) 43-54	Sistem respons cepat (QR) adalah praktik industri yang mapan dalam pakaian mode. Itu bertujuan untuk meningkatkan manajemen inventaris dengan mengurangi waktu tunggu. Selain mempekerjakan mode pengiriman yang lebih cepat, QR dapat dicapai dengan sumber lokal (bukan sumber lepas pantai). Makalah ini secara analitis mempelajari bagaimana skema perpajakan jejak karbon dirancang dengan baik dapat diterapkan pada sistem QR untuk meningkatkan kelestarian lingkungan melalui penerapan a pabrikan lokal dengan mengimbangi kemungkinan biaya logistic dan produksi yang lebih tinggi. Oleh memeriksa system QR pemesanan tunggal dan pemesanan ganda, kami menggambarkan caranya skema perpajakan jejak karbon mempengaruhi pilihan optimal keputusan sumber. Kami temuan analitis mengungkapkan bahwa skema perpajakan jejak karbon yang dirancang dengan baik oleh Badan pengatur tidak hanya berhasil membujuk pengecer mode untuk mengambil dari local produsen, tetapi itu juga dapat menyebabkan tingkat risiko yang lebih rendah bagi pengecer mode. Skenario peningkatan risiko yang berarti maka hasilnya dan itu memberikan insentif yang signifikan untuk meyakinkan pengecer mode untuk mendukung gagasan bergabung dengan QR ketika pajak jejak karbon diberlakukan.
13	George R. Crowley · Russell S. Sobel (2011) Does fiscal decentralization constrain Leviathan? New evidence from local property tax competition.	Makalah ini menguji kembali apakah desentralisasi fiskal membatasi pemerintah Leviathan. Dengan menggunakan data panel Pennsylvania, kami membandingkan tarif pajak properti aktual dengan Tingkat memaksimalkan pendapatan Leviathan untuk kota, distrik sekolah, dan kabupaten. Menggunakan Metode ekonometrik spasial juga kami perkirakan pada derajat ketergantungan spasial pada ketiganya tingkat pemerintah daerah. Kami menemukan bahwa desentralisasi fiskal menghasilkan persaingan antar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Authors	Findings
1	2	3
	Public Choice (2011) 149:5–30 DOI 10.1007/s11127-011-9826-7	pemerintah yang lebih kuat dan tarif pajak yang lebih rendah. Kami juga menemukan bukti kolusi antar sekolah distrik yang menunjukkan saling ketergantungan yang tinggi tetapi juga tarif pajak yang tinggi. Ini menimbulkan pertanyaan penggunaan buta sastra saat ini ketergantungan spasial sebagai ukuran antar pemerintah kompetisi.
14	Samuel Jibao dan Wilson Prichard (2016) Rebuilding Local Government Finances After Conflict: Lessons from a Property Tax Reform Programme in Post-Conflict Sierra Leone. The Journal of Development Studies, 2016 Vol. 52, No. 12, 1759–1775	Penelitian ini menginterogasi faktor-faktor yang mendasari keberhasilan relatif reformasi pajak property program di Sierra Leone. Menyadari pentingnya politik dalam membentuk hasil reformasi, laporan itu menyoroti strategi reformasi yang telah membantu mengatasi hambatan teknis dan politik untuk reformasi. Ini menyoroti tiga argumen yang saling berhubungan. Pertama, ada kebutuhan akan kemitraan lokal jangka panjang dan langsung yang mendukung kapasitas lokal, membantu menghadapi perlawanan politik dan membangun konstituensi untuk reformasi. Kedua, harus ada memperluas fokus pada upaya kontroversial secara politik untuk memperkuat transparansi, jangkauan publik, dan penegakan hokum di antara elit, karena mereka sangat penting untuk keberhasilan dan keberlanjutan program. Ketiga, fokus pada hal yang sama secara politik elemen reformasi yang kontroversial dapat membantu aktor eksternal menilai dengan lebih baik sejauh mana komitmen politik local reformasi sejak dini, dan dengan demikian menargetkan pendanaan dan upaya reformasi secara lebih efektif.
15	Tidiane Ly and Sonia Paty (2019) Local taxation and tax base mobility: Evidence from France	Makalah ini mengkaji dampak mobilitas basis pajak terhadap perpajakan daerah. Pertama, kami mengembangkan model teoritis untuk memeriksa hubungan antara perpajakan properti bisnis lokal dan mobilitas basis pajak di dalamnya sebuah wilayah metropolitan. Kami menemukan bahwa, dengan adanya kompensasi anggaran, intensitas modal menurun dasar pajak properti bisnis, yang terdiri dari modal dan tanah, menaikkan tarif pajak properti bisnis dan menurunkannya tarif pajak pada penduduk. Kami menguji hasil ini menggunakan reformasi Prancis yang mengubah komposisi utama basis pajak bisnis local

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Authors	Findings
1	2	3
		pada tahun 2010. Selisih-dalam-perbedaan estimasi menunjukkan bahwa pada tahun 2010, penurunan basis pajak mobilitas memang mengakibatkan kenaikan tariff pajak properti bisnis sebesar 14% dan penurunan tariff pajak perumahan sebesar 1,3%, dibandingkan dengan tingkat rata-rata sebelum reformasi
16	Gianluca Veronesi and Kevin Keasey (2013) THE VOICE OF PATIENTS AND THE PUBLIC IN THE NATIONAL HEALTH SERVICE: ISSUES OF IMPLEMENTATION Conceptualizing and Researching Governance in Public and Non-Profit Organizations Studies in Public and Non-profit Governance, Volume 1, 203–226	Tujuan - Bab ini bertujuan untuk memahami seperti apa pendekatan kebijakan lebih berhasil dalam memfasilitasi keterlibatan pasien dan masyarakat dalam desain dan penyediaan layanan perawatan kesehatan di daerah tingkat dan faktor penjelas yang membenarkan hasil implementasi. Metodologi - Dengan menerapkan kebijakan ambiguitas / konflik Richard Matland model implementasi, bab menganalisis dampak dari sejumlah kebijakan yang diperkenalkan setelah 1997 di Layanan Kesehatan Nasional Inggris itu pengguna akhir yang ditargetkan dan penduduk lokal dalam proses pengambilan keputusan. Temuan - Bukti menunjukkan bahwa kebijakan menekankan pada pentingnya kontinjensi khusus konteks dapat lebih efektif diimplementasikan ketika ruang untuk interpretasi dan kebijaksanaan dalam memilih yang sesuai sarana untuk keterlibatan diberikan. Dengan cara ini, tujuan / tujuan keseluruhan kebijakan kesehatan dapat dibentuk kembali secara lokal dengan memungkinkan penerapan strategi fleksibel dalam proses implementasi.
17	Osikhuemhe O. Okwilagwe Towards Rethinking PublicPrivate Partnership Implementation: Insights from the Nigerian Context	Kemitraan Pemerintah Swasta (PPP) terus meningkat perhatian dari pemerintah Nigeria. Namun, sejak itu Penerapan PPP di dalam negeri tidak semuanya mencapai yang diharapkan hasil. Tujuan bab ini adalah untuk mendalami PPP praktik implementasi dan implikasinya pada kontrak harapan organisasi mitra. Pendekatan kualitatif menggunakan data yang dikumpulkan dari 23 wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam Kemitraan Jalan dandalam Kemitraan Transportasi di Nigeria dipekerjakan. Bukti dokumenter juga dikumpulkan. Kelembagaan sifat lingkungan KPBU; praktik birokrasi di lembaga pemerintah; tindakan mengganggu aktor eksternal dan mitigasi risiko proyek yang tidak efektif merupakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Authors	Findings
1	2	3
		tantangan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan Jalan dan Angkutan Kemitraan. Studi ini didasarkan pada pendapat dan pengalaman para pemangku kepentingan utama tentang pelaksanaan KPS praktik di Nigeria, dan ini paling tepat untuk memperoleh data kekayaan. Organisasi mitra yang terlibat dalam infrastruktur PPP berkewajiban untuk memastikannya berjalan efektif diimplementasikan. Jika kemitraan diterapkan dengan buruk, di sana tidak ada alas an untuk mengharapkan bahwa tujuan kemitraan akan tercapai dicapai, dan ini kemungkinan akan berdampak negatif pada sifat kolaboratif kemitraan bekerja dalam memenuhi kewajiban kontrak. Studi ini sangat penting untuk diberikan pemahaman tentang tantangan yang melek dalam mencapai tujuan implementasi kemitraan dalam ekonomi berkembang. Temuan akan menginformasikan praktik dalam area kebijakan KPS di Konteks Nigeria.
18	Juliana Pascualote Lemos de Almeida, Simone Vasconcelos Ribeiro Galina, Marcia Mazzeo Grande, dan Daiane Gressler Brum. Lean thinking: planning and implementation in the public sector.	di badan pengatur Brasil dan untuk menyelidiki penyesuaian yang diperlukan untuk penerapannya. Desain / metodologi / pendekatan - Sebuah studi kasus longitudinal telah dilakukan. Wawancara adalah yang utama sumber bukti. Antara September dan Oktober 2012, data tentang tahap perencanaan dikumpulkan; antara April dan Mei 2015, implementasi kantor Lean diselidiki. Secara keseluruhan, lima karyawan agen di wawancarai. Temuan - Badan mengasumsikan misinya sebagai nilai bagi pengguna, menetapkan proses kontrol, mengevaluasi dan memperbaiki proses untuk mencapai kesempurnaan dan mengenali kelemahannya dalam perbaikan yang berkelanjutan budaya. Perencanaan dan implementasi kantor Lean di badan pengatur mengikuti utama rekomendasi dalam literatur. Namun, diperlukan penyesuaian sesuai dengan kekhasan lembaga publik. Batasan / implikasi penelitian - Karena sifat penelitian ini, tidak ada generalisasi bisa jadi. Selain itu, wawancara dengan manajer membahas tentang perencanaan Lean, yang telah dilakukan di masa lalu, dan penerapan Lean, yang masih berjalan; dengan demikian, beberapa informasi mungkin musykil. Implikasi praktis - Membuat daftar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Authors	Findings
1	2	3
		penyesuaian utama yang diperlukan untuk perencanaan dan menerapkan kantor Lean di badan publik dan beberapa berlaku untuk administrasi publik lainnya tubuh. Orisinalitas / nilai - Studi kantor lean terutama terkait dengan organisasi swasta, tetapi makalah ini menunjukkan bahwa fundamental mereka dipertahankan dalam pelayanan publik, dan dengan demikian membuktikan bahwa pemikiran Lean dapat diterapkan pada administrasi publik. Itu juga menimbulkan serangkaian pertanyaan untuk studi masa depan.
19	Rosnani Mohamad, Suhaiza Ismail, Julia Mohd Said (2017) Performance objectives of public private partnership implementation in Malaysia: perception of key players. Journal of Asia Business Studies.	Public Private Partnership (PPP) telah digunakan di seluruh dunia sebagai mekanisme untuk public sektor untuk pengadaan fasilitas dan layanan umum. Sejak diperkenalkannya PPP di bawah istilah 'Private Finance Initiative' (PFI) oleh Pemerintah Konservatif di Inggris (Inggris) pada tahun 1992, skema ini telah diadopsi oleh banyak negara lain termasuk Prancis, Cina, India, Singapura, Thailand, dan juga Malaysia. Namun demikian karakteristik dan struktur KPBU tersebut unik untuk setiap negara adopsi individu. Lebih penting lagi, negara yang berbeda memiliki tujuan yang berbeda untuk mengadopsi skema PPP (Winch, Onishi dan Schmidt, 2012). Untuk Misalnya, di Inggris Raya, ketika PPP pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992, dua yang utama tujuannya adalah untuk memungkinkan lebih banyak investasi terjadi; dan untuk memberikan bentuk yang lebih baik pengadaan publik, yang dalam situasi yang tepat dapat menghasilkan peningkatan efisiensi tabungan dan nilai uang yang lebih besar daripada pengadaan tradisional (Robinson, 2000).
20	Andreas H. Glas, Markus Schaupp and Michael Essig (2017) An Organizational Perspective On The Implementation Of Strategic Goals In Public Procurement.	Di UE dan terutama di Jerman, pengadaan public terikat pada undang-undang yang ketat yang juga menetapkan dan menegakkan tujuan strategis tersebut sebagai inovasi atau keberlanjutan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis apakah arketipe berbeda dari organisasi pengadaan public (tersentralisasi atau desentralisasi; tingkat negara bagian atau tingkat lokal) memahami dan menerapkan tujuan strategis secara berbeda. Sebuah survei dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Authors	Findings
1	2	3
	Journal Of Public Procurement, Volume 17, Issue 4, 572-605 Winter 2017	data dari 104 entitas adalah digunakan untuk tujuan ini. Temuan mengungkapkan bahwa implementasi Strategi berbeda dalam organisasi terpusat atau tingkat negara bagian dibandingkan dengan organisasi terdesentralisasi atau lokal. Organisasi terpusat memberikan tujuan seperti inovasi, transparansi, dan keberlanjutan menjadi prioritas tinggi, sementara yang lokal menyoroti pembangunan daerah dan dukungan UKM.
21	Eric Prier, Edward Schwerin, and Clifford P. McCue (2016) Implementation Of Sustainable Public Procurement Practices And Policies: A Sorting Framework Journal Of Public Procurement, Volume 16, Issue 3, 312-346 Fall 2016	Secara umum, ada banyak disinsentif yang menghalangi mempromosikan perubahan dalam praktik pengadaan publik oleh lembaga pemerintah. Karena terlibat dalam pembelian berkelanjutan membutuhkan beberapa tingkat kewirausahaan dan pengambilan risiko, kerangka penyortiran diadopsi untuk mengukur apakah beberapa organisasi secara sistematis lebih mungkin untuk mengejar upaya pembelian publik yang berkelanjutan (SPP) dibandingkan yang lain. Analisis satu arah varians dan metode lain diterapkan pada survei pengadaan public praktisi di lebih dari 300 pemerintah di A.S. Hasil dengan kuat menyarankan bahwa badan-badan dari berbagai lingkup dan jangkauan cenderung abstain mengejar upaya SPP secara agresif. Namun, ketika mereka menggunakan SPP, ini upaya cenderung cukup bervariasi antar dan dalam tingkat pemerintahan dan ukuran organisasi. Dalam upaya menjembatani teori dengan data empiris, yang kuat kasus dapat dibuat bahwa status SPP saat ini di Amerika Serikat adalah hasil percobaan acak dan sangat hati-hati dengan sedikit sistematis pola adopsi SPP.
22	Tatjana Volkova and Murod Sattarov (2017) Practical Considerations on the Implementation of Public Private Partnership in Water Utilities in Emerging	Tujuan dari bab ini adalah untuk mengembangkan pragmatis kerangka logis untuk melindungi Publik yang sukses Implementasi Private Partnership (PPP) dalam penyediaan air di pasar negara berkembang. Analisis kasus terkait penelitian pertanyaan tentang seberapa efektif penerapan KPS perbaikan mengungkapkan kekurangan yang cukup besar dalam arus modus operandi. Penelitian dibatasi pada air perkotaan utilitas Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan dan Uzbekistan dengan implikasi paling relevan untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Authors	Findings
1	2	3
	Markets of Central Asia. The Emerald Handbook of Public–Private Partnerships in Developing and Emerging Economies	pasar negara berkembang kondisi. Kerangka logis yang diusulkan dapat ditingkatkan khasiat dan keberlanjutan pelaksanaan KPS di air pasokan di negara berkembang. Kerangka dipusatkan pertanyaan sederhana: 'Apa yang merupakan quid pro quo yang berarti dalam pengaturan KPS yang dibayangkan kepada mitra yang memenuhi syarat?' Kerangka kerja ini memerlukan jawaban yang tepat untuk banyak pertanyaan yang kompleks dan tidak nyaman pengaturan KPS, terutama dalam hal kinerja manajemen, akuntabilitas publik dan manfaat yang mendasari ke pesta. PPP dalam utilitas air adalah gagasan yang popular antara pemerintah dan lembaga keuangan internasional (IFI). PPP umumnya dianggap sebagai alat untuk memberikan solusi optimal untuk masalah air kronis utilitas dalam hal kinerja yang buruk dan investasi yang kurang. Terlepas dari upaya besar besaran modernisasi dan kelembagaan peningkatan utilitas air di Asia Tengah, tingkat keberhasilan dengan modalitas PPP masih agak rendah.
23	Latifa Hamisi Mbelwa, Pawan Adhikari dan Khandakar Shahadat. (2019) Investigation of the institutional and decision-usefulness factors in the implementation of accrual accounting reforms in the public sector of Tanzania. Journal of Accounting in Emerging Economies Vol. 9 No. 3, 2019 pp. 335-365	Tujuan - Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang telah menghasilkan efektivitas implementasi reformasi akuntansi akrual di Pemerintah Pusat Tanzania. Desain / metodologi / pendekatan - Makalah ini didasarkan pada ide-ide teori kelembagaan dan beberapa aspek kegunaan keputusan untuk menggambarkan tekanan eksternal yang memaksa Pemerintah Tanzania untuk merangkul akuntansi akrual dan faktor-faktor yang memperumit penerapannya di tingkat organisasi (dalam entitas pemerintah). Penulis mengambil teknik kuantitatif dan bersifat eksplanatif dan cross-sectional strategi penelitian survei dan metode untuk analisis data. Temuan - temuan kami menunjukkan bahwa adanya tekanan koersif dari donor dan auditor bersama dengan normative tekanan yang muncul dari pelatihan karyawan menghasilkan dampak yang signifikan pada perancangan yang efektif model administrasi akuntansi akrual. Dalam tingkat yang lebih rendah, tekanan dari Dewan Akuntan Nasional dan Auditor dan factor budaya berkorelasi positif dengan penerapan akuntansi akrual di Konteks Tanzania. Dari faktor-faktor yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Authors	Findings
1	2	3
		diteliti penulis, perubahan manajemen terbukti paling sedikit efektif. Ketidaksadaran para pemangku kepentingan utama telah menyebabkan lemahnya komitmen politik dan peraturan. Penerapan akuntansi akrual semakin diperparah oleh kompetensi teknis dan personel yang tidak memadai. Pada akhirnya, penerapan akuntansi akrual telah meningkatkan akuntabilitas manajerial yang signifikan meskipun segmen utama dari perilaku tersebut tidak dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Implikasi praktis – Penerapan akuntansi akrual yang efektif bergantung pada perbaikan dalam masalah budaya dan yang berhubungan dengan manusia. Yang penting untuk dipahami adalah bahwa akuntansi akrual lebih merupakan a reformasi manajemen yang memasukkan perubahan dalam aspek kelembagaan dan akuntabilitas yang lebih luas mekanisme, bukan hanya adopsi teknologi akuntansi tertentu. Tanpa lebih luas seperti itu perubahan, reformasi akuntansi akrual dapat merugikan para teknokrat dan pejabat pemerintah dengan ruang untuk memanipulasi informasi keuangan, Tanzania menjadi contoh. Orisinalitas / nilai - Studi ini menyoroti kasus ekonomi berkembang di mana akuntansi akrual sebenarnya berlaku dan telah berdampak pada akuntabilitas manajerial, tetapi berjuang untuk menghasilkan yang diinginkan hasil dan hasil di tingkat organisasi.
24	Ananchanok Watchaton and Donyaprueth Krairit. (2017) Factors influencing organizational information systems implementation in Thai public universities. Journal of Systems	Tujuan - Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana organisasi sektor publik dapat berhasil diimplementasikan sistem informasi organisasi (IS). Ini mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan implementasi IS organisasi di universitas negeri. Desain / metodologi / pendekatan – Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif digunakan. Itu Model penelitian yang diusulkan didasarkan pada penelitian sebelumnya dan penelitian kualitatif primer termasuk secara mendalam wawancara, survei telepon dan survei surat menggunakan kuesioner semi terstruktur untuk mengidentifikasi faktor penentu dan ukuran keberhasilan implementasi. Berdasarkan hasil

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Authors	Findings
1	2	3
	and Information Technology	survei surat pertama, kuantitatif penelitian dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian. Data dikumpulkan dari personel universitas di 40 perguruan tinggi negeri, dan kajiannya berfokus pada penerapan system registrasi mahasiswa. Temuan - Hasil menunjukkan bahwa implementasi IS organisasi yang berhasil mencakup keputusan dari mereka yang berwenang dan pengguna. Organisasi eksternal dan internal dan factor pengguna individu memiliki hubungan langsung dengan ukuran keberhasilan implementasi, yang menunjukkan perbedaan yang signifikan antara otoritas dan pengguna. Batasan penelitian - Analisis ini didasarkan pada sudut pandang personel universitas negeri; namun, temuan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut tentang IS organisasi public lainnya serta publik lainnya operasi layanan. Implikasi praktis - Studi ini dengan jelas menyarankan serangkaian faktor untuk memandu universitas negeri berhasil menerapkan IS organisasi untuk kondisi local negara berkembang. Orisinalitas / nilai - Studi ini berkontribusi pada pemahaman implementasi SI yang efektif di depan umum universitas di negara berkembang
25	Samuel Nana Yaw Simpson, Lexis Alexander Tetteh, dan Cletus Agyenim-Boateng. (2018) Exploring the socio-cultural factors in the implementation of public financial management information system in Ghana. Journal of Accounting & Organizational Change © Emerald Publishing Limited 1832-5912	Tujuan - Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor sosial budaya yang muncul dalam pelaksanaannya sistem informasi manajemen keuangan terintegrasi (IFMIS) di Ghana, negara berkembang. Desain / metodologi / pendekatan – Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan dari dokumen arsip dan wawancara tatap muka semi terstruktur dengan peserta yang memainkan peran penting dalam implementasi IFMIS di sektor publik Ghana. Temuan – Temuan menunjukkan bahwa IFMIS telah dipertimbangkan oleh Bank Dunia, Departemen untuk Pembangunan Internasional (DFID), Uni Eropa dan Badan Pembangunan Internasional Denmark menjadi rasional, teknis, universal dan tidak bermasalah, penggunaan sistem di lembaga publik Ghana itu terkendala oleh faktor sosial budaya. Faktor-faktor ini termasuk perebutan kekuasaan antara berbagai teknokrat; dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Authors	Findings
1	2	3
		sikap negatif seperti oportunisme dan minat mencari keuntungan terhadap IFMIS. Batasan / implikasi penelitian - Penelitian ini didasarkan pada studi kasus tunggal, tetapi temuannya dapat secara teoritis digeneralisasikan ke sistem manajemen keuangan berbasis teknologi informasi (TI) menunjukkan karakteristik yang sama. Implikasi Praktis - Studi ini menawarkan implikasi praktis bagi pemerintah, konsultan dan lembaga donor. Orisinalitas / nilai - Studi ini memberikan wawasan tambahan melalui penerapan sosiologi dan dualitas teori teknologi informasi untuk mempelajari manajemen keuangan publik berbasis IT tertentu prakarsa.
26	Suhaiza Ismail (2016) Driving forces for implementation of public private partnerships (PPP) in Malaysia and a comparison with the United Kingdom. Journal of Economic and Administrative Sciences Vol. 30 No. 2, 2014 pp. 82-95 r Emerald Group Publishing Limited 1026-4116	Tujuan - Tujuan dari makalah ini ada dua. Pertama, bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pemicu implementasi public private partnership (PPP) di Malaysia. Kedua, penelitian bermaksud untuk membandingkan kekuatan pendorong penerapan PPP di Malaysia dengan Inggris. Desain / metodologi / pendekatan - Menggunakan survei kuesioner, 122 tanggapan diterima dari responden di Malaysia dan tanggapan dianalisis menggunakan analisis deskriptif, termasuk peringkat skor rata-rata dan mean. Dibandingkan dengan faktor pendorong di Inggris, bukti dari sebelumnya studi yang mengadopsi instrumen kuesioner serupa diperoleh dan dianalisis. Temuan - Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga pendorong utama penerapan PPP di Malaysia adalah “Tekanan pembangunan ekonomi yang menuntut lebih banyak fasilitas”, “insentif pribadi” dan “kekurangan pendanaan pemerintah ”. Meski perbandingan hasil antara kedua negara ditemukan bahwa keduanya negara-negara menganggap semua faktor, sampai batas tertentu, sebagai penting, negara yang berbeda memiliki perbedaan prioritas untuk masing-masing kekuatan pendorong. Temuan tersebut menyiratkan bahwa sifat unik KPS dalam perbedaan negara-negara tersebut tercermin dari faktor motivasi yang berbeda di setiap negara untuk menerapkan PPP. Orisinalitas / nilai - Studi ini tidak hanya menawarkan wawasan tentang kekuatan pendorong utama KPS implementasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Authors	Findings
1	2	3
		di Malaysia tetapi juga informasi yang berguna tentang perbandingan faktor motivasi dengan perintis implementasi KPS (yaitu Inggris).
27	Saheed Adekunle Muraina, Kabiru Isa Dandago (2020) Effects of implementation of International Public Sector Accounting Standards on Nigeria's financial reporting quality. International Journal of Public Sector Management Vol. 33 No. 2/3, 2020 pp. 323-338 © Emerald Publishing Limited 0951-3558	Maksud - Tujuan dari makalah ini adalah untuk menguji pengaruh dari penerapan Internasional Standar Akuntansi Sektor Publik (IPSAS) tentang kualitas pelaporan keuangan Nigeria. Desain / metodologi / pendekatan - Studi ini menggunakan desain penelitian survei untuk menentukan efeknya dari penerapan IPSAS pada kualitas pelaporan keuangan Nigeria. Partial Least Square 3 (SmartPLS 3) Teknik analisis digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan - Studi menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas keuangan melaporkan di Nigeria. Secara khusus, IPSAS telah meningkatkan tingkat akuntabilitas, yang pada gilirannya meningkat Kualitas pelaporan keuangan Nigeria. Batasan penelitian - Penelitian ini hanya mengeksplorasi dua variabel penjelas sedangkan variabel lain seperti itu karena transparansi, minimisasi korupsi, komparabilitas, dan representasi yang setia tidak dipertimbangkan pelajaran ini. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian lebih lanjut dapat memperluas cakupannya untuk mencakup beberapa penelitian lain variabel tidak termasuk dalam makalah ini. Implikasi praktis - IPSAS-Akrual telah mendorong Pemerintah Nigeria untuk meluncurkan Aset Pelacakan dan Proyek Manajemen (ATMProject) untuk dengan mudah melacak asetnya untuk tujuan tersebut akuntabilitas. Dengan demikian, dalam studi ini ditemukan akuntabilitas sebagai faktor yang paling penting untuk ditingkatkan kualitas pelaporan keuangan menggunakan IPSAS berbasis akrual di Nigeria. Implikasi sosial - Akuntabilitas akan berdampak positif pada kehidupan orang Nigeria terkait dengan penerapan dana publik untuk berdampak pada kehidupan massa. Orisinalitas / nilai – Signifikansi statistik akuntabilitas ditemukan dalam penelitian ini, menggunakan paling sedikit teknik analisis data persegi, selanjutnya akan meningkatkan integritas keuangan di negara tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Authors	Findings
1	2	3
28	Suhaiza Ismail (2013) Critical success factors of public private partnership (PPP) implementation in Malaysia. Asia-Pacific Journal of Business Administration Vol. 5 No. 1, 2013 pp. 6-19 q Emerald Group Publishing Limited 1757-4323.	Tujuan - Makalah ini bertujuan untuk menguji pentingnya faktor-faktor keberhasilan yang dipersepsikan oleh PT keseluruhan responden. Selain itu, penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi perbedaan tentang pentingnya faktor keberhasilan antara sektor publik dan swasta. Desain / metodologi / pendekatan - Survei kuesioner digunakan untuk mendapatkan persepsi tentang sektor publik dan swasta tentang faktor kunci keberhasilan proyek KPS di Malaysia. Secara total, 179 dapat digunakan tanggapan diperoleh dan dianalisis menggunakan SPSS untuk meranking pentingnya faktor keberhasilan dan untuk meneliti perbedaan persepsi antara pemerintah dan swasta. Temuan - Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa “good governance”, “komitmen publik dan swasta sektor "," kerangka hukum yang menguntungkan "," kebijakan ekonomi yang sehat "dan" ketersediaan pasar keuangan " adalah lima factor keberhasilan utama penerapan KPS di Malaysia. Meski rangkingnya banyak faktor yang berbeda antara sector publik dan swasta, tidak ada perbedaan yang signifikan persepsi sektor publik dan swasta tentang pentingnya faktor-faktor keberhasilan kecuali karena beberapa faktor. Orisinalitas / nilai - Makalah ini tidak hanya menyoroti faktor-faktor penting keberhasilan KPS implementasi di Malaysia, tetapi juga menawarkan bukti tentang pentingnya faktor-faktor tersebut dua pihak utama yang terlibat dalam PPP - sektor public dan sektor swasta.
29	Robert Osei-Kyei and Albert P.C. Chan (2016) Implementation constraints in public-private partnership Empirical comparison between developing and developed economies/countries.	Tujuan - Makalah ini bertujuan untuk mengikuti secara empiris persamaan dan persamaan dalam penerapannya Hambatan dalam kemitraan publik-swasta (PPP) di negara / negara berkembang dan maju, masing-masing diwakili oleh Ghana dan Hong Kong. Desain / metodologi / pendekatan - Survei kuesioner dilakukan dengan pengalaman yang relevan Praktisi PPP di Ghana dan Hong Kong. Seratus tiga kuesioner lengkap diterima untuk analisis. Koefisien Kendall untuk analisis konkordansi, peringkat skor rata-rata, uji Mann - Whitney U dan pengelompokan kuartil digunakan untuk analisis data. Temuan - Hasil menunjukkan enam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Authors	Findings
1	2	3
	Journal of Facilities Management Vol. 15 No. 1, 2017 pp. 90-106 © Emerald Publishing Limited 1472-5967	kesalahan implementasi dengan perbedaan yang signifikan. Kendala Terkait dengan iklim investasi umum proyek KPS (kondisi ekologi KPS) memiliki peringkat lebih tinggi di Ghana bekerja di Hong Kong, sedangkan yang terkait dengan organisasi dan negosiasi proyek PPP lebih tinggi di Hong Kong. Selanjutnya, dua hukuman, penundaan yang lama dalam menyelesaikan negosiasi dan penundaan yang lama karena debat politik, sangat kritis di kedua yurisdiksi, sedangkan "publik negative Persepsi tentang transaksi KPS "dan" penggunaan proposal yang tidak menggunakan "tidak terlalu menjadi tantangan di Indonesia implementasi KPS di kedua yurisdiksi. Orisinalitas / nilai - Temuan studi ini berkontribusi pada pengetahuan tentang praktik terbaik internasional PPP. Selain itu, penawar swasta internasional akan diberi tahu tentang langkah-langkah mitigasi yang harus diambil kapan terlibat dalam pengaturan PPP di belahan dunia mana pun, baik di negara berkembang atau negara maju
30	Arturo Vega and David Brown and Mike Chiasson (2012)	Tujuan - Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengeksplorasi, melalui penggunaan lensa multidisiplin, konteks kebijakan dan ruang lingkup perbaikan dalam program publik berbasis universitas yang difokuskan meningkatkan inovasi pada usaha kecil dan menengah (UKM). Desain / metodologi / pendekatan - Penulis menggunakan birokrasi tingkat jalan (SLB), digabungkan dengan pendekatan system inovasi (SIA) dan analisis diagnostik (DA) untuk memahami konteks komponen yang berdampak pada layanan program publik. Studi adalah bagian dari program penelitian berorientasi pada penyebaran system informasi di UKM dan yang menggunakan berbasis wawancara asli studi kasus dukungan program, wawancara dengan manajer kebijakan regional, dan dokumentasi berkaitan dengan system kebijakan dan program publik yang berbeda. Meskipun pekerjaan empirisnya adalah Inggris dan Uni Eropa yang berpusat pada hasil penelitian memiliki penerapan yang luas. Temuan - Makalah ini menetapkan pentingnya konteks program untuk mendiagnosis dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Authors	Findings
1	2	3
		memberikan dasar untuk perbaikan program publik. Ini lebih lanjut menunjukkan kekokohan file kerangka analisis konteks untuk memberikan wawasan tentang perubahan kebijakan yang diusulkan. Tanggung jawab memperbaiki konteks program bergantung pada pelaku yang beroperasi di luar organisasi program, untuk Misalnya badan pendanaan Uni Eropa, departemen pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan UKM, publik-swasta kemitraan, dan evaluator pribadi. Mengingat kompleksitas ini maka disarankan agar asosiasi UKM memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi UKM dalam program public inovasi dan kebijakan dukungan pengetahuan. Meskipun kebijakan mungkin mengubah kebutuhan public dukungan program untuk inovasi dan karenanya peran universitas sebagai penyedia program dikonfirmasi dan diperluas. Batasan / implikasi penelitian - Hasil penelitian menunjukkan nilai multidisiplin kerangka kerja untuk menganalisis intervensi program di tingkat makro dan mikro dan memberikan dasar untuk kebijakan program dan perbaikan implementasi kebijakan. Orisinalitas / Nilai - Penelitian ini merupakan upaya baru untuk menggunakan SLB, SIA, dan DA kepada public program intervensi berbasis universitas dalam kebijakan UKM dan UKM secara umum. Itu melengkapi masih ada penelitian tentang inovasi terbuka dan pertukaran pengetahuan dengan memperluas konsep public konteks program. Penerima manfaat dari temuan ini termasuk pembuat kebijakan, organisasi program, universitas, asosiasi UKM, dan peneliti.

Sumber : Literatur review pascasarjana UIR, 2020.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1. Konsep Administrasi

Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “ad” dan “ ministrate” yang berarti “to serve” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Sedangkan pendapat A. Dunsire yang dikutip ulang oleh Keban (2008:2) "administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsipprinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

Pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan,harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafi’ie dkk dalam Pasolong, 2011:6).

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Selain itu, Keban juga menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008:4).

Teori Administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Henry Fayol (1841-1925) menggunakan pendekatan atas manajemen administrasi, yaitu suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai pada tingkat pimpinan terbawah.

Fayol melahirkan tiga sumbangan besar bagi administrasi dan manajemen yaitu

1. Aktivitas organisasi,
2. Fungsi atau tugas pimpinan,
3. Prinsip-prinsip administrasi atau manajemen.

Selanjutnya Fayol mengemukakan prinsip-prinsip administrasi yaitu :

a. Pembagian pekerjaan, prinsip ini sama dengan pembagian tenaga kerja menurut Adam Smith, spesialisasi meningkatkan hasil yang membuat tenaga kerja lebih efisien.
b. Wewenang. Manajer harus memberi perintah, wewenang akan membuat
c. Mereka melakukan denga baik
d. Disiplin.Tenaga kerja harus membantu dan melaksanakan aturan yang ditentukan oleh organisasi.
e. Kesatuan komando. Setiap tenagakerja menerima perintah hanya dari yang berkuasa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

f. Kesatuan arah.Beberapa kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan yang sama dapat diperintah oleh seorang manajer menggunakan satu rencana.

g. Mengarahkan kepentingan individu untuk kepentingan umum.

h. Kepentingan setiap orang, pekerja atau kelompok pekerja tidak dapat diutamakan dari kepentingan organisasi secara keseluruhan.

i. Pemberian upah. Pekerja harus dibayar dengan upah yang jelas untuk pelayanan mereka.

j. Pemusatan. Berhubungan pada perbandingan yang mana mengurangi keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

k. Rentang kendali. Garis wewenang dari manajemen puncak pada tingkatan di bawahnya merepresentasikan rantai skalar.

l. Tata tertib. Orang dan bahan-bahan dapat ditempatkan dalam hal yang tepat dan dalam waktu yang tepat.

m. Keadilan. Manajer dapat berbuat baik dan terbuka pada bawahannya.

n. Stabilitas pada jabatan personal, perputaran yang tinggi merupakan ketidakefisienan.

o. Inisiatif. Tenaga kerja yang menyertai untuk memulai dan membawa rencana akan menggunakan upaya pada tingkat tinggi.

p. Rasa persatuan. Kekuatan promosi tim akan tercipta dari keharmonisan dan kesalahan dalam organisasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sedangkat Herbert Simon dalam Pasolong (2011:14) membagi empat prinsip administrasi yang lebih umum yaitu :

a. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialisasi tugas di kalangan kelompok.
b. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam suatu hirarki yang pasti
c. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil.
d. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan, untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujua, proses, langganan, tempat.

Teori administrasi menurut WilliamL. Morrow sebagai berikut :

a. Teori Deskriptif adalah teori yang menggambarkan apa yang nyata dalam sesuatu organisasi dan memberikan postulat mengenai faktor-faktor yang mendorong orang berperilaku.
b. Teori Persepektif, adalah teori yang menggambarkan perubahanperubahan di dalam arah kebijakan publik, dengan mengeksploitasi keahlian birokrasi. Penekanan teori ini adalah untuk melakukukan pembaharuan, melakukan koreksi dan memperbaiki proses pemerintahan.
c. Teori Normatif, pada dasarnya teori mempersoalkan peranan birokrasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Apakah peranan biokrasi dipandang di dalam pengembangan kebijakan dan pembangunan politik, ataukah peranan birokrasi dimantapkan, diperluas atau dibatasi.

e. Teori Asumtif, adalah teori yang memusatkan perhatiannya pada usahausaha untuk memperbaiki praktik administrasi. Untuk mencapai tujuan ini, teori asumsi berusaha memahami hakikat manusiawi yang terjadi di lingkungan birokratis.

f. Teori Instrumental, adalah toeri yang bermaksud untuk melakukan konseptualisasi mengenai cara-cara untuk memperbaiki teknik manajemen, sehingga dapat dibuat sasaran kebijakan secara lebih ralistis.

Teori ini menekankan alat, teknik dan peluang untuk melaksanakan nilainilai yang telah ditentukan. Menurut Stephen P. Robbins, teori administrasi meliputi :

a. Teori Hubungan Manusia.Teori ini dirintis oleh Elton Mayo. Pengembangan Teori Mayo didasarkan pada penemuannya selama memimpin proyek. Mayobermaksud menguji hubungan antara produktivitas dengan lingkungan fisik. Mayo menangkap bahwa normanorma sosial, justru merupakan faktor kunci dalam perilaku kerja individual. Karenanya, rangsangan kenaikan upah tiak memacu pekerja untuk bekerja lebih produktif.

b. Teori Pengambilan Keputusan. Dalam pengambilan keputusan para pemikir menyarankan dipergunakannya statistik, model optimasi,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

model informasi, dan simulasi. Disamping itu dapat juga dimanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari linear programming, critical path scheduling, inventory models, site location models, serta berbagai bentuk resource allocation models.

c. Teori Perilaku. Teori ini bermaksud untuk menintegrasikan semua pengetahuan mengenai anggota organisasi, struktur dan prosesnya. Toeri ini memahami pentingnya faktor perilaku manusia sebagai alat utama untuk mencapai tujuan.

d. Teori Sistem. Dalam teori ini, organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang menampilkan karakteristiknya sebagai penerima masukan, pengolah dan pengahasil.

e. Teori Kontigensi. Pada awalnya teori ini dipergunakan pada pengembangan orangnisasi yang dirancang secara optimal dapat mengadaptasi teknologi dan lingkungan. Teori kontigensia diangkat untuk mencari beberapa karakteristik umum yang melekat pada situasi khusus. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusankeputusanyang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (siagian,2009:4).

The lianggie (dalam pasalong, 2011:3) mendefenisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasalong (2011:3) Administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapa itu juanatas dasar efektif, efesien dan rasional. Selanjutnya ia menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensikara kteristikd andimensi unsur-unsur. Dimensi karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efesien, efektif dan rasional sedangkan dimensi unsur-unsur administrasi yaitu:

a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta
c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan

Perlu dijelaskan bahwa administrasi bisa dikatakan sebagai ilmu karna adanya kesinambungan dengan ilmu lain, ilmu pengetahuan tidak lepas kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Adapun ilmu sosial yang mempunyai kaitan erat dengan ilmu administrasi adalah ilmu politik, hukum, ekonomi, sejarah, filosofi dan antropologi. Administrasi sebagai ilmu pengetahuan baru berkembang sejak akhir abad yang lalu (abad XIX), tetapi administrasi sebagai suatu seni atau administrasi dalam praktek, timbul bersamaan dengan timbulnya peradaban manusia.

Sebagai ilmu pengetahuan administrasi merupakan suatu fenomena masyarakat yang baru, karena baru timbul sebagai suatu cabang dari pada ilmuilmu sosial, termasuk perkembangannya di Indonesia, dengan membawa prinsipprinsip

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang universal, akan tetapi dalam prakteknya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan ilmu administrasi sebagai suatu disiplin ilmiah yang berdiri sendiri.

Administrasi secara sempit dapat dikatakan sebagai kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Berkaitan dengan hal itu, menurut Siagian yang dikutip oleh Kencana Syafiie dalam bukunya yang berjudul "Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)", (2006:5) mengungkapkan bahwa: "Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan. Keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya."

Sedangkan pengertian dari administrasi menurut The Liang Gie yang dikutip Kencana Syafiie dalam bukunya yang berjudul "Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)", (2006:4) secara sederhana mengandung pengertian bahwa: "Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu."

Menurut Dimock yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya "Teori Administrasi Publik" (2007:3) mengemukakan: "Administrasi adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memperolehnya. Administrasi juga mementingkan aspek-aspek konkrit dari metode–metode dan prosedur-prosedur manajemen."

Setelah mengetahui beberapa definisi dari administrasi, maka Silalahi (1992:10-11) mendefinisikan beberapa ciri pokok administrasi, yaitu:

1. Sekelompok orang, artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukan oleh lebih dari satu orang.
2. Kerja sama, artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua orang atau lebih bekerja sama.
3. Pembagian tugas, artinya kegiatan administrasi bukan sekedar kegiatan kerja sama, melainkan kerja sama tersebut harus didasarkan pada pembagian kerja yang jelas.
4. Kegiatan yang runtut dalam suatu proses, artinya kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara berkesinambungan.
5. Tujuan, artinya sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerja sama.

Dari pendapat para ahli diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses yanng mana didalamnya terdapat segenap rangkaian kegiatan kerjasama antara dua orang atau lebih secara tersusun dan tata sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

2.2.2. Konsep Organisasi

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing.

Berikut ini peneliti akan kemukakan beberapa pengertian organisasi menurut para ahli. Menurut Robbins (1994: 4) mengatakan, bahwa: "Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan."

Selanjutnya Hasibuan (2011:120) memberikan pengertian organisasi sebagai berikut: Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi.

Ciri-ciri organisasi dikemukakan Ferland yang dikutip oleh Handayaningrat (1985:3) sebagai berikut :

1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal
2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan (interdependent part) yang merupakan kesatuan usaha / kegiatan
3. Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya / tenaganya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan
5. Adanya suatu tujuan Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan orang juga dipandang sebagai proses, yaitu menyoroti interaksi diantara orang-orang yang menjadi anggota organisasi.

Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja pegawai tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada.

Organisasi dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, oleh karna itu organisasi dapat dikatakan wadah kegiatan dari pada orang-orang yang bekerjasama dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Di kegiatan itu orang-orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Pengertian yang demikian disebut organisasi yang "statis", karena sekedar hanya melihat dari strukturnya. Di samping itu terdapat pengertian organisasi yang bersifat "Dinamis".

Pengertian ini organisasi dilihat dari pada sudut dinamikanya, aktivitas atau tindakan dari pada tata hubungan yang terjadi di dalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun informal. Waldo yang dikutip oleh Silalahi dalam bukunya "Studi tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi" (2003:124) menyatakan definisi organisasi adalah : "Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan di antara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sedangkan pengertian organisasi menurut Thoha yang dikutip oleh Silalahi dalam bukunya "Studi tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi" (2003:124) mengemukakan bahwa: "Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang menunjukkan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Hubungan yang berstruktur ini disebut hirarki dan konsekuensi dari hirarki ialah adanya kategori kelompok superior dengan kelompok subordinasi."

Adapun pengertian Organisasi menurut Weber yang dikutip oleh Thoha dalam bukunya "Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya" (2014:113) bahwa : "Organisasi merupakan suatu batasan-batasan tertentu (boundaries), dengan demikian seseorang yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu."

Sejalan dengan definisi-definisi di atas menurut Handayaningrat (1981:43), menyatakan ciri-ciri organisasi sebagai berikut :

1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal.
2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda tapi satu sama lain saling berkaitan.
3. Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya ataupun tenaganya.
4. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan.
5. Adanya suatu tujuan. Dari definisi diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Organisasi adalah kesatuan dari seluruh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kegiatan yang erat saling berkaitan antara setiap anggota yang ada di dalamnya secara terkoordinir dan memiliki tujuan tertentu.

Peneliti akan mengemukakan pengertian organisasi dari beberapa ahli. Adapun pengertian organisasi menurut para ahli diantaranya dikemukakan oleh Siagian, dalam bukunya Filsafat Administrasi, menjelaskan organisasi seperti berikut setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan (Siagian, 2006:6).

Definisi di atas menunjukkan bahwa orgaisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu ebagai berikut :

a. Organisasi sebagai wadah di mana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan.
b. Organisasi sebagai rangkaian hierarki dan interaksi antara orang – orang dalam suatu ikatan formal.

Menurut Dimock dalam Tangkilisan dengan bukunya Manajemen Publik, mendefinisikan organisasi sebagai berikut: Organisasi adalah suatu cara yang sistematis untuk memadukan bagian-bagian yang saling tergantung menjadi suatu kesatuan yang utuh di mana kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dilatih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Dwight Waldo dalam Kencana Syafie dengan bukunya Birokrasi Pemerintahan Indonesia, menjelaskan: Organisasi sebagai suatu struktur dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kewenangan-kewenangan dan kebiasaan dalam hubungan antar orang- orang pada suatu sistem administrasi. Definisi definisi tersebut di atas dapat disimpulkan organisasi antara lain adalah sebagai berikut:

a. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi.
b. Di dalamnya terjadi hubungan antar individu atau kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi.
c. Terjadi kerja sama dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut
d. Berlangsungnya proses aktivitas berdasarkan kinerja masing – masing.

Definisi organisasi banyak ragamnya, tergantung pada sudut pandang yang dipakai untuk melihat organisasi. Organisasi dapat dipandang sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Namun demikian, definisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli organisasi sekurang-kurangnya ada unsur sistem kerja sama, orang yang berkerja sama, dan tujuan bersama yang hendak dicapai.

Seperti kita ketahui bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa berdiri sendiri. Agar kebutuhan itu dapat terpenuhi, manusia harus berorganisasi dalam hal ini merupakan suatu alat organisasi yang diperlukan dalam masyarakat, karena tujuan tertentu hanya dapat dicapai lewat tindakan yang harus dilakukan dengan kerjasama .

Berdasarkan teori-teori diatas maka pada dasarnya didalam suatu organisasi terdapat pola-pola hubungan yang saling berkaitan satu sama lain dan setiap individu dalam organisasi tersebut harus mampu menyumbangkan usahanya dalam proses

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pencapaian tujuan organisasi. Dalam organisasi setiap individu dituntut untuk memiliki kemampuan sumber daya manusia karena faktor utama dari organisasi adalah sumber daya manusia.

2.2.3. Konsep Manajemen

Secara etimologi, manajemen (bahasa Inggris) berasal dari kata *to manage,* dalam *Webster"s New cooleglate Dictionary*, kata manage dijelaskan berasal dari bahasa Itali "*Managlo"* dari kata "*Managlare*" yang selanjutnya kata ini berasal dari bahasa Latin Manus yang berarti tangan (Hand). Kata manage dalam kamus tersebut diberi arti: membimbing dan mengawasi, memperlakukan dengan seksama, mengurus perniagaan atau urusan-urusan, mencapai urusan tertentu (Sukarna, 1992).

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi mengenai manajemen, diantaranya yang dikemukakan oleh George R. Terry, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan organisasi atau maksud yang nyata (Terry, 2000).

Pada mulanya manajemen belum dapat dikatakan sebagai teori karena teori harus terjadi atas konsep-konsep yang secara sistematis dapat menjelaskan dan meramalkan apa yang terjadi dalam pembuktian. Setelah beberapa zaman dipelajari, manajemen telah memenuhi persyaratan sebagai bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama.

Manajemen merupakan unsur yang menentuan dalam menggerakkan serta mengendalikan proses kegiatan administrasi dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu, pelaksanaan administrasi Negara dapat terwujud apabila terdapat kegiatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

aktivitas manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, bimbingan, dan pengarahan, koordinasi, kontrol dan komunikasi. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan ini dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen.

Hasibuan (2011:2) mengatakan bahwa : "Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu". Karena definisi diatas belum lengkap mendeskripsikan definisi manajemen maka peniliti selanjutnya akan menjelaskan definisi manajemen manajemen menurut Stoner.

Stoner dalam Handoko (2009:2) memberikan batasan manajemen sebagai berikut: Manajemen secara harfiah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan beberapa pegertian manajemen diatas peneliti menyimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan melalui kerjasama dan pemanfaatan semaksimal mungkin sumber daya yang ada. Manajemen bersifat ilmu, artinya kumpulan pengetahuan yang telah disistematikan dan diorganisasikan untuk mencapai kebenaran yang umum sebagaimana layaknya ilmu lainnya.

Bersifat seni berarti adanya keterampilan, keahlian, kemahiran dan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen sebagaimana diketahui adalah tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan merupakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kegiatan manajemen. Adapun fungsi-fungsi manajemen menurut beberapa ahli antara lain: Terry yang dikutip oleh Handayaningrat (1985:25), mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajemen terdiri atas:

1. Perencanaan (planning)
2. Pengorganisasian (organizing)
3. Penggerakan pelaksanaan (actuating)
4. Pengawasan (controlling)".

Selanjutnya F. Mee dalam Handayaningrat (1985:26) menyebutkan fungsi manajemen sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*) adalah proses pemikiran yang matang untuk dilakukan dimasa yang akan datang dengan menentukan kegiatan-kegiatannya.
2. Pengorganisasian (*organizing*) adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, peralatan, kegiatan, tugas, wewenang dan tanggung jawab, sehingga merupakan organisasi yang dapat digerakkan secara keseluruhan dalam rangka tercapainya tujuan yang telah ditentukan.
3. Pemberian motivasi *(motivating*) adalah seluruh proses pemberian motif (dorongan) kepada karyawan untuk bekerja lebih bergairah, sehingga mereka dengan sadar mau bekerja demi tercapainya tujuan organisasi secara berhasil guna dan berdaya guna.
4. Pengawasan (*controlling*) adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

2.2.4. Konsep Monitoring

Menurut Hikmat (2010), monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan berkelanjutan tentang kegiatan/program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/kegiatan itu selanjutnya. Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu.

Monitoring akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu kewaktu, pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara lain tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedangberjalan. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran.

Monitoring didefinisikan sebagai siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan (Mercy, 2005). Umumnya, monitoring digunakan dalam checking antara kinerja dan target yang telah ditentukan. Monitoring ditinjau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dari hubungan terhadap manajemen kinerja adalah proses terintegrasi untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai rencana (on the track). Monitoring dapat memberikan informasi keberlangsungan proses untuk menetapkan langkah menuju ke arah perbaikan yang berkesinambungan. Pada pelaksanaannya, monitoring dilakukan ketika suatu proses sedang berlangsung. Level kajian sistem monitoring mengacu pada kegiatan per kegiatan dalam suatu bagian (Wrihatnolo, 2008), misalnya kegiatan pemesanan barang pada supplier oleh bagian purchasing. Indikator yang menjadi acuan monitoring adalah output per proses / per kegiatan.

Umumnya, pelaku monitoring merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses, baik pelaku proses *(self monitoring*) maupun atasan / supervisor pekerja. Berbagai macam alat bantu yang digunakan dalam pelaksanaan sistem monitoring, baik observasi / interview secara langsung, dokumentasi maupun aplikasi visual (Chong, 2005).

Pada dasarnya, monitoring memiliki dua fungsi dasar yang berhubungan, yaitu compliance monitoring dan performance monitoring (Mercy, 2005). Compliance monitoring berfungsi untuk memastikan proses sesuai dengan harapan / rencana. Sedangkan, performance monitoring berfungsi untuk mengetahui perkembangan organisasi dalam pencapaian target yang diharapkan. Umumnya, output monitoring berupa progress report proses. Output tersebut diukur secara deskriptif maupun non-deskriptif. Output monitoring bertujuan untuk mengetahui kesesuaian proses telah berjalan. Output monitoring berguna pada perbaikan mekanisme proses / kegiatan di mana monitoring dilakukan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Keberhasilan sebuah program dapat dilihat dari apa yang direncanakan dengan apa yang dilakukan, apakah hasil yang diperoleh berkesesuaian dengan hasil perencanaan yang dilakukan. Untuk dapat memperoleh implementasi sebuah acara yang sesuai dengan apa yang direncanakan manajemen harus menyiapkan sebuah program yaitu monitoring, monitoring ditujukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi tentang pelaksanaan program, apakah proses pelaksanaan kegiatan dilakukan seusai dengan apa yang telah direncakan. Selanjutnya temuan-temuan hasil monitoring adalah informasi untuk proses evaluasi sehingga hasilnya apakah program yang ditetapkan dan dilaksanakan memperoleh hasil yang berkesuaian atau tidak. (Suryana, 2010:43).

Beberapa pakar manajemen mengemukakan bahwa fungsi monitoring mempunyai nilai yang sama bobotnya dengan fungsi perencanaan. Conor (dalam Winardi, 2014:383) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan, separuhnya ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan dan setengahnya lagi fungsi oleh pengawasan atau monitoring. Pada umumnya, manajemen menekankan terhadap pentingnya kedua fungsi ini, yaitu perencanaan dan pengawasan (monitoring).

Proses dasar dalam monitoring ini meliputi tiga tahap yaitu: (1) menetapkan standar pelaksanaan; (2) pengukuran pelaksanaan; (3) menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Menurut Dunn (2003:287), monitoring mempunya empat fungsi, yaitu:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Ketaatan (*compliance*). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pemeriksaan (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
3. Laporan (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
4. Penjelasan (*explanation*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

2.2.5. Konsep Pengendalian

Pengendalian menjadi fungsi keempat dan merupakan bagian ujung dan sebuah proses kegiatan. Griffin, memberikan batasan tentang pengendalian sebagai pengamatan secara organisatoris terhadap sasaran yang dicapai perusahaan. (Nitisusastro, 2010:166). Pengendalian adalah proses untuk membuat sebuah organisasi mencapai tujuannya (Suadi, 2006:3). Pengendalian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Earl P.Strong, *controlling is the process of regulating the various factors in an enterprise according to the requirement of its plans*. Artinya : pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perusahaan,agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

2. Harold Koontz, *control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain then are accomplished.* Artinya :Pengendalian adalah pengukuran dan koreksi kinerja bawahan,agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.(Hasibuan, 2006:241-242).
3. Arief Suadi berpendapat bahwa pengendalian manajemen adalah sebuah usaha untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Efektif berbeda dengan efisien, efektif diartikan sebagai kemampuan untuk mengerjakan yang benar, sedangkan efsien diartikan sebagai kemampuan untuk mengerjakan dengan benar. (Suadi, 2006:6-7)
4. Siswanto mengemukakan pengendalian manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk mendapatkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terhadap penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sedapat mungkin secara lebih efektif dan efisien guna mencapai sasaran perusahaan.(Siswanto, 2005:139-140)

5. Robert Anthony mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagai proses untuk memastikan bahwa sumber daya diperoleh dan digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.
6. Zahinul Hoque berpendapat bahwa sistem pengenalian manajemen sebagai suatu alat untuk memperoleh data dalam membantu mengkoordinasikan proses pembuatan perencanaan dan keputusan pengendalian dalam organisasi.
7. Mulyadi dan Setyawan mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagai suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian visi organisasi melalui misi yang telah dipilih dan untuk mengimplementasikan serta memantau pelaksanaan rencana kegiatan tersebut. (Mahmudi, 2010:62)
8. Robert J. Mockler mendefinisikan Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk "menjamin" bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan (Handoko, 2003:359). Pengendalian ini berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena:

1. Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan
2. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana
3. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik
4. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan

Berdasarkan batasan di atas, terdapat empat langkah dalam pengendalian yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan standar dan metode untuk mengukur kinerja (*establish standard and methods for measuring performance*) Penetapan standar dan metode untuk mengukur kinerja bisa mencakup standar dan ukuran untuk segala hal, mulai dari target penjualan dan produksi sampai pada catatan kehadiran dan keamanan pekerja. Untuk menjamin efektivitas langkah ini, standar tersebut harus dispesifikasi dalam bentuk yang berarti dan diterima oleh para individu yang bersangkutan.
2. Mengukur kinerja (*measure the performance*) Langkah mengukur kinerja merupakan proses yang berlanjut dan repetitif, dengan frekuensi aktual bergantung pada jenis aktivitas yang sedang diukur.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar (*compare the performance match with the standar*) Membandingkan kinerja adalah membandingkan hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Apabila kinerja ini sesuai dengan standar, manajer berasumsi bahwa segala sesuatunya telah berjalan secara terkendali. Oleh karena itu, manajer tidak perlu campur tangan secara aktif dalam organisasi.
4. Mengambil tindakan perbaikan (*take corrective action*) Tindakan ini dilakukan manakala kinerja rendah di bawah standar dan analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan. Tindakan perbaikan dapat berupa mengadakan perubahan terhadap satu atau beberapa aktivitas dalam operasi organisasi atau terhadap standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajer hanya memantau kinerja dan bukan melaksanakan pengendalian, kecuali apabila manajer mengikuti terus proses tersebut sampai berakhir. Yang perlu mendapat prioritas adalah menentukan cara yang konstruktif agar kinerja dapat memenuhi standar dan tidak mengidentifikasi kegagalan yang telah terjadi.(Siswanto, 2005:140).

Harold Koontz dan Cyril O'Donnel, mengemukakan asas-asas pengendalian yaitu:

1. Asas tercapainya tujuan *(Principle of assurance of objective*), artinya pengendalian harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan- penyimpangan dari rencana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Asas efisiensi pengendalian (*Principle of efficiency of control),* artinya pengendalian itu efisien, jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang di luar dugaan.
3. Asas tanggung jawab pengendalian (*Principle of control responsibility*), artimya pengendalian hanya dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.
4. Asas pengendalian terhadap masa depan (*principle of future control*), artinya pengendalian yang efektif harus ditujukan ke arah pencegahan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang.
5. Asas pengendalian langsung (*Principle of direct control*), artinya teknik kontrol yang paling efektif ialah mengusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik. Pengendalian itu dilakukan oleh manajer, atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah. Cara yang paling tepat untuk menjamin adanya pelaksanaan yang sesuai dengan rencana adalah mengusahakan sedapat mungkin para petugas memiliki kualitas yang baik.
6. Asas refleksi rencana (*Principle of reflection plans*), artinya pengendalian harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan rencana.
7. Asas penyesuaian dengan organisasi (*Principle of organization suitability*), artinya pengendalian harus dilakukan sesuai dengan struktur

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

organisasi. Manajer dengan bawahannya merupakan sarana untuk melaksanakan rencana. Dengan demikian pengendalian yang efektif harus disesuaikan dengan besarnya wewenang manajer, sehingga mencerminkan struktur organisasi.

8. Asas pengendalian individual *(Principle of individual of control*), artinya pengendalian dan teknik pengendalian harus sesuai dengan kebutuhan manajer. Teknik pengendalian harus ditujukan terhadap kebutuhan-kebutuhan akan informasi setiap manajer. Ruang lingkup informasi yang dibutuhkan itu berbeda satu sama lain, tergantung pada tingkat dan tugas manajer.
9. Asas standar (*Principle of standard*), artinya pengendalian yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.
10. Asas pengendalian terhadap strategi (*Principle of strategic point control*), artinya pengendalian yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor strategis dalam perusahaan.
11. Asas kekecualian (*The exception principle*), artinya efisiensi dalam pengendalian membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor kekecualian. Kekecualian ini dapat terjadi dalam keadaan tertentu ketika situasi berubah atau tidak sama.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

12. Asas pengendalian fleksibel (*Principle of flexibility of control*), artinya pengendalian harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.
13. Asas peninjauan kembali (*Principle of review*), artinya sistem pengendalian harus ditujukan berkali-kali, agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
14. Asas tindakan (*Principle of action*), artinya pengendalian dapat dilakukan, apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, staffing, dan directing. (Hasibuan, 2006:243-244).

Terdapat beberapa klasifikasi pengendalian yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Klasifikasi tersebut bisa dilihat dari sistem maupun waktu pelaksanaannya. Ditinjau dari sistem pelaksanaannya, pengendalian dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Sistem pengendalian umpan balik

Sistem pengendalian umpan balik beroperasi dengan pengukuran beberapa aspek proses yang sedang dikendalikan dan perbaikan proses apabila ukuran menunjukkan bahwa proses menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini memantau operasi proses maupun masukan dalam suatu usaha untuk menerka penyimpangan yang potensial agar tindakan perbaikan atas penyimpangan yang terjadi dapat dilakukan guna mencegah permasalahan kompleks menimpa organisasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sistem pengendalian umpan balik biasanya terdiri atas lima komponen berikut:

a. Proses operasi yang mengolah masukan menjadi keluaran
b. Karakteristik proses yang merupakan subjek pengendalian
c. Sistem pengukuran yang menentukan kondisi dan karakteristik
d. Serangkaian standar atau kriteria di mana kondisi proses yang diukur dengan standar atau kriteria yang selanjutnya diadakan evaluasi
e. Pengatur yang fungsinya untuk membandingkan standar karakteristik proses dengan standar yang mengambil tindakan untuk adaptasi proses apabila perbandingan tersebut menunjukkan terjadinya penyimpangan proses dari rencana yang telah ditetapkan (Siswanto, 2005 : 143-144)

Umpan balik mempunyai dua keunggulan atas pengendalian umpan depan dan pengendalian sejalan. Adapun keunggulannya yaitu:

a. Umpan balik memberi para manajer informasi yang bermakna tentang seberapa efektifnya usaha perencanaan itu. Umpan balik yang menunjukkan sedikit penyimpangan anatara kinerja standar dengan kinerja sesungguhnya merupakan bukti bahwa pada umumnya perencanaan mencapai tujuan.
b. Pengendalian umpan balik dapat meningkatkan motivasi karyawan. (Robbins, 2007:250).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Sistem pengendalian umpan maju

Salah satu kelemahan utama sistem pengendalian umpan balik adalah bahwa sistem tersebut tidak memberikan peringatan suatu penyimpangan sebelum hal tersebut menjadi cukup berarti. Dampaknya, penyimpangan yang memakan biaya besar dapat berlangsung terus atau semakin buruk sebelum tindakan perbaikan yang efektif dilaksanakan. Hadirnya sistem pengendalian umpan maju dengan maksud untuk bertindak secara langsung pada permasalahan tersebut mencoba mencegah sebelum penyimpangan ini terjadi lagi.

Sistem pengendalian umpan maju memiliki komponen yang sama dengan sistem pengendalian umpan balik, yaitu:

a. Proses operasi yang mengolah masukan menjadi keluaran
b. Karakteristik proses yang merupakan subjek pengendalian
c. Sistem pengukuran yang menentukan kondisi dan karakteristik
d. Serangkaian standar atau kriteria di mana kondisi proses yang diukur dengan standar atau kriteria yang selanjutnya diadakan evaluasi
e. Pengatur yang fungsinya untuk membandingkan standar karakteristik proses dengan standar yang mengambil tindakan untuk adaptasi proses apabila perbandingan tersebut menunjukkan terjadinya penyimpangan proses dari rencana yang telah ditetapkan.

3. Sistem pengendalian pencegahan

Jenis pengendalian yang paling didambakan yaitu pengendalian pencegahan yaitu mencegah masalah yang telah diantisipasi. Tindakan ini disebut pengendalian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pencegahan karena terjadi sebelum kegiatan yang sesungguhnya. (Siswanto, 2005 148). Dua sistem pengendalian yang telah dideskripsikan di atas, baik sistem pengendalian umpan balik maupun sistem pengendalian maupun umpan maju, berfungsi secara ekstern terhadap proses yang sedang dikendalikan, memantau operasi, dan terlibat dalam mengambil tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Sebaliknya, sistem pengendalian pencegahan adalah kebajikan dan prosedur yang sebenarnya merupakan bagian dari proses tersebut. Pengendalian pencegahan merupakan pengendalian intern organisasi.

Ditinjau dari waktu pelaksanaannya, pengendalian dapat dibedakan menjadi empat jenis pokok, yaitu:

a. Pengendalian sebelum tindakan (*Preaction controls*) Pengendalian sebelum tindakan sering disebut sebagai pengendalian pendahuluan *(precontrol*). Pengendalikan memastikan bahwa sebelum tindakan dimulai maka sumber daya manusia, bahan, dan finansial yang diperlukan telah dianggarkan.
b. Pengendalian kemudi (*Steering controls*) Pengendalian kemudi dirancang untuk mendeteksi penyimpangan dari standar atau tujuan tertentu dan memungkinkan pengambilan tindakan perbaikan sebelum suatu urutan kegiatan tertentu dilaksanakan.
c. Penyaringan atau pengendalian ya/tidak (*Sceening or yes/no controls*) Pengendalian ya atau tidak merupakan suatu proses penyaringan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

aspek-aspek spesifikasi dari suatu prosedurnya harus disetujui atau syarat tertentu dipenuhi sebelum aktivitas dapat diteruskan.

d. Pengendalian setelah tindakan (*Post antion controls*) Pengendalian ini berusaha untuk mengukur hasil atas suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Penyebab penyimpangan dari rencana atau standar yang telah ditentukan dan temuan tersebut diaplikasikan pada aktivitas yang sama di masa yang akan datang.

Sebelum itu pengendalian sesudah tindakan juga digunakan sebagai dasar untuk balas jasa atau untuk memotivasi karyawan (Siswanto, 2005 143-145). Menurut Hasibuan (2006:244-245), jenis-jenis pengendalian adalah sebagai berikut:

a. Pengendalian karyawan (*Personnel control*) Pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang ada hubungannya dengan kegiatan karyawan.
b. Pengendalian keuangan (*Financial control*) Pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut keuangan, tentang pemasukan dan pengelauaran, biaya-biaya perusahaan termasuk pengendalian anggarannya.
c. Pengendalian produksi (*Production control*) Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan, apakah sesuai dengan standar atau rencananya.
d. Pengendalian waktu (*Time control*) Pengendalian ini ditujukan kepada pengguna waktu, artinya apakah waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan sesuai atau tidak dengan rencana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Pengendalian teknis (*Technical control*) Pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang bersifat fisik, yang berhubungan degan tindakan dan teknis pelaksanaan.

f. Pengendalian kebijaksanaan (*Policy control*) Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui dan menilai, apakah kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah digariskan,

g. Pengendalian penjualan (*Sales control*) Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui, apalah produksi atau jasa yang dihasilkan terjual sesuai dengan target yang ditetapkan.

h. Pengendalian inventaris (*Inventory control*) Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui, apakah invenaris perusahaan masih ada semuanya atau ada yang hilang.

i. Pengendalian pemeliharaan (*Maintenance control*) Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui, apakah semua inventaris perusahaan dan kantor dipelihara dengan baik atau tidak, dan jika ada yang rusak apa kerusakannya, apa masih dapat diperbaiki atau tidak.

2.2.6. Konsep Evaluasi

Menurut pengertian bahasa, Echols dan Shadly (dalam Thoha, 2003:1) mengemukakan bahwa "kata evaluasi berasal dari bahasa inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran." Menurut pengertian istilah, Thoha (2003:1) mengatakan bahwa "evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan."

Secara umum, Cross (dalam Sukardi, 2005:1) berpendapat bahwa "evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah tercapai." Hal ini dijelaskan lagi oleh Sukardi (2015: 1), bahwa definisi tersebut menerangkan secara langsung bahwa evaluasi merupakan proses mendapatkan informasi dan memahami serta mengkomunikasikan hasil informasi tersebut kepada pemangku keputusan. Hal tersebut selaras dengan Wirawan (2011:8-9), yang berpendapat bahwa salah satu tujuan dari evaluasi adalah mengumpulkan informasi, mengukur kinerja, dan menilai manfaat mengenai objek evaluasi yang berkaitan dengan indikator, tujuan, atau standar dalam objek evaluasi.

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen yang berkaitan dengan indikator, tujuan, dan manfaat objek evaluasi atau bahkan mengkomunikasikan informasi mengenai objek evaluasi dengan pemangku kepentingan.

Menurut Suchman yang dikutip oleh Arikunto, Jabar, & Abdul (2010, hal. 56), evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain seperti dikemukakan oleh Stutflebeam yang dikutip oleh Arikunto, Jabar, & Abdul (2010, hal. 57), menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Menurut Dimyati & Mudjiono (2006, hal. 19), pengertian evaluasi dipertegas lagi sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu.

Menurut Arifin & Zainal (2010, hal. 45), mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Purwanto & Ngalim (2010, hal. 57). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau penutup dari suatu program tertentu, melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan, selama program berlangsung dan pada akhir program setelah program itu selesai.

Menurut Umar (2005, hal. 78), evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Berikut penjelasan salah satu tahapan evaluasi yang umumnya digunakan :

1. Menentukan apa yang akan dievaluasi. Dalam dunia bisnis, apa saja yang dapat dievaluasi, mengacu pada program kerja perusahaan. Dalam program kerja perusahaan banyak terdapat aspek-aspek yang dapat dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perlu dievaluasi. Tetapi biasanya yang di prioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi key-succeess factornya.

2. Merancang (desain) kegiatan evalusi. Sebelum evaluasi dilakukan, sebaiknya ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan menjadi jelas.
3. Pengumpulan data. Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
4. Pengolahan dan analisis data. Setelah data terkumpul, data tersebut kemudian diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan antara fakta dan harapan/rencana untuk menghasilkan gap. Besar gap akan sesuai dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.
5. Pelaporan hasil evalusi. Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evalusi didokumentasikan secara tertulis dan diinformasikan baik secara lisan maupun tulisan.
6. Tindak lanjut evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen. Oleh karena itu, hasil evaluasi hendaknya dimanfaatkan oleh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

manajemen untuk mengambil keputusan dalam rangka mengatasi masalah manajemen baik di tingkat strategi maupun di tingkat implementasi strategi.

2.2.7. Konsep Kebijakan Publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengakaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
9. Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno :2009 : 11).

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *" a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*" (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensikonsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.2.8. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab 2006:65) mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakantindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sebenarnya kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Itu artinya bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh- sungguh untuk mencapai tujuan.

Implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya (Jones,1987). Agustino dalam Bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2008:139) mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Publik* Policy (1983:61) mendefenisikan kebijakan sebagai "Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang- undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan- keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya".

Chief J. O. Udoji (1981) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting dan bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kebijakan-kebijakan hanya sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Dari beberapa defenisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu pertama adanya tujuan atau sasaran kebijakan, kedua adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan yang ketiga adalah adanya hasil kegiatan.

Menurut Carl Friedrich (Wahab,2004:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintahdalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Rian Nugroho (2003) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak lebih dan tidak kurang. Dimana implementsi menyangkut tindakan seberapa jauharah yang telah diprogramkan itu benar- benar memuaskan.

Meter dan Horn dalam Subarsono (2005 : 99) mencoba mengadopsi model sistem kebijaksanaan yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yang harus selalu ada agar tuntutan kebijaksanaan bisa direalisasikan menjadi hasil kebijaksanaan.

Terdapat 6 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijaksanaan sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Standar kebijaksanaan dan tujuan: yaitu rincian tujuan keputusan kebijaksanaan secara menyeluruh yang berwujud dokumen peraturan menuju penentuan standar yang spesifik dan konkrit untuk menilai kinerja program.
2. Sumber daya: kebijaksanaan mencakup lebih dari sekedar standar sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar implementasi. Sumber daya ini dapat berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif.
3. Karakteristik agen pelaksana: meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislative dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.
4. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana: implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedurinstitusional yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah.
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik: pengaruh variabel lingkungan terhadap implementasi program, diantaranya sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi pelaksana, bagaimana sifat opini publik, dukungan elit, peran, dan kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam menunjang keberhasilan program.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Disposisi sikap para pelaksana: persepsi pelaksana dalam organisasi dimana program itu diterapkan, hal ini dapat berubah sikap menolak, netral dan menerima yang berkaitan dengan sistem nilai pribadi, loyalitas, kepentingan pribadi dan sebagainya.

Menurut Nugroho (2003:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Konsep (yang didukung data dan informasi masa depan) kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60 persen terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40 persen terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep.

Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Subarsono, 2005) Menurut Meter dan Horn, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.
2. Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia *(human resources*) maupun sumberdaya non manusia (*non-human resources*).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok- kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakeristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting yakni:
   a. Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
   b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan
   c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Dengan adanya berbagai macam teori implementasi kebijakan publik, kita harus memilih teori yang tepat, guna menyelesaikan masalah yang hendak dibenahi. Kita harus jeli memilih teori yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan yang kita pilih.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Namun ada satu hal yang paling penting, yakni implemnetasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri.

Menurut Richard Martland (Nugroho. 2003: 179), pada prinsipnya ada empat "tepat" yang perlu penuhi dalam hal pencapaian keefektifan implementasi kebijakan.

1. Pertama, adalah kebijakannya itu sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada, telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua dari kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga, adalah apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya.
2. Tepat yang kedua adalah tepat pelaksanaannya. Aktor implementasi tidaklah hanya pemerintah.Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah, masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan yang bersifat monopoli, seperti KTP. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kerniskinan. Kebijakan yang bersifat mengarahkan kegiatan masyarakat.
3. Tepat yang ketiga adalah tepat target. Ketepatan ini berkaitan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah target dalam kondisi siap untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diintervensi atau tidak. Ketiga, apakah intervensi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

4. Tepat keempat adalah tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan eksternal sebagai variabel eksogen terdiri dari opini publik, yaitu persepsi publik kebijakan dan implementasi kebijakan, lembaga interpretasi dengan lembaga strategik dalam masyarakat, individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Menurut George C. Edward III dalam Sujianto (2008:38-45) mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

   Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

2. Sumber Daya

   Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan itu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijkan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Tanpa sumber daya yang memadai pula suatu implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Adapun sumber daya yang dimaksud adalah jumlah orang atau staff sebagai pelaksana yang mempunyai keahlian yang memadai, informasi, dan fasilitas-fasilitas yang mendukung lainnya.

3. Disposisi

   Disposisi atau sikap para pelaksana diartikan sebagai kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan juga sebagai motivasi phisikologi para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan. Adapun yang menjadi unsur dalam motivasi tersebut adalah adanya pemahaman dan pengetahuan, adanya arah respon dari pelakasana terhadap implementasi kebijakan, dan intensitas dari respon itu sendiri.

4. Struktur Birokrasi

   Struktur birokrasi adalah struktur kelembagaan pelaksanaan program. Ada dua unsur dalam hal ini, yaitu prosedur rutin atau standar prosedur operasi dan fragmentasi (pemecahan/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan).

2.2.9. Konsep Pajak

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian Negara juga mengenal sumber – sumber penerimanaan dan pos – pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebagian besar kegiatan Negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan – jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/ puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga Negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mensejahterakan rakyat, Negara memerlukan dana untuk kepentingan tersebut. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. Pemungutan pajak haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 ayat 2 undang – undang dasar 1945 yang menegaskan agar setiap pajak yang akan dipungut haruslah berdasarkan Undang – Undang. Kemudian dalam amandemen Undang – Undang Dasar 1945pasal 23 A menyatakan bahwa : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang – undang. Dan kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan UUD 1945 bahwa Segala tindakan yang menempatkan beban

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kepada rakyat, sepert pajak dan lain – lainnya, harus ditetapkan dengan undang – undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari aturan UUD 1945 tersebut, jelas terlihat bahwa Negara Indonesia benar – benar memperhatikan secara serius mengenai penerimaan Negara dari sisi pajak serta pengaturannya, yang dituangkan dalam bentuk Undang – undang dan juga harus ada persetujuan dari DPR.

1. Pengertian Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011 : 1) : "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." Sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2009 : 2) : "Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan." Dari kedua definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :\

a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.

c. Dapat dipaksakan.

d. Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

Pengertian Pajak Menurut Soemitro, dalam Resmi (2014: 1) "Pajak Adalah iuaran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Menurut Djajadiningrat, dalam Resmi (2014: 1) definisi Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerikantah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum".

Brotodihardjo dalam Waluyo (2007: 2) Menyebutkan bahwa : "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemerintahan.” Menurut Sommerfeld dalam Zain (2008: 11) pengertian pajak adalah : “Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”. Dari definisi-definisi pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa, pajak merupakan iuran yang wajib disetorkan ke negara dalam satuan jumlah uang yang dapat dipaksakan secara hukum serta tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Adriani 1987:2 dalam Verawati, 2007). Menurut Prof. DR. Rachmat Sumitro, SH tahun 1990, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu (natural resource). Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Pungutan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan, yang akhirnya digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun tidak.

2. Asas Pemungutan Pajak

1. *Equality*. Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda.
2. *Certainty*. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tariff pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.
3. *Convenience of Payment*. Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. *Economic of Collections*. Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

3. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

A. Stelsel Pajak Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu stelsel nyata, stelsel anggaran, dan stelsel campuran.

1. Stelsel Nyata (riil), menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk Pajak Penghasilan maka objeknya adalah Penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam sutu tahun pajak diketahui. Kelebihan dari stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat diketahui pada saat akhir periode sehingga :

   a. Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tersedia jumlah kas yang memadai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Semua Wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang yang beredar akan terpengaruh

2. Stelsel Anggapan (fiktif), menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya : penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terhutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak terhutang tahun sebelumnya.Dengan stelsel ini, besarnya pajak yang terhutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun,misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

3. Stelsel Campuran, menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain.

B. Asas Pemungutan Pajak Terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu : asa domisili (asas tempat tinggal), asas sumber, dan asas kebangsaan.

1. Asas Domisili, menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik itu penghasilan yang berasal dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
2. Asas Sumber, menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.
3. Asas Kebangsaan, menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem, yaitu : official assessment system, self assessment system, dan with holding system.

1. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparat pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan UndangUndang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada para aparat pajak.
2. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

1. Menghitung sendiri pajak yang terhutang
2. Membayar sendiri pajak yang terhutang
3. Melaporkan sendiri pajak yang terhutang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada wajib pajak sendiri.

3. With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan Undang-Undang perpajakan, keputusan Presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2.10. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah: Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pengertian Pajak Daerah menurut Raharjo (2009:72) bahwa “Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum." Pengertian Pajak Daerah menurut Siahaan (2010:7) bahwa adalah: Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang,yang dapat dipakasa berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari berbagai pendapat para ahli, dapat dinyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiaya penyelenggaraan, pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah unuk pelayanan masyarakat.

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur mengenai:

a. Nama, objek, dan subjek pajak;
b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
c. Wilayah pemungutan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Masa pajak

e. Penetapan pajak

f. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak;

g. Kadaluwarsa penagihan pajak;

h. Sanksi administrasi;

i. Tanggal mulai berlakunya pajak.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011:7), yaitu sebagai berikut :

1. Official Assessment system Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan sistem pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah Pemungutan Pajak Daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak. Sebagaimana tertera dibawah ini:

a. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;

b. Ditetapkan oleh kepala daerah;

c. Dipungut oleh pemungut pajak.

2. Pemungut Pajak Daerah

Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain:

a. Percetakan formulir perpajakan;

b. Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak;

c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak;

Untuk Wajib Pajak, sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak :

a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);

b. Surat Keputusan Pembetulan;

c. Surat Keputusan Keberatan;

d. Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

Jenis-jenis pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jenis pajak daerah pada wilayah administrasi propinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yaitu terdiri dari:

1. Jenis Pajak propinsi terdiri atas:
   a. Pajak Kendaraan Bermotor;
   b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
   c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
   d. Pajak Air Permukaan; dan
   e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
   a. Pajak Hotel;
   b. Pajak Restoran;
   c. Pajak Hiburan;
   d. Pajak Reklame;
   e. Pajak Penerangan Jalan;
   f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
   g. Pajak Parkir;
   h. Pajak Air Tanah;
   i. Pajak Sarang Burung Walet;
   j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
   k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.2.11. Pajak Sarang Burung Walet

Sudah menjadi tabiat manusia, bahwa ia selalu ingin mencoba dan merasakan sesuatu yang baru yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Jika masa dahulu burung walet hanya hidup dan bersarang didalam gua serta hutan-hutan belantara, kini burung walet dapat kita jumpai pada bangunan-bangunan bertingkat yang secara khusus disediakan manusia sebagai tempat tinggal walet. Hal ini bermula pada seorang China yang tinggal di Hongkong.

Pada tahun 1970-an walet ini hanya dilakukan oleh kaum China yang berasal dari Hongkong sebagai hobi belaka, karena perasaan sukanya terhadapsuara kicauan burung walet, kemudian orang China ini membangun rumah walet sebagai tempat persinggahan bersarang dan bertelurnya saja disamping untuk mendengar suaranya. Akan tetapisetelah beberapa tahun lamanya, makin ramai burung walet yang datang untuk bersarang dan bertelur dirumah buatan itu, bahkan mencapai ribuan ekor jumlahnya. Melihat keadaan yang demikian maka orang China tersebut merasa tertarik hati untuk merombak dan membuat lebih besar lagi rumah tempat bersarang burung walet.

Dengan maraknya penangkaran walet di Hongkong serta giatnya para usahawan untuk mencari dan membeli sarang walet, membuat golongan etis China dari berbagai negara merasa tertarik untuk membuka usaha penangkaran sarang walet ini. Usaha penangkaran sarang burung walet akhirnya melingkar diberbagai negara di Dunia, dan sampai pula kenegara jiran tetangga Malaysia, penangkaran walet berkembang bagaikan jamur dinegara ini. Negara Johor, Selangor dan Malaka

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merupakan daerah pengolah sarang walet terbesar di Malaysia, sehingga daerah ini merupakan tempat berkumpulnya pengusaha walet.

Usaha ini ternyata membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, melihat kesuksesan yang diraih dari pengusaha Malaysia menjadi para usahawan dinegara indonesia khususnya Teonghoa beralih profesi dari usaha lain menjadi penangkaran sarang walet. Kemudian dikeluarkan pengaturan terhadap perindustrian sumber daya alam serta menggali pendapatan asli daerah, perlu diatur tentang izin Pengelolaan dan pengusaha sarang walet di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No. 06 Tahun 2002, dan mengenai pajak sarang burung walet yang diatur dalam peraturan daerah No. 08 Tahun 2002.

Usaha penangkaran burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti sangat banyak dijumpai. Dilihat perkembangan usaha walet akan memberikan peluang ekonomi yang sangat maju dimasa mendatang sehingga bermunculan bangunan-bangunan tinggi sebagai tempat menangkar walet didaerah lain di kota selatpanjang. Kota selatpanjang ini banyak sekali bangunan sarang burung walet, keberadaan rumah toko (Ruko) bagi"penangkaran" untuk habitat burung walet di Kota Selatpanjang kian hari kian bertambah, keberadaan rumah walet ini selain menambah padatnya pembangunan di pusat kota juga menghiasi perwajahan Kota Selatpanjang yang identik dengan perairan, jadi tak hayal pula keberadaannya menjadi perwakilan pembangunan daerah kota sagu yang dijuluki Tanah Jantan itu jika kita memasuki

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

wilayah kota Selatpanjang dari kejauhan sudah terlihat berdiri tegak ratusan bangunan penangkaran burung walet di pesisiran selat air hitam.

Pemandangan ruko walet ini juga melihatkan pembangunan ditengah-tengah kota Selatpanjang terus berkembang. Bila ada penangkaran walet tentu bunyi-bunyian yang menjadi pemikat"penarik" burung laut ini juga turut mewarnai kesibukan kota sagu tersebut. Usaha walet kerap dicendrungi dengan hasil usaha yang tidak main-main untungnya, mengapa tidak, perkilonya mencapai harga puluhan juta rupiah. Memang bukan usaha tergolong kecil yang tentunya pemilik dari walet ini terkategori pengusaha kaya dari etnis Tionghoa dari berbagai daerah. Sejak tahun 80-an rumah walet itu sudah banyak berdiri di Selatpanjang.

Pada awal keberadaannya, bunyi kaset pemikat burung walet itu sangat mengganggu masyarakat namun karena keberadaannya semakin hari semakin banyak, malah menjadi hal yang biasa saja dan seolah-olah keberadaannya sudah suatu yang lumrah di kota ini. Dengan keberadaan ratusan rumah walet ini seharusnya mendapatkan penghasilan bagi daerah ini. Karena dari sektor pajak dari hasil tersebut terhitung lumayan, jika hal ini dapat di tarik pajaknya, saya kira akan mendapatkan nilai tambah dari sektor pajak daerah kepulauan Meranti, saya berharap juga pemerintah daerah bersam DPRD untuk secspatnya menetapkan perda terkait retribusi pajak walet tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

harga, collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia linchi. Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet. Yang tidak termasuk objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kegiatan pengambilan sarang burung walet yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan pekalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009, pajak sarang burung wallet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet. Burnung wallet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia linchi.

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 bagian Kelima Belas pasal 72 :

1. Objek pajak sarang burung wallet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.
2. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Pengambilan sarang burung wallet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Kegiatan pengambilan dari/atau pengusahaan sarang burung wallet lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Subjek pajak sarang burung wallet dalam pasal 73 :

1. Subjek pajak sarang burung wallet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung wallet.
2. Wajib pajak sarang burung wallet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung wallet.

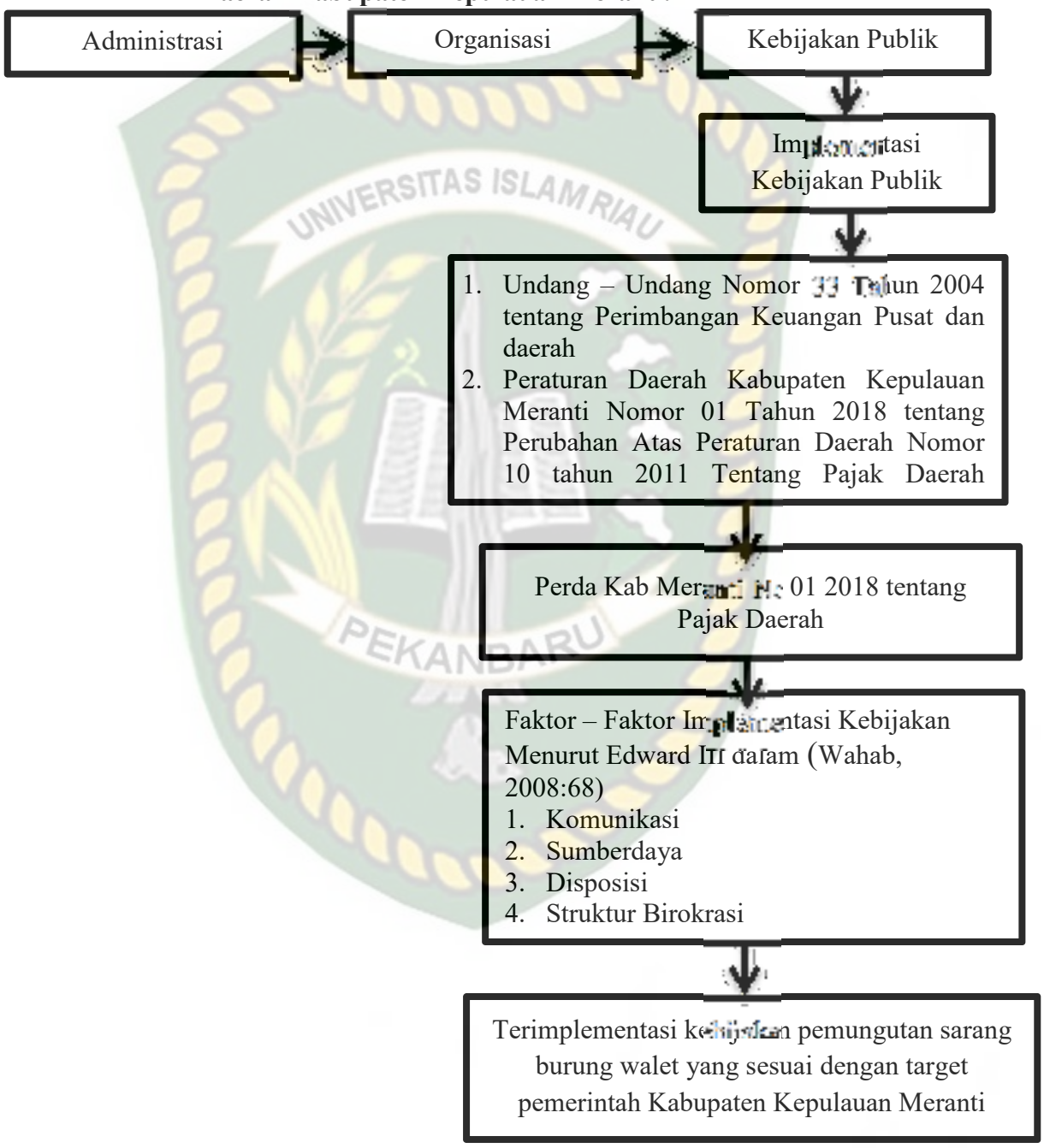
Dasar pengenaan pajak sarang burung wallet dalam pasal 74 : (1) Dasar pengenaan pajak sarang burung wallet adalah nilai jual sarang burung wallet. (2) Nilai jual sarang burung wallet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung wallet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung wallet.

Dalam pasal 75 tarif pajak sarang burung wallet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, tariff pajak sarang burung wallet ditetapkan dengan peraturan daerah. Sementara itu dalam pasal 76 menyebutkan bahwa besaran pokok pajak sarang burung wallet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 74. Pajak sarang burung wallet terutang dipungut diwilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet. Di Kabupaten Minahasa sendiri yang mengatur Pajak sarang burung wallet adalah Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian Problematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.



Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.4. Konsep Operasional

Untuk keseragaman pengertian dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan salah pemahaman dan pengertian, maka akan dijelaskan dan dirumuskan beberapa konsep sebagai berikut :

1. Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses sama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni, melihat bagaimana aktivitas manajemen dihubungkan dengan prinsip – prinsip dari manajemen. Manajemen yaitu koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
4. Kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak lebih dan tidak kurang.
6. Komunikasi adalah alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
7. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan itu dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijkan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya.
8. Disposisi atau sikap para pelaksana diartikan sebagai kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan juga sebagai motivasi phisikologi para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan.
9. Struktur birokrasi adalah struktur kelembagaan pelaksanaan program. Ada dua unsur dalam hal ini, yaitu prosedur rutin atau standar prosedur operasi dan fragmentasi (pemecahan/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan).
10. Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

11. Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum
12. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung.

2.5. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.2 : Operasionalisasi Variabel Problematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Konsep	Variabel	Indikator Variabel	Sub Indikator Variabel
1	2	3	4
Menurut Wahab (2001:65), Implementasi Kebijakan adalah tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat – pejabat, kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.	Implementasi Kebijakan	1. Komunikasi	a. Penyampaian informasi b. Kejelasan informasi c. Konsistensi informasi
		2. Sumber daya (*Resources*)	a. Terpenuhinya jumlah staf b. Kualitas staf c. Informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan d. Kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas e. Fasilitas yang cukup untuk pelaksanaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1	2	3	4
		3. Disposisi	a. Sikap pelaksana b. Komitmen pelaksana
		4. Struktur Birokrasi	a. SOP. b. Aturan tata aliran dalam pelaksanaan program.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) mendefenisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.

Menurut Moleong (2000:5) penelitian dengan menggunakan metode kualitatif didasarkan oleh beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola – pola nilai yang dihadapi.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Meranti untuk melihat Pemungutan Pajak Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun alasan yang mengiring peneliti untuk mengalisis problematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Pemerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dikarenakan masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak hal ini dibuktikan tidak terpenuhinya target yang telah ditetapkan pemerintah setiap bulannya dan masih

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

banyaknya pengusaha burung walet yang belum mendapatkan izin dari Bupati namun usaha waletnya sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama.

3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul peneliti. Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang ProblematikaPemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Pemerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat adalah 1 orang Kepala Badan dan 1 orang sekretaris pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Meranti. Dari informan kunci ini selanjutnya diminta untuk memberikan rekomendasi untuk memilih informan – informan berikutnya, dengan catatan informan – informan tersebut merasakan menilai kondisi lingkungan kerja sehingga terjadi sinkronisasi dan validasi data yang didapat dari informan pertama.

Adapun informan pendukung dari penelitian ini terdiri dari 2 orang Staf Pengelola Pajak, 2 orang staff balai karantina pelabuhan Selat panjang, 5 orang wajib pajak pemilik Sarang Burung Walet di Kabupaten Meranti. Dari keseluruhan jumlah *Key Informan* dan informan pendukung berjumlah 11 orang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III.1 : Jumlah Informan Penelitian Problematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Pemerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Informan Penelitian	Jumlah
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris Badan Penerimaan Pajak	1
3	Staff Penerimaan Pajak	2
4	Staff balai karantina pelabuhan Selatpanjang	2
5	Wajib pajak sarang burung walet	5
	Jumlah	11

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer. Sumber / data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225). Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi dilapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di lapangan.
2. Data sekunder. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012: 225). Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur – literatur, jurnal, koran dan berbagai informasi lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini dimaksudkan sebagai data penunjang guna melengkapi data primer.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moeleong (2012: 121) sumber data utama dalam penelitian Kualitatif adalah kata – kata dan tindakan. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/ audio, pengambilan foto atau film dalam penelitian ini. Sumber data utama yang digunakan adalah kata – kata dan tindakan orang – orang yang diamati dan diwawancarai dari para pejabat yang terkait dengan Problematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Pemerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik seperti :

1. Wawancara (*Interview*)

Untuk mendapatkan data maupun informasi yang mendalam, dalam penelitian ini menggunakan wawancara sebagai teknik utama dalam pengumpulan data, yang diterapkan pada pihak – pihak tertentu yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Sugiyono, 2012: 316). Adapun informan yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah Kepala Badan, Staff pengelola pajak dan Wajib pajak sarang burung walet.

2. Observasi

Menurut Sugiyono (2012: 145) yaitu teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari pendapat tersebut peneliti memahami bahwa, observasi merupakan salah satu teknik pengambilan data, dimana peneliti akan terjun langsung ke lapangan dan mengamati dengan seksama (melihat dan mendengarkan) gejala – gejala dari objek yang diteliti dan mencari data yang tidak bisa didapatkan melalui proses wawancara.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen – dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen tak tertulis seperti gambar dan elektronik. Dokumen – dokumen tersebut dipilih sesuai dengan kajian penelitian (Sugiyono, 2012: 146).

3.6. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses menyusun data atau informasi agar dapat ditafsirkan. Menyusun data diartikan menggolongkan dalam pola, tema, atau kategori. Setelah digolongkan selanjutnya diinterprestasikan. Data perlu di analisis karena maknanya harus diketahui. Analisis data ini merupakan kegiatan yang kontinyu dari awal sampai akhir penelitian.

Data yang didapat baik berupa dokumen tertulis maupun hasil wawancara dan observasi akan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif teknik tipologi. Metode analisa kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis maupun terucapkan dari pelaku yang diamati. Analisa kualitatif dalam strategi tipologi merupakan usaha mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis atau berbagai data yang diperoleh. Data – data dikumpul diseleksi, lalu disederhanakan dengan mengambil intisarinya hingga ditemukan tema pokok, fokus masalah dan pola – polanya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Teknik analisa kualitatif dengan tipologi ini dilakukan berdasarkan interprestasi penulis atas data, baik bahan tertulis, wawancara, dan observasi. Kemungkinan hal mustahil yang diyakini penulis bahwa seorang aktor yakin dan jujur akan apa yang dikatakannya. Oleh karena itu, untuk menghindari atau meminimalisasi kemungkinan adanya bias, maka penulis berusaha mencocokkan hasil wawancara antara satu narasumber dengan yang lainnya, dan juga dengan dokumen – dokumen yang terkait.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Keadaan Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008. Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar 0° 42' 30" - 1° 28' 0" LU, dan 102° 12' 0" - 103° 10' 0" BT, dan terletak pada bagian pesisir Timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT). Secara tidak langsung, daerah ini menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun.

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan Negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara atau Pintu Gerbang Internasional yang menghubungan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut. Hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara, yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri.

Luas kabupaten Kepulauan Meranti mencapai, 3707,84 km², sedangkan luas kota Selatpanjang sebagai ibukotanya adalah 45,44 km².

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Batas –batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis
b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
c. Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Bengkalis
d. Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepuluan Riau.

Berdasarkan hasil penafsiran peta topografi dengan skala 1 : 250.000, diperoleh gambaran bahwa kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar bertopografi datar dengan kelerengan 0–8 %, dengan ketinggian rata-rata sekitar 1-6,4 m di atas permukaan laut. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° - 32° Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi.

Musim hujan terjadi sekitar bulan September-Januari, dan musim kemarau terjadi sekitar bulan Februari hingga Agustus. Gugusan daerah kepulauan ini terdapat beberapa pulau besar, seperti pulau Tebing Tinggi (1.438,83 km²), Pulau Rangsang (922,10 km²), Pulau Padang dan Merbau (1.348,91 km²). Pada umumnya, struktur tanah di Kabupaten Kepuluan Meranti terdiri atas tanah organosol (Histosil), yaitu tanah gambut yang banyak mengandung bahan organik. Tanah ini dominan diwilayah Kabupaten Kepulauan Meranti terutama daratan rendah diantara aliran sungai. Sedangkan disepanjang aliran sungai umumnya terdapat formasi tanggul alam natural river leves yang terdiri dari tanah-tanah Alluvial (Entisol).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang baru dimekarkan lima tahun silam. Di Kabupaten Kepulauan Meranti telah terjadi perkembangan pada berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Di Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat tujuh agama yang dianut oleh masyarakat, yaitu Islam 160,585 Jiwa, Kristen 12,370 jiwa, Katolik 168 jiwa, Budha 23,961 jiwa, Konguchu 1,374 jiwa, dan Hindu 75 jiwa. Sarana ibadah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Masjid 243 buah, Mushalla 300 buah, Gereja 15 buah, dan Vihara 37 buah. Bukan hanya agama yang beragam tetapi terdapat banyak etnis di Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni Melayu, Minangkabau, Bugis, Batak, Jawa, dan Tionghoa.

Kabupaten Kepulauan meranti mempunyai banyak potensi sumber daya alam, yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Masyarakat disana berkerja sebagai bertani, pelaut, nelayan, dan berdagang. Secara geografis wilayah Kabupaten Kepuluan Meranti memiliki potensi perairan laut dan perairan umum yang cukup luas serta daratan yang dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan, sehingga berpeluang bagi investor untuk menanamkan investasi baik dibidang penangkapan di peraiaran lepas pantai dan budidaya perikanan (tambak, keramba dan kolam). Disamping sungai-sungai dan selat, Kabupaten Kepuluan Meranti juga memiliki banyak terdapat parit baik keberadaannya secara proses alami maupun yang dibuat manusia. Sebagian besar parit-parit ini berfungsi sebagai drainase pengairan dan transportasi bagi masyarakat.

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi sumber daya alam, baik sektor Migas maupun Non Migas. Di sektor Migas berupa minyak bumi dan gas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

alam yang terdapat di daerah kawasan pulau Padang. Di kawasan ini telah beroperasi PT Kondur Petroleum S.A yakni di daerah Kurau Desa Lukit (Kecamatan Merbau). Perusahaan ini mampu produksi 8500 barel/hari.Selain minyak bumi, juga ada gas bumi sebesar 12 MMSCFD (juta kubik kaki per hari) yang direncanakan penggunaannya dimulai 2011–2020.

Di sektor Non Migas Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi beberapa jenis perkebunan seperti sagu (Metroxylon sp) dengan produksi 440.309 ton/tahun (2012), kelapa: 50.594,4 ton/tahun, karet: 17.470 ton/tahun, pinang: 1.720,4 ton/tahun, kopi: 1.685,25 ton/tahun. Hingga kini, potensi perkebunan hanya diperdagangkan dalam bentuk bahan baku keluar daerah Riau dan belum dimaksimalkan menjadi industri hilir, sehingga belum membawa nilai tambah yang mendampak luas bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Sementara di sektor kelautan dan perikanan dengan hasil tangkapan sebanyak 2.206,8 ton/tahun. Selain itu, masih ada potensi dibidang kehutanan, industri pariwisata, potensi tambang dan energi.

2. Pemerintah Daerah

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten termuda di wilayah Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran terakhir dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009. Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti kini dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 Kecamatan dan 101 desa/kelurahan, sebagai yang terlihat pada tabel berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel IV.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah	Kelurahan/ Desa	Jumlah Penduduk
1	2	3	4	5	6
1	Tebing tinggi	Selatpanjang	849,50	9	76.763
2	Tebing tinggi barat	Alai	586,83	11	15.126
3	Rangsang	Tanjung samak	681,00	17	28.106
4	Rangsang barat	Bantar	241,60	16	29.770
5	Merbau	Teluk belitung	1.348,91	14	47.370
6	Pulau merbau	Renak rungun	765,987	7	13.987
7	Tebing tinggi timur	Sungai tohor	804,06	7	25.887
8	Putri puyu	Bandul	847,540	10	17.919
9	Rangsang pesisir	Sonde	761,87	10	10.778
	Total			101	

Sumber: Kabupaten Kepulauan Meranti dalam angka 2021

Dari tabel di atas dapat dipahami bawha jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meratni sebanyak 9 kecamatan yang terdiri dari 101 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Rangsang 17 desa/kelurahan dan Rangsang Barat dengan 16 desa/kelurahan dan kecamatan yang dengan jumlah desa/kelurahan terkecil adalah Pulau Merbau dan Tebing Tinggi Timur dengan 7 desa/kelurahan. Jumlah penduduk yang paling terbanyak adalah di Kecamatan Tebing Tinggi sebanyak 76,763 Jiwa, dan Kecamatan Rangsang Pesisir hanya memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 10,778 Jiwa.

3. Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti

Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 265,706 Jiwa dimana terdapat berbagai macam suku, agama dan mata pencarian yang berbeda. Sebagai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kabupaten Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai banyak potensi sumber daya alam yang menjadi penopang bagi hidup masyarakat, dimana sebagian besar bekerja sebagai petani, berkebun, bertenak, perikanan dan berdagang.

Pada bidang pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki luas tanaman padi sebanyak 2,523 ha; jagung 123 ha; ketela rambat 51 ha; ketela pohon 98 ha; dan kacang tanah 10. Demikian pula dibidang perkebunan , untuk area tanaman perkebunan yang dimiliki penduduk Kabupaten Kepualauan Meranti yaitu 29,920 ha; untuk perkebunan kelapa, 15,883 ha; untuk luas area perkebunan karet, sagu 32,022 ha; kopi 1,130 ha; dan perkebunan pinang 480 ha; dimana jumlah produksi perkebunan milik penduduk Kabupaten Kepualaun Meranti semakin lama semakin meningkat.

Dibidang pertenakan, perikanan dan berdagang penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki hasil yang cukup produktif dimana untuk dipertenakan sendiri memiliki hasil 6,083 ekor untuk kambing, 4,208 ekor sapi, 44,035 ekor ayam beras, dan 8,731 ekor itik, hal serupa terjadi di bidang perikanan dimana tercatat 27,85 kolam yang dimiliki penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk di sektor perdagangan sendiri masyarakat disana cukup banyak. Hal ini terlihat dari jumlah pasar tradisional dan tempat usaha dengan 1,018 kios yang dimiliki untuk berdagang/usaha bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Sosial Budaya Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam perkembangan Kabupaten Kepulauan Meranti kehidupan masyarakat terbentuk dari berbagai suku bangsa dan golongan etnik, seperti golongan asli Melayu setempat, Bugis, Makasar, Jawa, Tionghoa dan dari daerah lainnya. Golongan tersebut saling membaur, berhubungan dan saling memengaruhi sehingga membentuk suatu persatuan baik sosial maupun budaya yang dicirikan dengan semangat berkompetisi dan sikap kegotong-royongan antar etnis tinggi dan mudah menerima perubahan sejalan dengan perkembangan zaman.

Dalam kehidupan sosial budaya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti selalu membentuk masyarakat dengan budaya Melayu Islami, misalnya dengan berbusana Melayu (Teluk Belanga bagi kaum pria dan busana muslimah bagi kaum wanita) pada hari atau acara-acara tertentu. Begitu juga di sekolah-sekolah, anak-anak didik dibiasakan mengenal dan mengenakan busana Melayu pada hari-hari tertentu. Selain itu upaya melestarikan Arab Melayu, sehingga nama jalan-jalan dan nama kantor instansi pemerintah harus ditulis dengan Arab Melayu. Demikian pula arsitek gedung-gedung pemerintah khususnya dan swasta umumnya harus menggambarkan arsitek Melayu, minimal terpasang di atasnya Selembayung.

Tugas dan amanah mempertahankan untuk dan menanamkan budaya Melayu Islami mendorong pemerintah harus bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Riau dan Majlis Ulama Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk mewujudkan masyarakat Melayu agamis Islami dewasa ini bukan hal yang mudah, karena tantangan dan godaan budaya global hegimoni Barat sudah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mewabah. Namun perlu disadari bersama bahwa hanya nilai-nilai budaya Islami yang mampu memelihara dan memperkokoh jatidiri anak negeri. Tradisi dan budaya Islami yang menjadi jati diri dan basis pembangunan tidak akan menghalangi untuk melakukan modernisasi dalam upaya membangun dan memajukan negeri. Untuk menjadi maju seperti bangsa Barat tidak harus berbudaya Barat, karena modernisasi bukan westernisasi. Bahwa kita harus belajar dan melakukan alih teknologi yang dihasilkan oleh Barat adalah suatu keniscayaan, tetapi budaya dan agama tidak boleh digadaikan. Sebagaimana dulu, di abad pertengahan, Barat belajar dan melakukan alih teknologi dari dunia Islam, dan karena itu mereka bangkit dan maju, walau tanpa mengambil agama dan budaya Islam.

Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti yang pemerintah lakukan senantiasa mengacu kepada nilai-nilai melayu, Islam, dan modernisasi. Ketiga aspek ini merupakan tujuan integral dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Kesemuannya itu merupakan kewajiban yang diberikan oleh masyarakat di bahu pemegang kekuasaan didaerah tersebut dalam hal ini Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti beserta jajarannya, untuk tetap menjadikan Melayu dan Islam sebagai jati diri anak-anak melayu dalam upaya membangun dan memajukan negeri, agar identitas tersebut tetap terjaga di tengah-tengah arus globalisasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4.2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Sejarah Berdirinya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Awalnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) bergabung dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang bertempat di jalan Merdeka No. 64 Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia. Pada tanggal 11 Agustus Tahun 2016 Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti resmi menggelar Paripurna dan mengesahkan Ranperda Tentang pembentukan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Setelah itu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah memisahkan diri dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sekarang berubah nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Awal berdirinya Kantor BPPRD dikepalai oleh Bapak Bambang Supriyanti, SE. MM. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) ini pun akhirnya berpindah tempat di Jalan Banglas Depan Gedung Afifa, Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan, Meranti, Riau, Indonesia. Pada tanggal 31 Juli 2017 terjadi pergantian Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Bapak H. Herman, SE. MT. Tidak lama setelah itu Pada tanggal 5 Januari 2018 terjadi lagi pergantian pimpinan Yaitu Bapak Ery Suhairi, S.Sos dan pada 8 Januari 2020 terjadi lagi pergantian pempinan yaitu Bapak Mardiansyah S.STP, M.AP hingga sekarang . Badan ini mengurus Pendapatan Asli Daerah yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, Mengelola Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Atas Tanah dan Bangunan serta Mengelola Retribusi Darah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

a. Visi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

"Profesional dalam Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Utama Kabupaten Kepulauan Meranti".

b. Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

1. Meningkatkan pelayanan yang transparan
2. Meningkatkan sistem pengolah data dan pelayanan pajak dan retribusi yang terintegrasi, akurat berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan sumber daya aparatur yang handal dan berintegritas, berdedikasi, serta amanah.
4. Menumbuh kembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

c. Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Badan pengelola pajak dan retribusi daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pengelola pajak dan retribusi daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Badan pengelola pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;

d. Pembinaan teknis penyelenggara fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang pengelola pajak dan retribusi daerah; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Uraian Tugas

1. Bidang Sekretariat

Adapun tugas pokok sekretaris adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana kerja sekretariat;

b. Penyusunan rencana aksi (*action plan*) dan skedul waktu (*time schedule*) pelaksanaan pekerjaan sekretariat;

c. Penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan administrasi umum, kepegawaian, program, keuangan dan perlengkapan;

d. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sekretariat;

e. Melakukan koordinasi internal dan pengawasan internal secara periodik minimal sekali dalam satu bulan;

f. Melakukan konsilidasi program/kegiatan bidang;

g. Melakukan konsilidasi realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan bidang;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

h. Mengevaluasi hasil kerja ASN dilingkungan Badan sebagai bahan pembinaan;
i. Memberi petunjuk bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas para bawahan;
j. Mengkoordinasikan tugas bawahan dilingkup sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
k. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan dilingkup secretariat
l. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
m. Memeriksa pelaksanaan tugas lingkup sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
n. Mengatur pelaksanaan kegiatan bawahan berdasarkan prioritas penyelesaian tugas kesekretarisan agar sesai tepat pada waktunya;
o. Menilai konsep naskah dinas dari bawahan dan unit kerja lainnya dilingkungan Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;
p. Mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja dilingkungan Badan agar pelaksanaannya tertib;
q. Melaporkan pelasanaan tugas kesekretariat baik secara lisan, tertulis, berkala, maupun incidental pada pimpinan;
r. Membuat laporan program/kegiatan Badan sesuai dengan ketentuan;
s. Melaksanakan pengelolaan data elektronik dan bertanggung jawab atas penggunaan teknologi informasi pada badan pelayanan pajak dan retribusi daerah;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

t. Saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

u. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi beberapa Sub Bagian yaitu :

a. Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Program; dan

b. Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan

2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Adapun tugas pokok bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah sebagai berikut:

a. Pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;

b. Penyusunan draft rencana aksi dan skedul waktu bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;

c. Penyusunan draft Standar Operasional Prosedur (SOP) perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;

d. Penyusunan draft sistem dan prosedur perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, memantau pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan program kerja bidang, memeriksa konsep naskah dinas yang diajukan oleh bawahan untuk ditandatangani;

e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya dan upaya tindak lanjut;

f. Melaporkan pelaksanaan tugas Badan baik secara lisan, tertulis, berkala, maupun incidental kepada kepala Badan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

g. Memberi saran dan pertimbanagan kepada atasan yang menyangkut bidang tugas;
h. Pelaksanaan evaluasi kepada aparatur pelaksana pelayanan, pemungutan dan administrasi pelayanan pajak dan retribusi pajak;
i. Pelaksanaan verifikasi data ketetapan pajak dan retribusi daerah dan data realisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
j. Melakukan kajian perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah;
k. Menyusun metode intensifikasi dan ekstersifikasi pendapatan asli daerah;
l. Menyusun metode penetapan piutang pendapatan asli daerah;
m. Menyusun metode penagihan pendapatan asli daerah;
n. Melaksanakan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
o. Melakukan pemeriksaan lapangan / lokasi terhadap wajib pajak sebagai uji ketaatan terhadap peraturan perpajakan perlindungan pajak; dan
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah membawahi beberapa Sub Bagian yaitu:

a. Sub bidang perencanaan pendapatan daerah;
b. Sub bidang pengembangan pendapatan daerah; dan
c. Sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

Adapun tugas poko bidang pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana kerja bidang pajak dan retribusi daerah;
b. Penyusunan rencana aksi dan skedul waktu pelaksanaan pekerjaan bidang pajak dan retribusi daerah;
c. Penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pajak dan retribusi daerah;
d. Penyusunan kebijakan pajak dan retribusi daerah;
e. Penyusunan draft perda pajak dan retribusi daerah;
f. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan wajib pajak dan wajib retribusi;
g. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan program kerja bidang;
h. Memeriksa konsep naskah dinas yang diajukan oleh bawahan untuk ditandatangani;
i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya dan upaya tindak lanjut;
j. Melapor pelaksanaan tugas Badan baik secara lisan, tertulis dan berkala, maupun insidental kepada kepala Badan;
k. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan yang menyangkut bidang tugas;
l. Penyusunan Surat Edaran Kepala Daerah tentang kewajiban membayar Pajak dan Retribusi Daerah;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

m. Penyusunan pedoman teknis untuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan objek pajak dan retribusi;
n. Pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
o. Melakukan pendataan dan validasi data wajib pajak dan wajib retribusi;
p. Melakukan permutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi;
q. Menyampaikan telaahan staf dalam hal persetujuan atau penolakan atas permohonan pengurangan ketetapan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak;
r. Pembuatan dan pengumpulan daftar wajib pajak serta memberi kartu pengenal wajib pajak serta nomor wajib pajak daerah (NWPD) kepada wajib pajak yang akan menjadi identitas unit pada setiap transaksi;
s. Melakukan pendaftaran kepada para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
t. Menerbitkan surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
u. Mengoreksi dan menandatangani surat ketetapan pajak / retribusi daerah, Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) dan Surat Tagihan Pajak /Retribusi Daerah sesuai ketentuan;
v. Menghimpun dan membukukan seluruh surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah jenis tertentu dalam Buku Register SKPD/SKRD Tahunan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

w. Menerima dan menindaklanjuti surat keberatan atau permohonan keringanan dari wajib pajak atas penetapan dan penagihan perhitungan pajak;
x. Menyiapkan dan mengarsipkan surat yang berhubungan dengan penetapan;
y. Menyusun dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
z. Menyampaikan SKPD dan SKRD kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
aa. Melakukan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
bb. Menyiapkan dan mengarsipkan surat yang berhubungan dengan penagihan;
cc. Menghitung piutang pajak dan piutang retribusi berdasarkan nomor, nama, nilai dan alamat wajib pajak dan wajib retribusi; dan
dd. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pajak dan Retribusi Daerah membawahi beberapa sub Bidang yaitu:

a. Sub bidang pendaftaran dan pendataan;
b. Sub bidang penetapan; dan
c. Sub bidang penagihan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Bidang Pengelolaan PBB Dan BPHTB

Adapun tugas pokok bidang pegelolaan PBB dan BPHTB sebagai berikut:

a. Pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan PBB dan BPHTP;
b. Penyusunan draft rencana aksi dan skedul waktu pengelolaan PBB dan BPHTB;
c. Penyusunan draft sistem dan prosedur pengelolaan PBBdan BPHTB;
d. Penyusunan draft surat edaran kepala daerah tentang pembayaran pengelolaan PBB dan BPHTB;
e. Penyusunan draft sistem operasional prosedur (SOP) bidang pengelolaan PBB dan BPHTB;
f. Pemantau pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan program kerja bidang;
g. Pemeriksa konsep naskah dinas yang diajukan oleh bawahan untuk ditandatangani;
h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya dan upaya tindak lanjut;
i. Melaporkan pelaksanaan tugas badan baik secara lisan, tertulis, berkala, maupun insidental kepada kepala badan;
j. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan yang menyangkut bidang tugas;
k. Melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak PBB dan BPHTB;
l. Melakukan validasi data wajib pajak PBB P2;
m. Melakukan penilaian kembali data objek pajak PBB P2;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

n. Menyampaikan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak;

o. Melakukan penagihan PBB P2 kepada wajib pajak;

p. Menyiapkan dan mengarsipkan surat yang berhubungan dengan PBB dan BPHTB;

q. Memberikan penghargaan termasuk penerapan sanksi bagi para pelanggar pajak daerah;

r. Menyediakan pelayanan pembayaran PBB dan BPHTB; dan

s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTP membawahi sub bidang yaitu:

a. Sub bidang Pendataan dan Penilaian;

b. Sub bidang Pengolahan Data dan Informasi; dan

c. Sub bidang penagihan dan keberatan.

5. Jenis Kepegawaian

Adapun jenis kepegawaian yang bekerja di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu mereka yang telah melalui masa sebagai sementara dan telah memenuhi persyaratan pada kantor tersebut.

b. Pegawai Tidak Tetap (PTT).

c. Pegawai Honorer dan Pegawai Honorer Kontrak.

d. Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yaitu mereka yang diangkat berdasarkan kebutuhan kantor dan telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditetapkan pada kantor tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Problematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Pemerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah Negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut tidak terlepas oleh adanya pembangunan daerah. Sehingga untuk memperlancar pembangunan nasional diperlukan anggaran dari pemerintah negara yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah. Untuk itulah pemerintah terus berupaya menggali setiap potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah.

Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar untuk pendapatan negara. Pemerintah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengelola setiap pendapatan. Sumber penerimaan pajak merupakan salah satu sumber yang sangat mendukung pendapatan suatu Negara. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kesejahteraan rakyat diantaranya adalah pemungutan pajak terhadap wajib pajak. Pajak dipungut penguasa berdasarkan peraturanan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak merupakan salah satu modal untuk membiayai aktivitas pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Dalam bidang perpajakan, bangsa Indonesia mengalami perubahan besar atas sistem perpajakan. Reformasi pajak yang dilakukan adalah mengubah beberapa kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan dengan mengalihkan pajak pusat menjadi pajak Daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Djajadiningrat yang di kutip oleh Diaz Prantara (2016:4), pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang undangan yang berlaku termasuk Pajak Daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pajak daerah adalah iuran atau kontribusi wajib pajak yang di pungut oleh daerah berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah berlaku untuk Propinsi maupun Kabupaten/kota. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Adapun untuk Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir,Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Semakin besarnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berarti semakin sedikit ketergantungan Daerah terhadap bantuan pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah seperti : pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dari hasil penerimaan pajak burung sarang walet oleh pemerintah digunakan untuk membiayai keperluaan daerah, baik dari segi pembangunan, keamanan, ketertiban lingkungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan daerah itu sendiri. Supaya perkembangan daerah menjadi maju, dengan ini daerah harus memiliki keunggulan yang dapat dihandalkan.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelengaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat adalah dari Pajak Daerah. Pajak daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat di handalkan bagi daerah.

Pajak Sarang Burung Walet juga berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Mengingat banyak terdapatnya rumah sarang burung walet yang disediakan oleh pengusaha burung walet khususnya di Selatpanjang yang dalam hal ini memiliki potensi. Sarang Burung Walet bertujuan untuk menjaga dan melindungi kelestarian sarang burung walet baik dihabitat alami maupun dihabitat buatan dari bahaya kepunahan, serta untuk meningkatkan produksi dalam upaya pemanfaatan untuk kesejahteraan rakyat.

Sebelum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai kabupaten yang baru mekar, sebelumnya di bawah kekuasaan daerah Kabupaten Bengkalis. Pajak sarang burung wallet juga berperan dalam meningatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan diberlakukannya peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Masa pembayaran pajak sarang burung walet dilakukan 3 bulan sekali waktunya mulai masa panen sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10%(sepuluh persen) dari nilai pasaran sarang burung walet. Pemungutan pajak sarang burung walet dipungut langsung oleh petugasnya. Setelah pemekaran menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti, pajak sarang burung walet juga menjadi handalan Pemerintah Daerah memberikan kontribusinya untuk Meningkat Pendapatan Asli daerah (PAD)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengingat terdapat rumah-rumah pengusahaan Sarang burung walet oleh pengusaha yang di jadikan sebagai Wajib Pajak daerah.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai Problematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berikut diuraikan hasil penelitian dengan beberapa informan berdasarkan uraian indikator dibawah ini :

5.1.1. Komunikasi dan Sosialisasi Kebijakan Pajak Burung Walet

Komunikasi merupakan dimensi penting bagi administrator publik dalam mengimplementasikan kebijakan, khususnya untuk pencapaian efektivitas program melalui transmisi personil yang tepat, jelasnya perintah yang diinstruksikan oleh atasan dalam pelaksanaan dilapangan, dan kekonsistenan pelaksana keputusan atau program oleh semua pelaksana maupun atasan pemberi instruksi.

Komunikasi menurut Cook dan Hunsaker (2007) bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, berbagi informasi dan pemuas kebutuhan sosial. Dengan demikian komunikasi dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi apabila komunikasi dalam organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Komunikasi menurut Agustino (2006), merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Abdul Wahab (2005) dalam bukunya mengatakan pada prinsipnya komunikasi kebijakan merupakan suatu komunikasi yang terjadi di dalam tubuh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemerintahan, sehingga dapat diterjemahkan merupakan suatu penyampaian pesan, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara.

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang mejadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu:

a. Penyaluran (transmisi)

Penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula (kejelasan). Administrator publik harus sudah paham, mengerti dengan jelas keputusannya dan kesiapan menjalankan perintah yang telah diputuskan dalam setiap kebijakan atau program yang akan dilaksanakan, yang tidak akan terlepas dari hambatan dalam menstramisikan perintah tersebut. Transmisi, Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebagiankan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk lebih jelas lagi mengenai Problematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada Indikator Komunikasi, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

Apakah petugas pelaksana selalu memberikan informasi mengenai waktu dan proses pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung wallet? Jika ada dalam bentuk apa?

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti bapak Saryono pada Senin 10 Mei 2021, yang menyatakan bahwa :

> *"Selama ini proses pemungutan pajak sarang burung wallet sudah cukup baik, pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan ketika ada hasil penjualan, petugas juga selalu memberikan informasi mengenai pemungutan ajak walet".*

Berdasarkan tanggapan dari bapak Saryono menyatakan bahwa petugas pelaksana pemungutan pajak sarang burung wallet selalu memberikan informasi mengenai waktu pemungutan pajak burung wallet dan sampai saat ini bapak Saryono selalu patuh untuk membayar pajak sarang burung yang dilakukan setiap bulannya jika memperoleh hasil dari penjualan. Selanjutnya tanggapan dari bapak Safri, menyatakan :

> *"Biasanya petugas pemungutan pajak burung wallet selalu datang untuk memberikan SPT kepada wajib pajak berdasarkan data panen sebelumnya. Proses pemungutan pajak berdasarkan waktu panen dan petugas pajak datang dan kemudian mengisi SPTPD. Waktu pemungutan pajak sarang burung wallet dilakukan rata – rata 3 bulan sekali tergantung masa panennya"*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan tanggapan bapak Safri diketahui bahwa petugas pemungutan pajak selalu mendatangi wajib pajak setiap 3 bulan sekali untuk memungut pajak sarang burung walet. Sedangkan hasil Bapak Joni menyatakan bahwa :

> *"Proses pemungutan pajak dilakukan oleh karyawan BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, proses pemungutan pajak tidak tetap tergantung ada atau tidaknya penghasilan sarang burung wallet setiap bulannya. Petugas langsung mendatangi ketempat dan menginformasikan kapan waktu pelaksanaan pemungutan pajak pada bulan selanjutnya. Mengenai konsisten berkomunikasi saya rasa tidak terlalu konsisten, kami berkomunikasi diwaktu pemungutan pajak saja".*

Tanggapan bapak Joni menyatakan bahwa waktu pemungutan pajak burung wallet tidak tetap setiap bulannya tergantung penghasilan wallet setiap bulannya. Bapak Joni menyatakan bahwa dirinya tidak konsisten untuk berkomunikasi dengan petugas pelaksana pemungutan pajak sarang burung, dan hanya berkomunikasi sewaku proses pemungutan pajak sarang burung wallet saja. Selanjutnya Ibu Siti selaku pemilik usaha burung wallet juga menyatakan bahwa :

> *"Petugas pelaksana konsisten berkomunikasi dengan wajib pajak sewaktu proses pemungutan pajak, sebelum turun kelapangan petugas selalu memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai waktu pemungutan dan membagikan SPTPD, proses pemungutan dilaksanakan rata – rata 3 bulan sekali namun pembayaran pajak sarang burung wallet dilakukan setelah panen hasil walet".*

Berdasarkan tanggapan ibu Siti menyatakan bahwa petugas pelaksana konsisten dalam memungut pajak yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Tanggapan bapak Efendi mengenai proses pemungutan pajak burung walet menyatakan bahwa:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"Sejauh ini petugas selalu menjaga komunikasi yang baik dengan kami sebagai wajib pajak dan juga proses pemungutan pajak dilakukan setiap 3 bulan sekali"

Berdasarkan tanggapan dari wajib pajak sarang burung wallet diketahui petugas pelaksana pemungutan pajak sarang burung wallet selalu memberikan informasi kepada wajib pajak dengan cara mendatangi sarang burung wallet setiap bulannya dan menginformasikan kapan waktu pemungutan pajak burung wallet. Rata – rata masa waktu pemungutan pajak burung wallet dilakukan setiap 3 bulan sekali dan itu tergantung dari hasil penjualan burung wallet tersebut.

b. *Clarity* (Kejelasan)

Adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan yang akan diimplementasikan oleh para implementor harus jelas maksud dan tujuannya melalui petunjuk pelaksana maupun petunjuk teknis yang seksama dan dipahami secara mendalam. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Berikut ini hasil wawancara dengan staff BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai kejelasan dalam problematika pemungutan pajak sarang burung wallet. Berikut hasil wawancara dengan Gilang Wana Wijaya Cendikia, S.STP dilakukan pada tanggal 11 Mei 2021 mengenai Indikator Komunikasi, menyatakan :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Apakah bapak/ibu selalu memberikan informasi apabila ada kebijakan mengenai waktu pemungutan pajak kepada wajib pajak sarang burung wallet di Kabupaten Kepulauan Meranti?

> *"Saya sering memberikan informasi kepada wajib pajak melalui surat pemberitahuan dan sosialisasi yang dilakukan kepada wajib pajak serta mendatangi tempat – tempat sarang burung wallet dan memberikan SPTPD serta menginformasikan kapan waktu pemungutan pajak sarang burung walet".*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Gilang diketahui pihakya selaku pemungut pajak selalu memberikan informasi kepada wajib pajak baik itu melalui surat pemberitahuan, sosialisasi atau berkunjung langsung ketempat penakaran sarang burung wallet tersebut. Tanggapan tersebut dibernarkan oleh bapak Zulkifli, SE yang juga menyatakan :

> *"Kami dari petugas pemungutan pajak selalu memberikan sosialisasi kepada wajib pajak apabila ada peraturan terbaru tentang pemungutan pajak burung wallet, dan juga selalu memberikan informasi kepada wajib pajak berdasarkan data sebelumnya yaitu dengan mengisi SPTPD. Pemungutan pajak burung wallet dilakukan rata – rata 3 bulan sekali tergantung masa panen dan berdasarkan data sebelumnya"*

Dari hasil wawancara diketahui pegawai BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti selalu memberikan informasi berupa kebijakan terbaru atau himbauan kepada wajib pajak dalam bentuk surat pemberitahuan, surat edaran, sosialisasi dan sebagainya, bahkan ada juga yang turun langsung ketempat sarang burung wallet dan memberikan SPTPD langsung kepada wajib pajak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. *Consistency* (Konsisten),

Adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah – ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan. Efektifitas pelaksanaan kebijakan akan berjalan jika tujuan yang jelas dapat dilaksanakan secara konsisten oleh para pelaksana dilapangan dengan didasari kekonsistenan para pengambil kebijakan dalam memprediksi probabilitas – probabilitas pada saat implementasi. Inkonsistensi implementor dalam mengimplementasikan kebijakan dari tingkat atas sampai pelaksana di lapangan sangat dimungkinkan terjadinya distorsi dalam pencapaian program.

Berikut ini tanggapan sekretaris BPPRD mengenai indikator komunikasi dalam pemungutan pajak sarang burung wallet pada tanggal 12 Mei 2021 menyatakan bahwa :

> *"Kami melalui staf yang bertugas selalu memberikan informasi kepada wajib pajak apabila ada perubahan kebijakan terkait pembayaran pajak bahkan petugas jua langsung mendatangi tempat penangkaran dan menghitung besarnya hasil panen. Pajak sarang burung wallet merupakan salah satu sumber pemasukan penerimaan daerah yang lumayan besar".*

Berdasarkan tanggapan sekretaris BPPRD membenarkan bahwa pihaknya selalu memberikan informasi kepada wajib pajak terutama apabila ada perubahan kebijakan mengenai pembayaran pajak bahkan tidak jarang petugas langsung menghampiri wajib pajak ke tempat penangkaran sarang burung wallet tersebut. Tanggapan Sekretaris BPPRD diperkuat dengan pernyataan Kepala BPPRD mengenai Konsistensi pada tanggal 12 Mei 2021 mengenai indikator komunikasi yaitu sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *"Ya, pajak sarang burung wallet merupakan salah satu potensi yang besar dalam meningkatkan penerimaan daerah apabila digali secara benar, yang mana setiap tahunnya bisa mencapai target dan bahkan melebihi target yang ditetapkan. Proses pemungutan pajak sarang burung wallet yaitu berdasarkan hasil panen, biasanya dilakukan 3 bulan sekali dan para petugas mendatangi pengusaha karena di Kabupaten Kepulauan Meranti para pengusaha enggan mendatangi kantor BPPRD untuk melaporkan pajaknya sehingga khusus untuk pajak sarang burung wallet kita gunakan prinsip jemput bola. Mengenai informasi mengenai pemungutan pajak sarang burung wallet pihak kami selalu memberikan informasi dalam waktu sudah ditentukan petugas lapangan dengan menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah kepada wajib pajak".*

Berdasarkan hasil tanggapan kepala BPPRD diketahui bahwa pajak sarang burung wallet merupakan salah satu potensi yang besar dalam meningkatkan penerimaan daerah apabila digali secara benar, yang mana setiap tahunnya bisa mencapai target dan bahkan melebihi target yang ditetapkan. Proses pemungutan pajak sarang burung wallet yaitu berdasarkan hasil panen, biasanya dilakukan 3 bulan sekali dan para petugas mendatangi pengusaha karena di Kabupaten Kepulauan Meranti para pengusaha enggan mendatangi kantor BPPRD untuk melaporkan pajaknya sehingga khusus untuk pajak sarang burung wallet kita gunakan prinsip jemput bola. Mengenai informasi mengenai pemungutan pajak sarang burung wallet pihak kami selalu memberikan informasi dalam waktu sudah ditentukan petugas lapangan dengan menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah kepada wajib pajak.

Dari hasil tanggapan informan maka dapat disimpulkan bahwa indikator Komunikasi dalam Problematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti sudah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

baik namun tetap perlu dilakukan perbaikan dengan cara melakukan sosialisasi secara berkesinambungan agar informasi yang disampaikan tepat sasaran. Mengenai pemberian informasi dan komunikasi sudah dilakukan dengan baik oleh pihak BPPRD selaku petugas pemungutan pajak dan waktu pemungutan pajak rata – rata 3 bulan sekali tergantung hasil penjualan dari sarang burung wallet tersebut dan berdasarkan data sebelumnya.

Setiap pengusaha sarang burung wallet wajib menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak sarang burung wallet yang terhutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak sarang burung walet pada dasarnya merupakan sistem *Self assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas dinas pendapatan daerah, yang menjadi fiskus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

5.1.2. Sumber Daya Pelaksana Kebijakan Pemungutan Pajak Burung Walet

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan da nisi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya financial.

Sebagaimana dijelaskan Van Meter dan Van Hord dalam (Subarsono, 2005) mengenai sumber daya yaitu dalam implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non human resources*). Sedangkan Edward III sendiri menjelaskan sumber daya dalam Sugianto (2008:38-45) merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan itu dirumuskan tanpa ada dukungan sumberdaya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Tanpa sumber daya yang memadai pula suatu implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Adapun sumber daya yang dimaksud adalah jumlah orang atau staff sebagai pelaksana yang mempunyai kealian yang memadai, informasi, dan fasilitas – fasilitas yang mendukung lainnya.

Sumberdaya utama dalam mengimplementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan (*kompeten dan kapabel*) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksankan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Wewenang (*authority*),

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya. Kewenangan dalam mengimplementasikan kebijakan atau program akan berbeda satu sama lainnya, hal ini tergantung pada deskripsi jabatannya (*job description*), yaitu melalui :

a. Metode control: persuasive dan ancaman
b. Ketaatan terhadap aturan yang ada

Wewenang, pada umunya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksankan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kewenangan diperlukan dalam peleksanaan implementasi kebijakan, tetapi di sisi lain, efektifitas dan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelakasan demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

2. Fasilitas – fasilitas (*facilities*),

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan : *Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed.*

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksankan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasiliats pendukung (saran dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Sebagai daya dukung dalam implementasi kebijakan yang meliputi tersedianya bangunan – bangunan *(buildings*), perlengkapan, (*equipment*), dan perbekalan (*supplies*).

Untuk lebih jelas lagi mengenai Problematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Meranti pada Indikator Sumber Daya, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Apakah bapak/ibu mengetahui kebijakan yang mengatur proses pemungutan pajak sarang burung wallet di Kabupaten Kepulauan Meranti?

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti bapak Saryono pada senin 10 Mei 2021, yang menyatakan bahwa :

> *"Sedikit mengetahui mengenai kebijakan mengenai sarang burung wallet yang disampaikan melalui sosialisasi oleh petugas".*

Berdasarkan tanggapan Bapak Saryono diketahui bahwa beliau belum begitu memahami mengenai kebijakan tentang sarang burung wallet yang disampaikan petugas. Selanjutnya tanggapan dari bapak Safri, menyatakan :

> *"Sepengetahuan saya proses pembayaran pajak sarang burung wallet berdasarkan peraturan daerah dan peraturan bupati"*

Sedangkan bapak Safri menyatakan bahwa kebijakan yang mengatur tentang proses pembayaran pajak sarang burung wallet itu ditetapkan oleh peraturan dan peraturan Bupati. Tanggapan bapak Safri di perkuat oleh pernyataan bapak Joni yaitu menyatakan bahwa :

> *"Kebijakan mengenai sarang burung wallet diatur oleh perda dan perbub di Kabupaten Kepulauan Meranti".*

Bapak Joni juga menyatakan bahwa kebijakan yang mengatur mengenai sarang burung Walet sudah diatur di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Selanjutnya Ibu Siti selaku pemilik usaha burung wallet juga menyatakan bahwa :

> *"Ya, saya mengetahui sedikit mengenai kebijakan yang mengatur proses pemungutan sarang burung wallet ini".*

Tanggapan bu Siti diketahui beliau tidak begitu memahami mengenai kebijakan – kebijakan yang mengatur proses pemungutan sarang burung wallet dan namun pihaknya berkomitmen untuk selalu taat terhadap peraturan pemerintah dengan selalu membayarkan pajak sarang burung wallet tepat waktu. Selanjutnya Tanggapan bapak Efendi mengenai proses pemungutan pajak burung walet menyatakan bahwa:

> *"Saya mengetahui sedikit kebijakan umum terkait pajak sarang burung walet"*

Berdasarkan hasil tanggapan informan wajib pajak mengenai pengetahuan tentang kebijakan wajib pajak diketahui bahwa sebagian besar wajib pajak kurang mengetahui mengenai kebijakan yang ditetapkan dalam pemungutan pajak sarang burung wallet di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan tanggapan dari petugas pelaksana pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

Berikut ini hasil wawancara dengan staff BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai sumberdaya dalam problematika pemungutan pajak sarang burung wallet. Berikut hasil wawancara dengan Gilang Wana Wijaya Cendikia, S.STP dilakukan pada tanggal 11 Mei 2021 mengenai Indikator Sumber Daya, menyatakan :

Apakah pegawai dalam pemungutan pajak sarang burung wallet sudah terpenuhi dari segi kualitas dan kuantitasnya, apakah ada kebijakan yang mengatur

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengenai pemungutan pajak sarang burung wallet dan apakah petugas diberikan kewenangan khusus dalam pemungutan pajak sarang burung walet?

> *"Mengenai petugas pelaksana sudah memenuhi dari segi kuantitasnya, namun dari segi kualitas masih perlu peningkatan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan, tentu ada kebiijakan yang melatar belakangi dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, karena kita berpedoman pada kebijakan tersebut. Mengenai kewenangan khusus tidak ada, setiap pegawai bertugas sesuai dengan tupoksinya masing - masing".*

Berdasarkan tanggapan Bapak Gilang diketahui bahwa petugas yang bertugas sebagai pelaksana pemungutan pajak sarang burung wallet sudah memenuhi dari segi jumlah pegawai, namun dari segi kualitas pegawai masih perlu peningkatan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya bapak Zulkifli, SE. juga menyatakan :

> *"Menurut saya dari segi jumlah pegawai, kita masih memerlukan penambahan jumlah pegawai, dikarenakan pegawai yang ada jumlahnya sedikit sedangkan letak wilayahnya relative jauh dan antar pulau. Kebijakan berdasarkan peraturan daerah dan peraturan bupati. Tidak ada kewenangan khusus, semuanya berdasarkan instruksi dan tupoksi masing - masing"*

Dari hasil wawancara diketahui pegawai BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti tidak ada kewenangan khusus yang diberikan kepada petugas pemungutan pajak sarang burung wallet, hal itu sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing. Mengenai jumlah pegawai masih memerlukan penambahan, hal ini dikarenakan pegawai yang bertugas untuk memungut pajak secara langsung dilapangan masih sedikit sedangkan letak wilayah dikabupaten Kepulauan Meranti cukup berjauhan dan terbagi dalam pulau – pulau sehingga sedikit sulit untuk dijangkau dan memerlukan waktu yang lama.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berikut ini tanggapan sekretaris BPPRD mengenai indikator sumberdaya dalam pemungutan pajak sarang burung wallet pada tanggal 12 Mei 2021 menyatakan bahwa :

> *"Mengenai jumlah staf yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kami masih memerlukan penambahan jumlah staf mengingat jarak tempuh yang terdiri dari pulau – pulau. Secara aturan pemungutan pajak berdasarkan peraturan daerah dan peraturan bupati. Dan dari segi fasilitas masih belum terpenuhi yaitu kendaraan bermotor".*

Tanggapan Sekretaris BPPRD diketahui bahwa jumlah staf yang bertugas dalam pemungutan pajak sarang burung wallet masih kurang dan masih memerlukan penambahan jumlah staf dikarenakan mengingat jarak tempuh yang terdiri dari pulau – pulau dan juga mengenai fasilitas yang digunakan juga perlu di tambahkan lagi karna kondisi kendaraan bermotor yang digunakan saat ini jumlahnya 2 buah sepeda motor, sedangkan tempat yang akan dituju sangat banyak sehingga petugas menggunakan kendaraan pribadi dalam memungut pajak sarang burung wallet. Hal tersebut dibenarkan dengan pernyataan Kepala BPPRD pada tanggal 12 Mei 2021 mengenai indikator sumber daya yaitu sebagai berikut :

> "*Untuk saat ini masih minim nya para petugas lapangan, mengingat kondisi lapangan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari 4 Pulau, sedangkan fasilitas berupa kendaraan bermotor sangat terbatas, sehingga memperlambat kinerja kami di BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti ini. Petugas pemungutan pajak sarang burung wallet tidak hanya mengambil dari wajib pajak burung wallet namun juga mengambil pajak dari tempat karantina burung wallet, namun sampai saat ini balai karantina burung wallet belum bisa diajak bekerjasama dengan baik dengan pihak BPPRD sehingga kebanyakan data yang dilaporkan kepada BPPRD bukan data yang sebenarnya.".*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan tanggapan dari Kepala BPPRD diketahui bahwa BPPRD masih memerlukan penambahan jumlah staf dikarenakan jumlah staf yang ada masih sedikit sedangkan jarak yang akan ditempuh relative jauh dan melewati antar pulau dan juga mengenai fasilitas dan sarana penunjang kerja masih belum terpenuhi seperti kendaraan bermotor masih sedikit dan memperlambat kinerja pegawai di BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kepala BPPRD juga menyatakan bahwa selain memungut pajak di wajib pajak, pihaknya juga memungut pajak di Balai Karantina Burung Walet yang akan di Ekspor ke luar negeri. Namun sampai saat ini pihaknya belum dapat bekerjasma dengan baik dengan balai karantina. Berikut ini tanggapan Petugas Balai Karantina Bapak Agus mengenai indikator sumber daya dalam pemungutan pajak sarang burung wallet pada tanggal 23 Mei 2021 menyatakan bahwa :

> *"Sebelum wallet diekspor ke china terlebih dahulu diadakan karantina guna mencegah hama dari hewan dan penyakit hewan. Kebijakan yang mengatur karantina yaitu UU Nomor 21 Tahun 2019. Tentang Karantina hewan, ikan dan tumbuhan, peraturan Mentri Pertanian No.41 /Permentan / OT.140/3/2013 tentang tindakan karantina hewan terhadap pemasukan atau pengeluaran sarang walet ke dan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia".*

Tanggapan Bapak Agus yang menyatakan bahwa sebelum wallet diekspor ke china terlebih dahulu diadakan karantina guna mencegah hama dari hewan dan penyakit hewan. Kebijakan yang mengatur karantina yaitu UU Nomor 21 Tahun 2019. Tentang Karantina hewan, ikan dan tumbuhan, peraturan Mentri Pertanian No.41 /Permentan / OT.140/3/2013 tentang tindakan karantina hewan terhadap pemasukan atau pengeluaran sarang walet ke dan dari dalam wilayah Negara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Republik Indonesia, hal ini di Perkuat dengan tanggapan Bapak Cahyadi Petugas Karantina Hewan di Selat panjang mengenai indikator sumberdaya yaitu sebagai berikut :

> *"Tujuan dilakukannya karantina hewan adalah untuk mencegah keluar masuknya hama dan penyakit hewan karantina. Kebijakan yang mengatur tentang Karantina hewan adalah UU Nomor 21 Tahun 2019 Tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Pihak karantina tidak mewajibkan terhadap pengusaha untuk melunasi pajak Dearah nya, karena karantina punya aturan / Undang – undang sendiri. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 35 Tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementrian pertanian".*

Berdasarkan hasil tanggapan pihak karantina hewan diketahui bahwa burung wallet yang akan dijual keluar negeri terlebih dahulu harus dikarantina di Balai Karantina wilker Selat Panjang.

Sarang burung walet merupakan salah satu produk hasil hewan Indonesia yang dapat diekspor. Volume produksi sarang burung walet terbesar berasal dari burung walet spesies *Collocalia fuciphaga*. Indonesia merupakan salah satu produsen sarang burung walet dan ekspornya sudah berlangsung sejak lama ke berbagai negara di dunia. Dalam rangka ekspor sarang burung walet dari Indonesia secara langsung ke RRC, diawali dengan penandatanganan Protokol tentang Persyaratan Higenitas, Karantina dan Pemeriksaan untuk Importasi Produk Sarang Burung Walet dari Indonesia ke China, antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Administrasi Umum Pengawasan Mutu, Inspeksi dan Karantina Republik Rakyat China di Beijing pada tanggal 24 April tahun 2012. Protokol tersebut memuat persyaratan yang diajukan oleh RRC, diantaranya adalah penjaminan kesehatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sarang burung walet yang bebas dari penyakit Avian Influenza maupun bahaya biologi, kimia dan fisik, melalui rantai ekspor yang dapat ditelusuri.

Karantina hewan sebagai salah satu institusi yang menjadi bagian dari sistem kesehatan hewan nasional, mempunyai kewajiban dalam mendukung akselerasi ekspor sarang burung walet ke berbagai Negara mitra dagang, dengan menjamin kesehatan produk hewan sarang burung walet yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia bebas dari Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), bebas dari kontaminasi lainnya sebagai bahan makanan yang aman dikonsumsi untuk manusia. Jika terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan jaminan keamanan pangan maka penelusuran sarang burung walet dapat dicapai dengan menggunakan sistem ketelusuran (*traceability)* berupa barcode EAN-128. Sistem ini diterapkan pada seluruh mata rantai pengeluaran sarang burung walet yang dimulai dengan penetapan dan pemberian Nomor Registrasi Rumah Walet, Tempat Pemrosesan sebagai Instalasi Karantina Produk Hewan (IKPH), proses produksi dan pengemasan sarang walet hingga siap dikirim ke tempat tujuan ekspor.

Berdasarkan hasil tanggapan informan diketahui bahwa dari segi sumberdaya masih banyak kekurangan terutama untuk staf atau petugas penagih pajak, yang bukan hanya untuk menagih pajak sarang burung walet saja tetapi termasuk pajak yang lainnya dan mengingat daerah yang berpulau sehingga sangat sulit untuk dijangkau, selain jumlahnya yang kurang bila dilihay dari segi tingkat pendidikannya juga sangat minim sekali, dan tidak ada basic atau disiplin ilmu tentang perpajakan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berikut ini diuraikan jumlah staf penagih pajak di BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti :

Tabel V.4 Petugas Penagih Pajak di BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti

No	TINGKAT PENDIDIKAN	STATUS		KETERANGAN
		ASN	NON ASN	
1	SMA Derajat	2 Orang	3 Orang	
2	D3	-	3 Orang	
3	Strata1	1 Orang	1 Orang	
Jumlah		**3 Orang**	**7 Orang**	

Sumber : BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan tabel diatas, diketahui jumlah petugas penagih pajak di BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 10 orang dan 7 diantaranya merupakan staf non ASN yang bertugas di BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

5.1.3. Sikap Pelaksana Kebijakan Pemungutan Pajak Burung Walet

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2005) menyebutkan disposisi mencakup norma – norma, dan hubungan yang terjadi di dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kongnisi yaitu pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Sedangkan Edward III (Sugianto, 2008:38-45) sendiri menjelaskan mengenai disposisi yaitu kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan juga sebagai motivasi psikologi para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan. Adapun yang menjadi unsur dalam motivasi tersebut adalah adanya pemahaman dan pengetahuan, adanya arah respon dari pelaksana terhadap implementasi kebijakan, dan intensitas dari respon itu sendiri.

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijkan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus bagi pada kepentingan warga.

1. Birokrasi staf, yaitu terjadinya pengangkatan birokrat.

Melakukan pengaturan birokrasi (*Staffing the bureaucracy*), implementasi kebijakan harus dilihat dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penunujukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi sesuai dengan kempuan, kapabilitas dan kompetensinya. Selain itu pengatur birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode bypassing personil.

2. Manipulasi insentif – insentif.

Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan manipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

Kecenderungan – kecenderungan dalam implementasi kebijakan menekankan bagaimana kesulitan suatu implementasi kebijakan atau program mendapatkan permasalahan yang dilakukan oleh para implementator birokrasi pemerintah sendiri dalam mengimplementasikan kebijakan dengan adanya penafsiran kebijakan dan unit atas sampai unit pelaksana.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Problematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada Indikator Disposisi, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Apakah bapak/ibu selalu membayar pajak tepat waktu dan berapa jumlah pajak yang harus dibayar serta bagaimana proses perhitungan dalam pembayaran pajak sarang burung walet?

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti bapak Saryono pada Senin 10 Mei 2021, yang menyatakan bahwa :

> *"Tentu saja, karena petugas datang untuk memungut pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Nominal jumlah pajak kadang tidak tetap karna berdasarkan hasil panen. Kalau besar hasil panennya, besar pula yang harus dikeluarkan begitu pula sebaliknya".*

Berdasarkan tanggapan Bapak Saryono menyatakan bahwa pihaknya selalu membayarkan pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dikarenakan petugas datang untuk memungut pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Nominal jumlah pajak kadang tidak tetap karna berdasarkan hasil panen. Kalau besar hasil panennya, besar pula yang harus dikeluarkan begitu pula sebaliknya Selanjutnya tanggapan dari bapak Safri, menyatakan :

> *"Ya, mengikuti aturan yang ada, dan nominalnya tergantung berdasarkan besar kecil hasil panen"*

Tanggapan bapak Safri bahwa beliau selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan mengenai sarang burung wallet namun jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan hasil penjualan sarang burung wallet tersebut, hal ini di perkuat oleh pernyataan bapak Joni yaitu menyatakan bahwa :

> *"Tentu saja, kita membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, namun nominalnya kami tidak mengetahui pasti berapa nominal setiap pembayaran karena setiap bulan berbeda pajaknya tergantung penghasilan waletnya".*

Bapak Joni juga membenarkan bahwa pihaknya selalu membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, namun nominalnya kami tidak mengetahui pasti

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berapa nominal setiap pembayaran karena setiap bulan berbeda pajaknya tergantung penghasilan waletnya, sedangkan Ibu Siti selaku pemilik usaha burung wallet juga menyatakan bahwa :

> *"Pembayaran pajak saya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, pajak yang saya bayar sebesar 7,5% dari hasil penjualan saya setiap bulannya".*

Tanggapan Bu Siti diketahui Pembayaran pajak saya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, pajak yang saya bayar sebesar 7,5% dari hasil penjualan saya setiap bulannya. Selanjutnya Tanggapan bapak Efendi mengenai proses pemungutan pajak burung walet menyatakan bahwa:

"Saya selalu membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dan nominal yang dikeluarkan sekitar 7,5% dari hasil penjualan sarang burung walet"

Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak pengusaha burung wallet diketahui wajib pajak selalu membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Mengenai nominal jumlah yang dibayar itu tidak ditetapkan jumlahnya namun tergantung dari hasil penjualan wallet setiap bulannya, apabila hasil panen besar maka besar pula pajak yang akan dikeluarkan begitu juga sebaliknya. Menurut informan jumlah pajak yang dikeluarkan sebesar 7,5% dari hasil penjualan.

Berikut ini hasil wawancara dengan staff BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai pelaksanaan dalam problematika pemungutan pajak sarang burung wallet. Berikut hasil wawancara dengan Gilang Wana Wijaya Cendikia, S.STP dilakukan pada tanggal 11 Mei 2021 mengenai Indikator Disposisi, menyatakan :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Apakah wajib pajak selalu membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan? Dan bagaimanakah respon dari wajib pajak dalam proses pemungutan pajak sarang burung wallet di Kabupaten Kepulauan Meranti?

> *"Sebagian besar wajib pajak sudah membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan juga wajib pajak selalu koperatif dalam mengikuti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah".*

Berdasarkan tanggapan dari Bapak Gilang menyatakan bahwa sebagian besar wajib pajak sudah membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan juga wajib pajak selalu koperatif dalam mengikuti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Sedangkan menurut bapak Zulkifli, SE. juga menyatakan :

> *"Wajib pajak kurang merespon terhadap kewajibannya dalam melaporkan pajak hasil waletnya dan waktu pembayaran juga tidak tetap karena tergantung hasil panen dan tidak bisa hanya berpedoman pada data sebelumnya"*

Dari hasil wawancara diketahui pegawai BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan bahwa wajib pajak kurang respon terhadap kewajibannya dalam melaporkan pajak hasil waletnya, wajib pajak tidak mau datang langsung ke kantor untuk melaporkan hasil pajaknya sehigga petugas yang harus diturunkan untuk memungut pajak kepada wajib pajak.

Berikut ini tanggapan sekretaris BPPRD mengenai indikator disposisi dalam pemungutan pajak sarang burung wallet pada tanggal 12 Mei 2021 menyatakan bahwa :

> *"Wajib pajak tidak selalu ontime dalam membayar pajak, karena tergantung hasil panennya. Mengenai respon wajib pajak sangat kurang sekali dalam melaporkan hasil panen dari penangkapan sarang burung wallet, sehingga harus petugas yang mendatangi kelokasi".*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggapan Bapak Sekretaris BPPRD menyatakan bahwa Wajib pajak tidak selalu ontime dalam membayar pajak, karena tergantung hasil panennya. Mengenai respon wajib pajak sangat kurang sekali dalam melaporkan hasil panen dari penangkapan sarang burung wallet, sehingga harus petugas yang mendatangi kelokasi. Tanggapan Sekretaris BPPRD diperkuat dengan pernyataan Kepala BPPRD mengenai Konsistensi pada tanggal 12 Mei 2021 mengenai indikator komunikasi yaitu sebagai berikut :

> *"Untuk saat ini respon wajib pajak sangat kurang sekali oleh karena itu para petugas mendatangi langsung ke tempat, mengenai pembayaran tepat waktu bisa dikatakan belum, dikarenakan pembayaran pajak sesuai dengan hasil panen, kalau sudah panen baru dibayar pajaknya".*

Berdasarkan tanggapan dari Kepala dan Sekretaris BPPRD diketahui bahwa dalam pemungutan pajak tidak selalu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, namun tergantung hasil panennya. Sedangkan mengenai respon wajib pajak sangat kurang sekali dalam melaporkan hasil panen dari penangkapan sarang burung wallet sehinggaharus petugas yang mendatangi ke lokasi penangkaran sarang burung wallet tersebut.

Penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh Bupati, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD. Wajib pajak terutang tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Pajak sarang burung wallet terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pajak yang terutang dalam Perda No.08 tahun 2002 adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Misalnya selambat-lambatnya perpajakan daerah, 15 bulan berikutnya dari masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak sarang burung wallet diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, maka pajak sarang burung walet harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tahun diterbitkan.

Pembayaran pajak sarang burung walet yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah sesuai waktu yang ditentukan. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh kepala daerah.

Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Angsuran pembayaran pajak sarang burung walet harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

5.1.4. Struktur Birokrasi dalam Pemungutan Pajak Burung Walet

Struktur birokrasi adalah karateristik norma – norma dan pola – pola hubungan yang terjadi berulang – ulang dalam badan – badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam menjalankan kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standar Operating Procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Van Meter dan Van Horn (Subarsono 2005) menjelaskan mengenai struktur birokrasi yang merupakan perlunya dukungan, koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam melaksanakan program implementasi demi mencapai keberhasilan program kegiatan tersebut. Sedangkan Edward III (Sugianto, 2008:38-45) menjelaskan struktur birokrasi adalah struktur kelembagaan pelaksanaan program. Ada dua unsur dalam hal ini, yaitu prosedur rutin sebagai standar prosedur operasi dan fragmentasi (pemecahan/ pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan).

Birokasi mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan walaupun merupakan organisasi yang besar dan kompleks, organisasi yang dominan dan mampu untuk melaksanakan setiap kebijakan atau program, serta tidak ada organisasi sekuat birokrasi yang mampu bertahan dalam keadaan situasi apapun (*survive*) bagaimanapun pengaruh eksternal mempengaruhinya, bahkan Edwards III mengaskan birokrasi jarang mati.

Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan – kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis – garis antara berbagai posisi – posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan. Walaupun sumber – sumber untuk melaksanakan untuk kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih baik adalah :

1. Membuat *standar operating prosedur* (sop) yang lebih fleksible.

SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinakan para pegawai (atau pelaksna kebijakan/birkrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegitannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). *Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa : demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tangggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebjakan.

2. Melakukan fragmentasi,

Untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun, berdasakan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa: SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan.

Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi” Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif”.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Problematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada Indikator Struktur Birokrasi, maka dapat dilihat dari hasil tanggapan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kepala BPPRD pada tanggal 12 Mei 2021 mengenai indikator struktur birokrasi yaitu Bagaimanakah system pembagian kerja dalam proses pemungutan pajak di Kabupaten Kepulauan Meranti dan adakah SOP yang menjadi acuan dalam proses pemungutan pajak di Kabupaten Kepulauan Meranti?

Berikut ini tanggapan sekretaris BPPRD mengenai indikator struktur birokrasi dalam pemungutan pajak sarang burung wallet pada tanggal 12 Mei 2021 menyatakan bahwa :

> *"Sistem pembagian kerja sudah diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah, jadi masing – masing ASN yang ada di BPPRD sudah mengetahui dengan pasti yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan, mengenai SOP pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung wallet sudah ada dan selain itu juga berpedoman kepada peraturan / kebijakan terkait pemungutan pajak".*

Berdasarkan tanggapan Sekretaris BPPRD menyatakan bahwa sistem pembagian kerja sudah diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah, jadi masing – masing ASN yang ada di BPPRD sudah mengetahui dengan pasti yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan, mengenai SOP pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung wallet sudah ada dan selain itu juga berpedoman kepada peraturan / kebijakan terkait pemungutan pajak diperkuat dengan pernyataan Kepala BPPRD mengenai Konsistensi pada tanggal 12 Mei 2021 mengenai indikator struktur birokrasi yaitu sebagai berikut :

> *"Mengenai SOP kita sudah ada, juga ditambah dengan kebijakan – kebijakan lain mengenai pemungutan pajak sarang burung wallet dan itu kita jadikan pedoman dalam menjalankan tugas".*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan tanggapan informan diketahui pada indikator Struktur Birokasi adalah belum dapat dikatakan baik karena belum adanya SOP yang secara khusus dapat dijadikan acuan / pedoman dalam proses pemungutan pajak sarang burung wallet serta juga mengacu pada kebijakan atau aturan yang terkait. Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah ada tapi masih bersifat umum untuk semua jenis pajak yang ada di BPPRD tidak lebih spesifik untuk pajak sarang burung walet, sehingga tidak bisa menjadi acuan yang lebih prinsip dan mengikat dalam melakukan penagihan pajak sarang burung walet tersebut. Mengenai pembagian tugas setiap ASN sudah mengetahui dengan pasti tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan. Berikut ini SOP yang tersedia di BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 5.4 SOP Penagihan Pajak/ Retribusi Daerah

No	Uraian Prosedur	Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Menerima laporan SKPD dari sub bidang penetapan	SKPD	20 menit	SKPD	
2	Melakukan pengolahan data wajib pajak	SKPD	1 jam	Surat teguran	
3	Membuat surat teguran dan memberi waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran	Surat teguran	10 menit	Surat teguran	
4	Memberikan paraf koordinasi terhadap surat teguran	Surat teguran	10 menit	Surat teguran di paraf	
5	Melakukan proses otorisasi terhadap surat teguran	Surat teguran diparaf	10 menit	Surat teguran ditanda tangani	
6	Melakukan pendistribusian surat	Surat teguran	1 hari	Pelunasan tunggakan	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Uraian Prosedur	Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	teguran kepada wajib pajak atau pihak terkait			wajib pajak/ tidak	
7	Memeriksa daftar tunggakan apabila wajib pajakn belum melakukan pembayaran setelah 7 hari jatuh tempo surat teguran maka diterbitkan surat paksa	Daftar tunggakan	7 hari	Daftar tunggakan	Jika wajib pajak sudah melakukan pembayaran maka tidak diterbitkan surat paksa
8	Membuat surat paksa dan memberi waktu 21 hari setelah jatuh tempo tanggal surat teguran selama 7 hari	Daftar tunggakan	10 menit	Surat paksa	
9	Memberikan paraf koordinasi terhadap surat paksa	Surat paksa	10 menit	Surat paksa di paraf	

Sumber : BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa SOP pemungutan pajak di Kabupaten Kepulauan Meranti hanya diperuntukkan untuk pemungutan pajak secara keseluruhan termasuk pajak sarang burung walet, sementara dalam pemungutan pajak sarang burung walet seharusnya menggunakan SOP tersendiri dikarenakan proses pemungutan pajak sarang burung walet berbeda dengan pajak dan retribusi lainnya.

Sistem Pemungutan Pajak mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya pada wajib pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri dan kemudian melaporkan pajak dan penghitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutangdan yang telah dibayar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari penghimpinan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pajak sarang burung walet adalah suatu sumber pendapatan daerah dimana pajak sarang burung walet termasuk salah satu penerimaan daerah yang potensial yang penerimaanya dapat dijadikan dana pembangunan daerah. Oleh karena itu penangannya harus serius sehingga penerimaan dari dari pajak burung walet tersebut betul-betul dapat meningkatkan dan dapat dijadikan sebagai sumber dana dalam pembangunan dan pelaksanaan roda pemerintahan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai Problematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung wallet di Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan secara *self assistment* yaitu wajib pajak menghitung sendiri besar biaya pajak yang akan disetor kepada penerima pajak. Namun sampai saat ini wajib pajak tidak mau melaporkan langsung hasil dari penjualan sarang burung wallet ke BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, oleh sebab itu pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung wallet dipungut langsung oleh BPPRD dengan menugaskan pegawainya. Petuas langsung terjun kelapangan memungut pajak sarang burung wallet ketempat daerah penangkaran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

wallet yang mendapat izin dan yang sudah terdata. Biasanya pungutan pajak terjadi apabila sudah sampai masa panen sarang burung wallet yaitu 3 bulan.

Penangkaran burung wallet terus berkembang sesuai dengan perkembangan daerah tersebut namun kenyataan penerimaan pajak burung wallet selalu mengalami penurunan dan realisasi penerimaannya kurang dari target yang ditetapkan. Untuk itu perlu dilakukan inovasi baru dalam proses pemungutan pajak sarang burung wallet, agar dapat meningkatkan penerimaan pajak dari hasil burung wallet tersebut.

5.2. Faktor Penghambat Dalam Problematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Kepulauan Meranti

Pajak sarang burung walet adalah suatu sumber pendapatan daerah dimana pajak sarang burung walet termasuk salah satu penerimaan daerah yang potensial yang penerimaanya dapat dijadikan dana pembangunan daerah. Oleh karena itu penangannya harus serius sehingga penerimaan dari dari pajak burung walet tersebut betul-betul dapat meningkatkan dan dapat dijadikan sebagai sumber dana dalam pembangunan dan pelaksanaan roda pemerintahan.

Penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh Bupati, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD. Wajib pajak terutang tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Pajak sarang burung wallet terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pajak yang terutang dalam Perda No.08 tahun 2002 adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Misalnya selambat-lambatnya perpajakan daerah, 15 bulan berikutnya dari masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak sarang burung wallet diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, maka pajak sarang burung walet harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tahun diterbitkan.

Pembayaran pajak sarang burung walet yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah sesuai waktu yang ditentukan. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh kepala daerah. Namun dalam proses pemungutan pajak sarang burung walet masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak sarang burung walet adalah sebagai berikut :

5.2.1. Sosialisasi kebijakan pemungutan burung wallet tidak tepat sasaran.

Sampai saat ini sosialisasi hanya ke mendatangi tempat – tempat sarang burung wallet tertentu, sehingga tempat yang tidak terkunjungi tidak memahami mengenai pajak sarang burung wallet. Sebaiknya sosialisasi dilakukan kepada seluruh pengusaha burung wallet bahkan juga diberikan kepada masyarakat. Sehingga semua pengusaha burung wallet dan juga masyarakat dapat mengetahui mengenai pajak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sosialisasi pemungutan pajak sarang burung wallet tidak hanya menjelaskan mengenai jumlah pajak, siapa yang memungut pajak dan tata cara pembayaran pajak saja. Namun lebih ke membangun kesadaran pengusaha burung wallet khususnya akan pentingnya membayar pajak demi meningkatkan pendapatan daerah demi kemajuan daerah serta mengajak wajib pajak yang lain untuk mau membayar pajak tepat waktu. Berikut ini merupakan gambar saat melakukan sosialisasi pajak sarang burung walet.



Dari gambar diatas terlihat kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti kepada wajib pajak dalam rangka pembayaran pajak di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Berdasarkan gambar diatas, diketahui selain dari sosialisasi langsung yang diberikan, BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti juga membuat baleho mengenai himbauan dalam membayar pajak agar wajib pajak membayar pajak tepat waktu

5.2.2. Rendahnya koordinasi dalam kebijakan wallet di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Banyak pihak yang terkait dalam pelaksanaan penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sehingga membutuhkan koordinasi agar dapat terlaksana dengan baik. Hakikat koordinasi adalah akibat logis dari pada adanya prinsip pembagian tugas, dimana setiap satuan kerja atau unit melaksanakan sebagai tugas pokok organisasi secara keseluruhan. Koordinasi timbul karena adanya prinsip fungsionalisme dimana setiap satuan kerja atau unit hanya melaksanakan sebagian fungsi sebagai rincian tugas pokok dalam suatu organisasi. Koordinasi terjadi karena

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adanya rentang kendali dimana pimpinan wajib membina, membimbing, dan mengarahkan serta mengendalikan berbagai kegiatan/usaha yang dilakukan oleh sejumlah pegawai - pegawai bawahan yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Koordinasi lebih diperlukan dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks, dimana berbagai fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh berbagai satuan kerja/unit yang harus dilakukan secara terpadu dan sinkron/simultan dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

5.2.3. Rendahnya Jumlah staf pemungut pajak di BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti

Jumlah petugas teknis dilapangan, hal ini dikarenakan jumlah pegawai yang masih sedikit hanya berjumlah 7 orang sedangkan jarak tempuh yang dijalani dalam pemungutan pajak sarang burung wallet yang cukup jauh bahkan antar pulau sehingga membutuhkan waktu lama untuk proses penagihan kepada wajib pajak.

5.2.4. Pendidikan pegawai

Pegawai yang ada di BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti belum ada yang memiliki latar belakang pendidikan mengenai perpajakan, sehingga diperlukannya pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi pegawai dalam memahami tugasnya dibidang perpajakan.

5.2.5. Insentif yang masih rendah.

Dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan motivasi yang bersifat intrinsic dan ekstrinsik, hal ini berarti para petugas pemungut pajak melakukan suatu kegiatan atau usaha dalam proses pemungutan pajak dilapangan akan diberi suatu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

reward baik itu berupa insentif atau bentuk penghargaan lainnya. Tetapi pada kenyataannya insentif yang diberikan masih rendah dan tak seimbang dengan apa yang dikerjakan, untuk di BPPRD yang diberikan insentif hanya Aparatur Sipil Negara (ASN) sedangkan untuk tenaga Non ASN atau pegawai honorer tidak diberikan insentif dikarenakan tidak ada regulasi yang mengatur tentang pemberian insentif tersebut hanya gajinya saja.

5.2.6. SOP yang masih umum dalam bidang Kebijakan Pajak.

Sampai saat ini belum ada SOP yang mengatur secara rinci mengenai pemungutan pajak sarang burung wallet. SOP yang ada hanya mengatur pajak secara keseluruhan bukan untuk mengatur sarang burung wallet di Kabupaten Kepulauan Meranti. adapun SOP yang tersedia di BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Sebaliknya, mereka mengandalkan pada prosedur-prosedur biasa yang menyederhanakan pembuatan keputusan dan menyesuaikan tanggung jawab program dengan sumber-sumber yang ada. Namun demikian prosedur-prosedur biasa yang dirumuskan pada masa lalu mungkin dimaksudkan untuk menyelesaikan keadaan-keadaan khusus yang berbeda dengan keadaan sekarang sehingga jsutru akan menghambat perubahan dalam kebijakan karena prosedur-prosedur biasa itu tidak sesuai dengan keadaan-keadaan baru atau programprogram baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah Problematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti belum optimal hal ini dikarenakan data di BPPRD dan Balai Karantina tidak sesuai.

Faktor penghambat dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah :

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sarang burung wallet, dengan alasan kurangnya keuntungan yang didapatinya. Padahal pajak itu sendiri penting dari penerimaan pajak dapat pembangunan daerah dan untuk kepentingan umum, akan tetapi masyarakat kurang menyadari hal itu.
2. Masih rendahnya kejujuran wajib pajak dalam membayar pajak. Indikator sumberdaya, perlu diadakan penambahan pegawai terutama pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan perpajakan dan juga petugas teknis dilapangan, hal ini dikarenakan jumlah pegawai yang masih sedikit dan jarak tempuh yang cukup jauh bahkan antar pulau sehingga membutuhkan waktu lama untuk proses penagihan kepada wajib pajak.
3. Minimnya sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk memungut pajak kepada wajib pajak. Sebagian besar petugas pemungutan masih menggunakan kendaraan pribadi, hal ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dikarenakan minimnya fasilitas kendaraan operasional yang akan digunakan untuk memungut pajak sehingga mau tidak mau pegawai menggunakan kendaraan pribadi untuk memungut pajak.

4. Dalam proses penagihan kepada wajib pajak sarang burung wallet, wajib pajak selalu memberikan alasan yang tidak wajar, seperti usahanya kurang menguntungkan, kemudian wajib pajak selalu menutup tempat penakaran wallet tersebut dengan alasan wajib pajak tidak ada ditempat pada saat pemungutan. Indikator Struktur Birokasi adalah perlu adanya inovasi dalam pemungutan pajak sarang burung wallet. Terutama dalam hal kebijakan yang digunakan, hal ini dibuat agar dapat memberikan kesadaran kepada wajib pajak agar membayar pajak tepat waktu dan juga petugas tidak perlu bersusah payah menjemput pajak kepada wajib pajak.

6.2. Saran

1. Kepada Wajib Pajak diharapkan kerjasama yang baik dengan pemerintah dalam hal pembayaran pajak, dan juga bersikap jujur mengenai jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah.
2. Diharapkan kepada Kepala BPPRD untuk meningkatkan jumlah staf terutama yang memiliki latar belakang pendidikan pajak sehingga pembagian tugas dapat dilakukan dengan baik dan juga dapat mengefisiensikan waktu dalam pemungutan pajak. Dan juga diharapkan dapat memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan pegawai dalam menjalankan tugas sehingga tidak adalagi pegawai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang menggunakan fasilitas pribadi dalam menjalankan tugas memungut pajak kepada wajib pajak.

3. Pada indikator disposisi, diharapkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan meskipun jumlah yang dibayarkan lebih sedikit, namun tetap harus disetorkan tepat pada waktunya sehingga target kinerja dari pegawai pengelola pajak dapat terealisasi.
4. Pada indikator sumber daya, diharapkan BPPRD memiliki inovasi baru dalam hal pemungutan pajak sehingga dapat menimbulkan kedasaran dari diri wajib pajak dan petugas tidak perlu turun langsung kelapangan untuk memungut pajak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdurrahmat Fathoni. 2009. Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.

Anggara, Sahya, 2012. Ilmu Administrasi Negara. Pustaka Setia.

Arief Suadi, Sistem Pengendalian Manajemen, BPFE, Yogyakarta, 2006, hlm. 3

Arief. Budiman, 1995, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta, PT. Gramedia Pustakan Utama

Asep Suryana, Strategi Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah, 2010

Atmosudirdjo, Prajudi. (*1986*).Dasar-Dasar Ilmu Administrasi.Jakarta: Ghalia. Indonesia.

Batinggi, Ahmad (*1999*). Manajerial Pelayanan Umum. Jakarta: Universitas. Terbuka.

Boediono, *1999*, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta: BPFE

Creswell, J. W. *2010*. Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogjakarta: PT *Pustaka* Pelajar.

Donni Juni Priansa. 2012. Perencanaan dan Pengembangan SDM. Alfabeta. Bandung.

Edwards, Jack E, John C. Scott, and Nambury S. Raju. 2007. *Evaluating Human Resources Programs: A 6-Phase Approach for Optimizing Performance. San Fransisco: John Wiley & Sons, Inc.*

Fandy Tjiptono, 2004, Strategi Pemasaran, edisi kedua, Andi,. Yogyakarta.

Gaspersz, Vincent. 1997. Manajemen Kualitas. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Gie, The Liang. 2009. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta : Liberty.

Handayaningrat, Soewarno, 2002, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta : Haji Masagung

Hardiansyah .2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media

Ibrahim. 2008. Prinsip-Prinsip Total *Quality Service*. Yogyakarta: Andi.

Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. D. (2005). *Transferring learning to behavior: Using the four levels to improve performance. San Fransisco: BerrettKoehler Publishers.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lijan, Sinambela. 2014 . Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Lungry, Pramusinto, Agus. 2014. Reformasi, Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta. Gava Media.

Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta,2010. hlm. 62

Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 241-242

Moenir, 1995. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Moenir. 2002. Maanajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi. Aksara.

Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja

Mulyadi Nitisusastro, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, ALFABETA, Jakarta, 2010, hlm. 166

Parasuraman. 1990. *Delivering Quality Service. New york: The Free. Press.*

Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Alfabeta, Bandung.

Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2014. Manajemen pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Riduwan. *2010*. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Rivai, Veithzal dan Ella Sagala, *2013*. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, Rajawali Pers, Jakarta.

Rokhmatun, Burhanudin Dwi. 2013. Profesi Kearsipan. Yogyakarta: UGM.

S.P Hasibuan, Malayu. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. PT. Bumi Aksara.

Sedarmayanti, 1999, Restruktur dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Esensial dan Aktual, Bandung: Mandar Maju

Sedarmayanti, 2010. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, cetakan kedua, Penerbit : Mandar Maju. Bandung.

Siagian, Sondang P. 2008. Filsafat Administrasi. Alfabeta. Bandung.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Siagian, Sondang., P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi. Pertama). Jakarta: Binapura Aksara.

Sinambela, Lijan Poltak. 2008. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan. Implementasi. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Siswanto, Pengantar Manajemen, cet. 1, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 139-140

Stephen P. Robbins, Manajemen, Edisi kedelapan/Jilid 2, PT Indeks, 2007, hlm. 250

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sunyoto dan Burhanuddin. 2015. Teori Perilaku Keorganisasian. Penerbit CAPS, Yogyakarta.

Syafiie, Inu Kencana dkk, 1999. Ilmu Administrasi Publik, PT. Rineka Cipta,. Jakarta.Syafiie, Inu Kencana. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Syafiie. Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Syafri, Wirman. 2012. Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga.

T. Hani Handoko, Manajemen Edisi Kedua, (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm.359

Waluyo, 2007. Manajemen Publik Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Mandar Maju. Bandung.

Winardi, S.E, Manajemen Prilaku Organisasi (Jakarta:PRENADA MEDIA GROUP,2014) cet. 4,Hlmn 383

Zeithaml, V. Parasuraman, A. and L. Berry L. 1985. "Problems and Strategies in Services Marketing". Jurnal of Marketing Vol. 49. (Spring).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Peraturan Perundang - Undangan :

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pajak Sarang Burung Walet

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :